



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
INSPEKTORAT

. Lintas Sumatera KM.2 Pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : <http://www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id> Email :
lrda_dharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor: 700/ 63 /Reviu/Inspektorat-2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

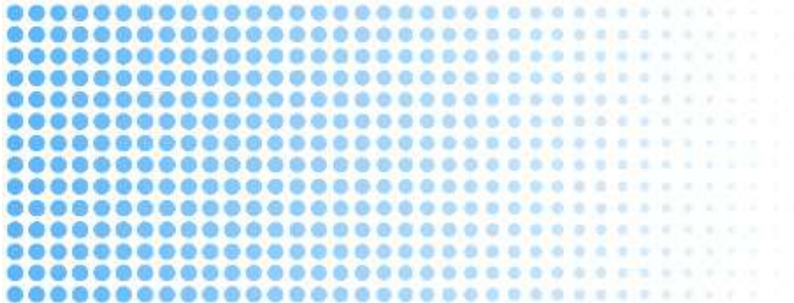
Pulau Punjung, 17 Maret 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Drs. ANDY SUMANTO, CfrA
NIP.19681220 199009 1 001



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024



PULAU PUNJUNG, 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 selesai tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan merupakan amanat dan kewajiban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat 1 (satu), menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian laporan ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagi pemerintah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Disadari secara substansi, redaksional maupun *outline* dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh, saran, kritik dan masukan semua pihak diharapkan dapat menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tim Penyusun LPPD Tahun 2024 serta kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LPPD ini selesai tepat waktu.



Pulau Punjung, Maret 2025
BUPATI DHARMASRAYA,


ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H.,LL.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	62
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	76
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	79
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	79
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	87
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Outcome	87
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	94
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Output	98
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	139
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	263
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	263
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	264
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	264
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	264
3.3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/kota.....	271
3.3.3 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/kota..	279

3.3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/kota ..	282
3.4 Permasalahan dan Tindak lanjut.....	288
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	291
4.1 Urusan Pendidikan	291
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	307
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	346
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	359
4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	370
4.6 Bidang Urusan Sosial	402
4.7 Program dan Kegiatan.....	420
BAB V PENUTUP	432

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	5
Tabel 1.2	Formasi dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	7
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya 2022 s.d 2024.....	13
Tabel 1.4	Luas wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	13
Tabel 1.5	Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....	15
Tabel 1.6	Tabel Luas Wilayah.....	16
Tabel 1.7	Rincian Perangkat Daerah Kab.Dharmasraya tahun 2024.....	19
Tabel 1.8	Rekap Pegawai Per OPD Berdasarkan Urusan Pemerintah	26
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024	27
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Golongan Per31 Des 2024	29
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Per 31 Des 2024.....	32
Tabel 1.12	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024	34
Tabel 1.13	Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 1.4	Program Berdasarkan Urusan Pemerintah, Fungsi pengawasan, fungsi Pendukung urusan yang memuat Alokasi Anggran dan Realisasi Belanja	41
Tabel 1.15	Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. Dharmasraa dalam RPJMD Tahun 2021-2026.....	66
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro	80
Tabel 2.2	Capaian IPM Kab. Dharmasraya.....	79
Tabel 2.3	Indikator Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya	81
Tabel 2.4	Indikator Ketenaga Kerjaan Kab. Dharmasraya	83
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	84
Tabel 2.6	PDRB Perkapita Kab. Dharmasaraya	85
Tabel 2.7	Ketimpangan Pendapatan Kab. Dharmasraya.....	86
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Kunci Outcome	87
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang.....	94
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Kunci Output.....	98

Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	140
Tabel 2.12	capaian indikator kinerja utama kabupaten Dharmasraya.....	142
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024	146
Tabel 2.14	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	146
Tabel 2.15	perbandingan Kinerja Rasio Keantapana jalan.....	147
Tabel 2.16	Volume Capacity Ratio Jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024	147
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2024	150
Tabel 2.18	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	15
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Berdasarkan target tahun 2024.....	153
Tabel 2.20	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	153
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2024	155
Tabel 2.22	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 4Tahun Terakhir	156
Tabel 2.23	Data Kawasan Lingkungan kumuh Tahun 2024.....	156
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2024.....	159

Tabel 2.25	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2023	
Tabel 2.26	Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman layak huni	160
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	161
Tabel 2.28	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	161
Tabel 2.29	Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024.....	162
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasar karget tahun 2024	164
Tabel 2.31	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup.....	165
Tabel 2.32	Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2024.....	166
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024.....	171
Tabel 2.34	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	171
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024.....	172
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024	173
Tabel 2.37	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024.....	173
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2024.....	175
tabel 2.39	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024	175
Tabel 2.40	Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2024.	177
Tabel 2.41	Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024	177

Tabel 2.42	Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat.....	178
Tabel 2.43	Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	178
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB	181
Tabel 2.45	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2024	182
Tabel 2.46	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Dharmasraya.....	182
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	186
Tabel 2.48	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024.....	186
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2024	189
tabel 2.50	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	190
Tabel 2.51	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2024	191
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi	193
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	197
Tabel 2.55	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	198
Tabel 2.56	Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP	201
Tabel 2.57	Komponen Penilaian SAKIP.....	201
Tabel 2.58	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	203
Tabel 2.59	Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat	204
Tabel 2.60	Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B.....	205
Tabel 2.61	Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2024.....	209
Tabel 2.62	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	209

Tabel 2.63	Perbandingan capaian kinerja LPPD Dharmasraya dengan Kabupaten Kota Lain dan Provinsi Sumatera Barat.....	213
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2024	213
Tabel 2.65	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024....	213
Tabel 2.66	Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi	213
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2024.....	216
Tabel 2.68	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024	216
Tabel 2.69	Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional.....	216
Tabel 2.70	Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2024.....	218
Tabel 2.71	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2024	219
Tabel 2.72	Hasil IPP 2024 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat.....	219
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2024.....	220
Tabel 2.74	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Capaian Kinerja 4 Tahun Terakhir	220
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial.....	224
Tabel 2.76	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4Tahun Terakhir	225
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi	227
Tabel 2.78	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir.....	228
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Lingkungan.....	230
Tabel 2.80	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	231

Tabel 2.81	Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2024	234
Tabel 2.82	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	234
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	237
Tabel 2.84	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	237
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2024	240
Tabel 2.86	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	241
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat	247
Tabel 2.88	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 2 (Dua) Tahun Terakhir	248
Tabel 2.89	Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya	248
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif	251
Tabel 2.91	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	251
Tabel 2.92	Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya	253
Tabel 2.93	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir	254
Tabel 2.94	Laporan Keuangan Unaudited Anggaran Tahun 2024	256
Tabel 2.95	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	258
Tabel 2.96	Laporan Keuangan Unaudited Anggaran Tahun 2024	259

Tabel 3.1	Target kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmiigrasi.....	265
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Nakertrans Dharmasraya	266
Tabel 3.3	Target kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian	271
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Dharmasraya.....	272
tabel 3.5	Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Dinas Nakertrans Dharmasraya	278
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Dinas Nakertrans Dharmasraya	280
Tabel 3.7	Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Dharmasraya.....	281
Tabel 3.8	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Dharmasraya.....	282
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan	292
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan	293
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	296
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	296
Tabel 4.5	Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	297
Tabel 4.6	Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini.....	298
Tabel 4.7	Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar.....	300
Tabel 4.8	Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan.....	303
Tabel 4.9	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	308
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan	309
Tabel 4.11	Jumlah Personil Pendukung Pelayanan Dasar Kesehatan.....	311
Tabel 4.12	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	312
Tabel 4.13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	312
Tabel 4.14	Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	313
Tabel 4.15	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	315
Tabel 4.16	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	318

Tabel 4.17	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
Tabel 4.18	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita.....	322
Tabel 4.19	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	324
Tabel 4.20	Mutu Pelayanan Logistik Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.....	327
Tabel 4.21	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	329
Tabel 4.22	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi.....	331
Tabel 4.23	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus	334
Tabel 4.24	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	336
Tabel 4.25	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	338
Tabel 4.26	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	341
Tabel 4.27	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	348
Tabel 4.28	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	348
Tabel 4.29	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	350
Tabel 4.30	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	350
Tabel 4.31	Realisasi SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	353
Tabel 4.32	Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Sehari-hari	354
Tabel 4.33	Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik.....	356
Tabel 4.34	Target Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	361
Tabel 4.35	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	362
Tabel 4.36	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	363
Tabel 4.37	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	363
Tabel 4.38	Realisasi SPM bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	365

Tabel 4.39	Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	366
Tabel 4.40	Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah	367
Tabel 4.41	Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	371
Tabel 4.42	Alokasi Anggaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	372
Tabel 4.43	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	376
Tabel 4.44	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	376
Tabel 4.45	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	377
Tabel 4.46	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	377
Tabel 4.47	Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	392
Tabel 4.48	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum.....	393
Tabel 4.49	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pencapaian Kebencanaan ...	395
Tabel 4.50	Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Korban Kebakaran.....	397
Tabel 4.51	Target Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	402
Tabel 4.52	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Sosial	403
Tabel 4.53	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	405
Tabel 4.54	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	405
Tabel 4.55	Realisasi SPM bidang Urusan Sosial.....	406
Tabel 4.56	Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Terlantar diluar Panti.....	408
Tabel 4.57	Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	411
Tabel 4.58	Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti.....	413
Tabel 4.59	Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	416
Tabel 4.60	Mutu Pelayanan Dasar Perlindungan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	418

Tabel 4.61	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	420
Tabel 4.62	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	422
Tabel 4.63	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	424
Tabel 4.64	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	425
Tabel 4.65	Program dan Kegiatan Urusan Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	426
Tabel 4.66	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	430

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya	4
Gambar 1.2	Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	6
Gambar 1.3	Peta Kelereng Kabupaten Dharmasraya	6
Gambar 1.4	Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya	9
Gambar 1.5	Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya	12
Gambar 1.6	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	IKK outcome dan Output	432
----------	------------------------------	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan *Ranah Cati Nan Tigo*.

Nama Kabupaten Dharmasraya diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, dimana pada prasasti itu disebutkan *Dharmasraya* sebagai ibukota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung* sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis *Podzolik Merah Kuning* (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12%) sedangkan untuk penggunaan lain sebesar (14,90 %). Suhu udara di kabupaten ini berkisar antara 21 °C – 33 °C dengan rata-rata hari hujan 14.35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan.

Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya secara resmi setelah dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya H. Ahmad Munawar .M.M. pada tanggal 10 Januari 2004 dan sejak tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten

Dharmasraya telah memiliki bupati definitif hasil Pilkada secara langsung, yaitu H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, S.E. dan Ir. Tugimin sebagai wakilnya. Pada pilkada 2010, terpilih pasangan H. Adi Gunawan, M.M. dan H. Syafruddin R. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2010-2015, keduanya dilantik 12 Agustus 2010. Tanggal 9 Desember 2015, digelar pilkada serentak dan terpilih Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Dt Rajo Medan sebagai wakilnya, yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Selanjutnya tanggal 9 Desember 2020 dilakukan Pilkada keempat yang dimenangkan oleh pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan DP Datuk Labuan, dan telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dilantik kembali menjadi Bupati Dharmasraya untuk periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Dharmasraya dengan Wakil Bupati Dasril Panin Datuk Labuan dengan masa jabatan 2021-2026.

Kabupaten Dharmasraya dapat digambarkan secara umum meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- i) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024;
- j) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

b. Data Geografis Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

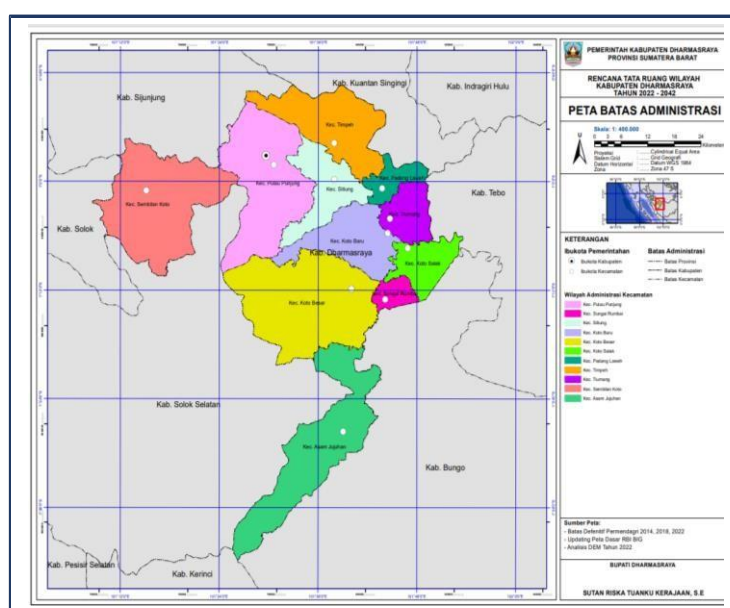
Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 KM² atau 296.113 Ha sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas yang telah diperbaharui menggunakan menggunakan citra tahun 2022 dan telah dsesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Terbaru yaitu : 292.120Ha.



Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi $00^{\circ}48'25,4''$ - $1^{\circ}41'40,3''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}8'32,5''$ - $101^{\circ}53'30,2''$ Bujur Timur yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera.

Adapun, batas-batas wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui gambar peta administrasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Penjelasan :

- Sebelah utara** berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur** berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat** berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Topografis

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

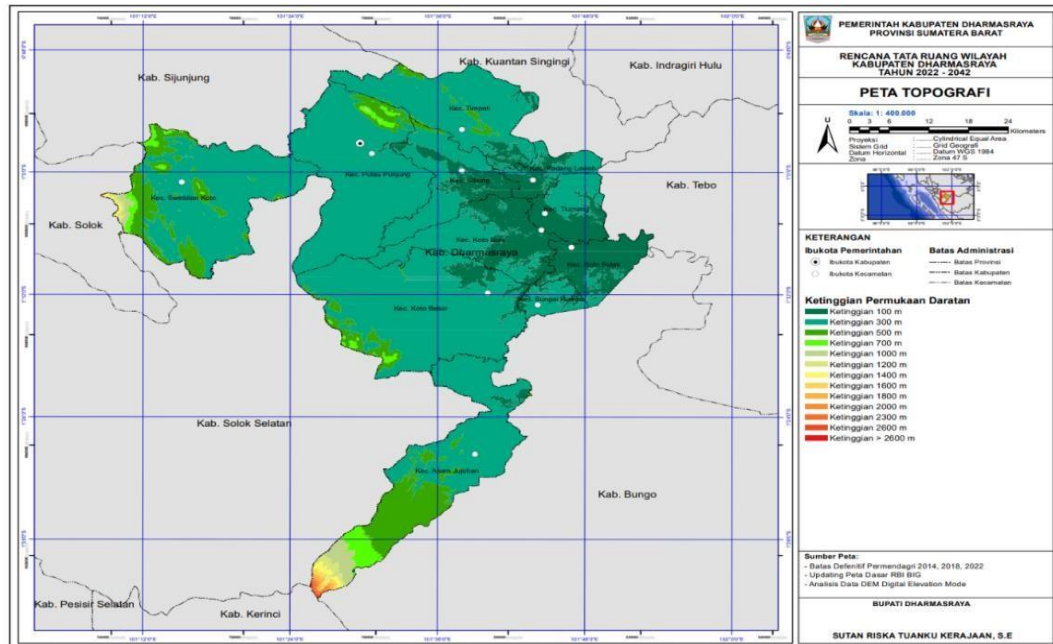
Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Simbol	Klasifikasi Kemiringan Lereng	Tingkat Kemiringan	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 2,99 %	74,378	25.46
2	Agak Landai	3 – 7,99 %	134,367	46.00
3	Landai	8 – 14,99 %	35,852	12.27
4	Agak Curam	15 – 24,99 %	22,829	7.82
5	Curam	25 – 45 %	18,663	6.39
6	Sangat Terjal	>45 %	6,031	2.06
Jumlah			292.120	52

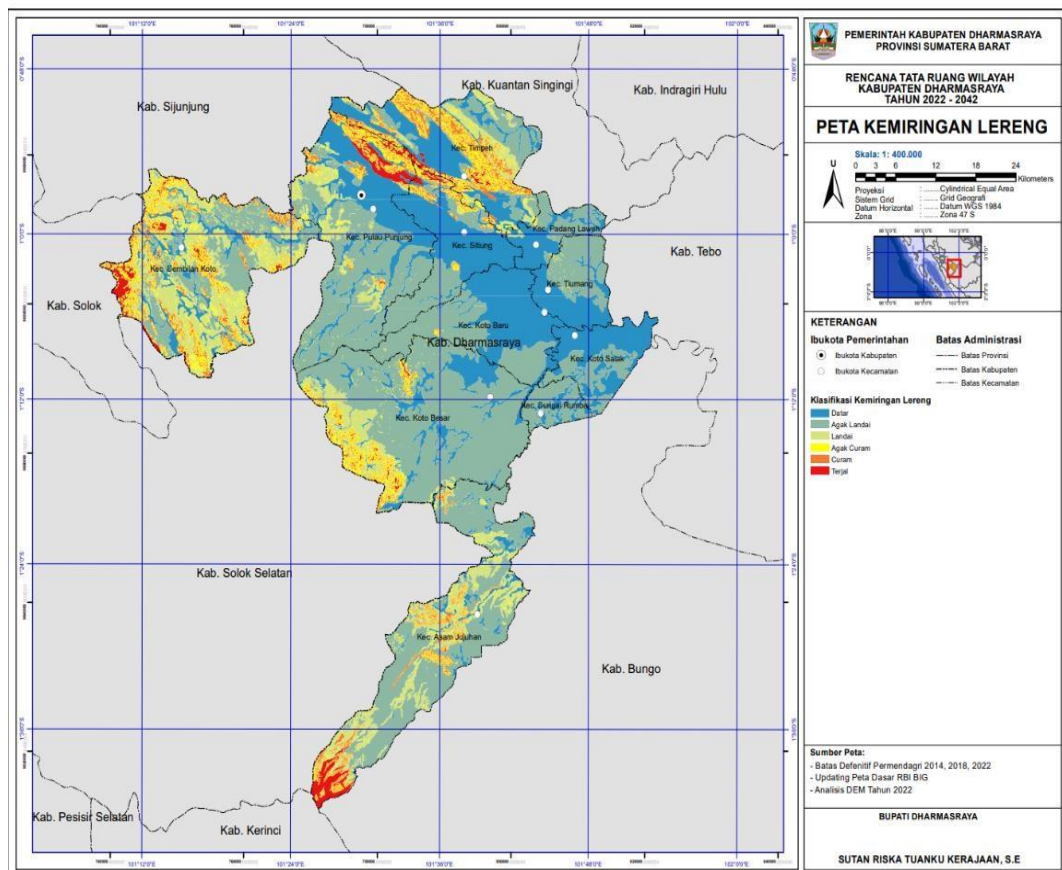
Sumber : Hasil Perhitungan Peta Topografi dan Digital Elevasi DEM 2022

Gambar 1.2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 1.3 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



3. Geologi

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- | | |
|---|---|
| 1. Aluvium | 12. Porfir Kuarsa |
| 2. Endapan Undak | 13. Granodiorit |
| 3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan | 14. Formasi Barisan, Anggota batugamping |
| 4. Lava | 15. Formasi Barisan |
| 5. Formasi Kasai | 16. Formasi Pelepat |
| 6. Formasi Rantaukil | 17. Diabas, Basal |
| 7. Formasi Telisa, Anggota bawah | 18. Formasi Silungkang |
| 8. Formasi Gumai | 19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah |
| 9. Formasi Talang Akar | 20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih |
| 10. Formasi Sinamar | 21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping |
| 11. Granit | |

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 1.4 dan Tabel 1.2

Tabel 1.2
Formasi dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

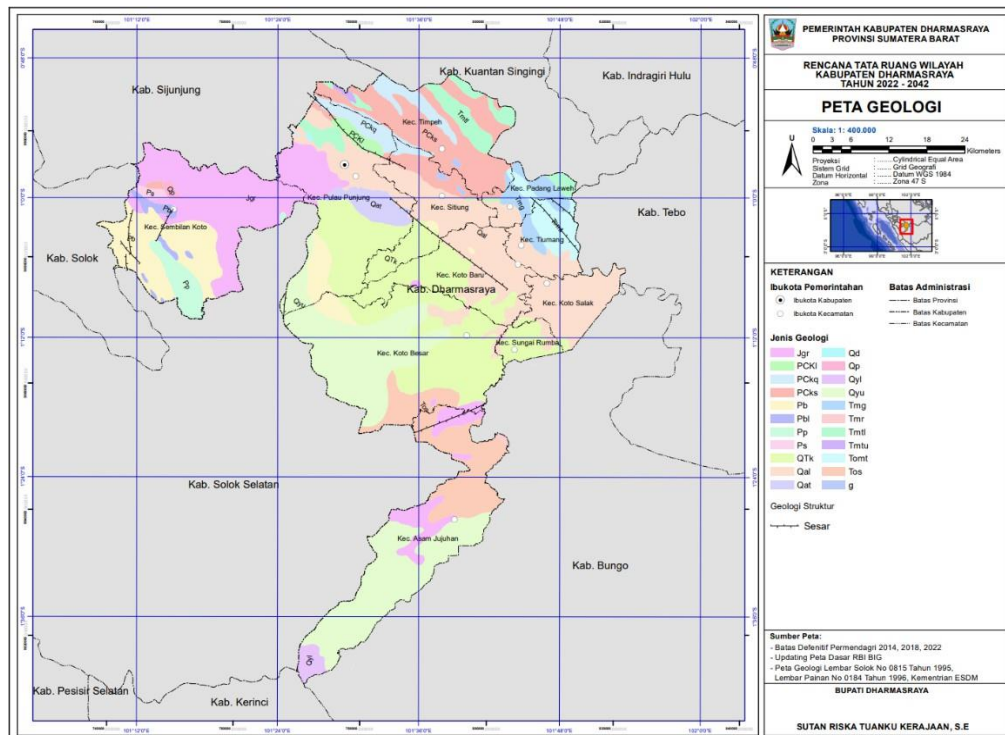
No	Simbol	Umur	Formasi	Litologi
1	Qal	Holosen	Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil
2	Qat	Holosen	Endapan Undak	Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai
3	Qy u/ Qv kb	Kuarter	Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan	Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan basalt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh
4	Qvl	Kuarter	Lava	Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh
5	Qtk	Plio-Plistosen	Formasi Kasai	Tuf batuapung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa diketemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m.
6	Tmr	Miosen	Formasi Rantaukil	Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugamping.

7	Tmtl	Miosen	Formasi Telisa, Anggota bawah	Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit
8	Tmg	Miosen	Formasi Gumai	Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, terutama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m.
9	Tomt	Oligo-Miosen	Formasi Talang Akar	Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glokonitan; tebal maksimum 1.500 m.
10	Tos	Oligosen	Formasi Sinamar	Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral.
11	Jgr	Yura Awal	Granit	Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda.
12	g	Trias	Granit	Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umurnya 112;24 juta tahun.
13	qp	Trias	Porfir Kuarsa	Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik.
14	gd	Trias	Granodiorit	Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligoklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan.
15	Pbl	Perem	Formasi Barisan, Anggota batugamping	Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal.
16	Pb	Perem	Formasi Barisan	Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta.
17	Pp	Perem	Formasi Pelepat	Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitik; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan.
18	d	Permo-Karbon	Diabas, Basal	Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit.
19	Ps	Permo-Karbon	Formasi Silungkang	Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasiran, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt

20	PCkq	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Bawah	Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkersikkan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat.
21	PCka	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih	Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan, sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi.
22	PCkl	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Batugamping	Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisipan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkersitkan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut

Gambar 1.4
Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

4. Hidrologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dharmasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)

1. Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*) Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.
2. Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive aquifers*) Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.
3. Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*) Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)

1. Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*) Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.
2. Akifer produktivitas sedang, dengan sebaran luas (*extensive, moderately productive*) Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

3. Setempat, akifer dengan produktifitas sedang (locally, moderately productive aquifers) Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels)

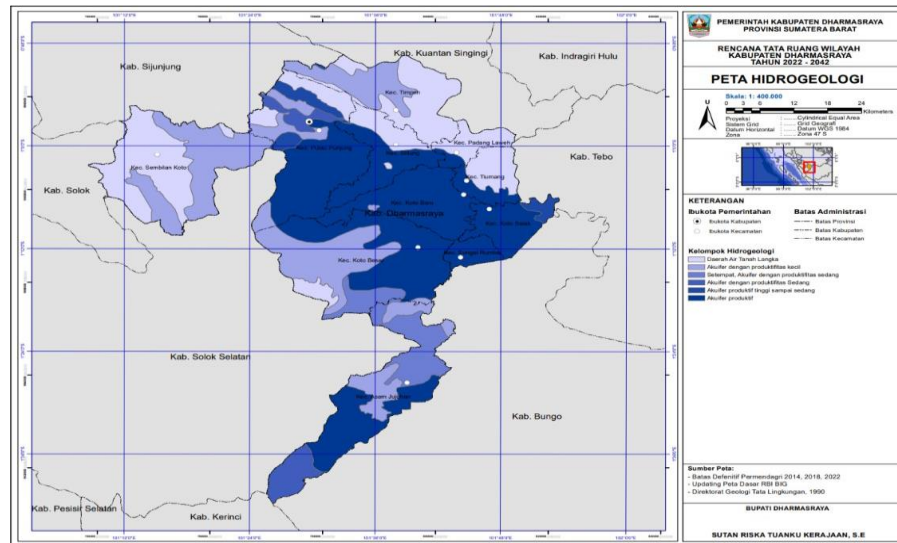
1. Akifer produktif tinggi sampai sedang (highly to moderately productive aquifers) Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater)

1. Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (poorly productive aquifers of local importance) Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.
2. Daerah air tanah langka (regions without exploitable groundwater)
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada catchment area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi discharge air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (akifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis akifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Gambar 1.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

5. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, kepadatan, jenis kelamin dan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan struktur usia.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Laki-laki	115.876	120.602	122,982
2	Perempuan	112.925	117.122	119,210
Jumlah (jiwa)		228.801	237.724	242,192
Rasio Jenis Kelamin (%)		102,61	102,97	103,16
Pertumbuhan Penduduk (%)		0,77	3,90	1,84
Rata-rata Pertumbuhan (%)		1,84		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2025

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan 113.391 jiwa, dari 228.801 jiwa di tahun 2022 menjadi 242.192 jiwa di tahun 2024, terdiri dari 122.982 laki-laki dan 119.210 perempuan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,84%. Adapun rasio jenis kelamin tahun selama tiga tahun terakhir lebih besar dari angka 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan namun perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki tersebut tidak begitu besar.

2. Kepadatan Penduduk

Tabel 1.4
Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	4.950	23.586	4.84
2	Koto Besar	53.780	28.214	5.29
3	Asam Jujuhan	43.280	9.120	0.22
4	Koto Baru	21.813	33.869	1.58
5	Koto Salak	12.212	18.267	1.52
6	Tiumang	11.243	13.733	1.24
7	Padang Laweh	7.184	6.877	1.00
8	Sitiung	18.459	29.515	1.62
9	Timpeh	28.711	18.102	0.65
10	Pulau Punjung	43.835	46.790	1.09
11	Sembilan Koto	46655	9.651	0.21
	Jumlah	292.120	228.801	0.83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.



Pada tabel di atas, Dharmasraya memiliki luas wilayah 292,120 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 228.801 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 53.870 Ha atau 18,41% dari total luas wilayah. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 4.950 Ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 46.790 jiwa atau 19,68% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.877 jiwa atau hanya 2,89% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk bruto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,83 jiwa/Ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,84 jiwa/Ha, namun memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sembilan Koto yaitu 0,21 jiwa/km².

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur per kelompok usia empat tahun, dapat dilihat proporsi penduduk masing-masing kelompok umur berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

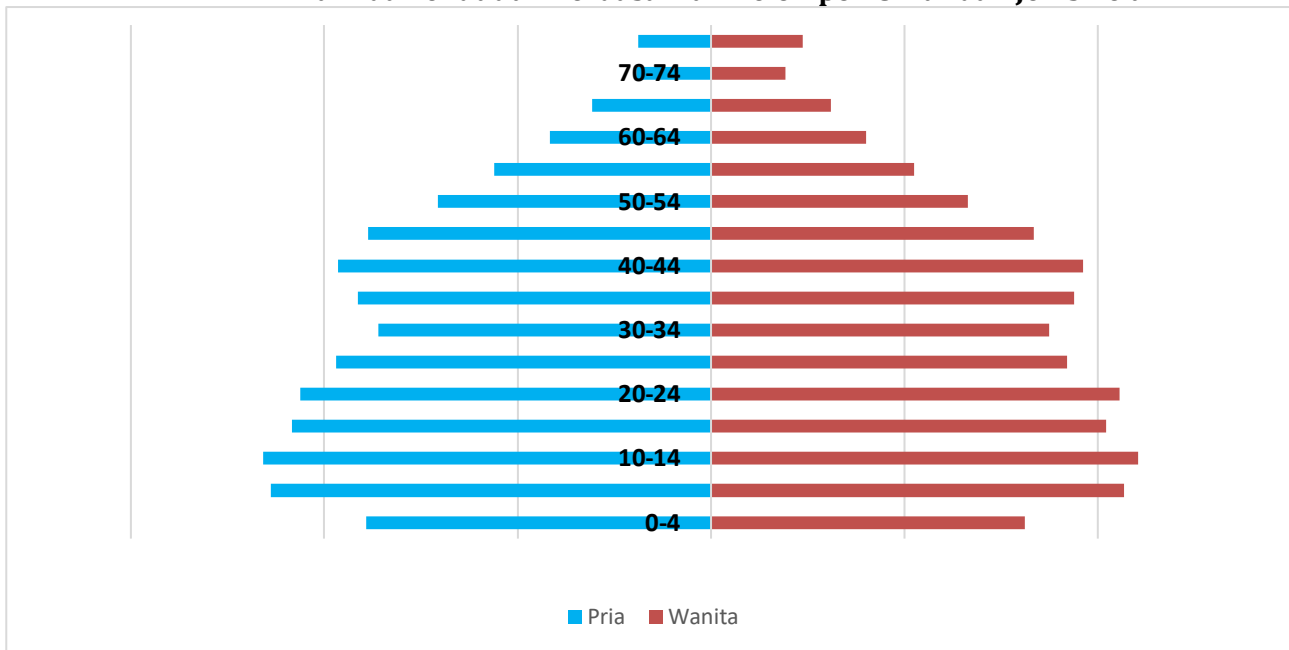
Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
	Pria	Wanita		
1	2	3	4	5
00-04	8,919	8,118	17,037	109.87
05-09	11,377	10,675	22,052	106.58
10-14	11,574	11,045	22,619	104.79
15-19	10,828	10,216	21,044	105.99
20-24	10,616	10,556	21,172	100.57
25-29	9,690	9,206	18,896	105.26
30-34	8,609	8,745	17,354	98.44
35-39	9,124	9,388	18,512	97.19
40-44	9,640	9,613	19,253	100.28
45-49	8,874	8,350	17,224	106.28
50-54	7,065	6,638	13,703	106.43
55-59	5,614	5,253	10,867	106.87
60-64	4,172	4,007	8,179	104.12
65-69	3,077	3,098	6,175	99.32
70-74	1,927	1,931	3,858	99.79
>75	1,876	2,371	4,247	79.12
JUMLAH	122,982	119,210	242,192	103.16

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebagai kelompok rentang usia produktif lebih dominan 68.62% dari keseluruhan penduduk atau berjumlah 166.204 jiwa dibandingkan kelompok usia 0-14 tahun dan usia 65-79 tahun sebagai kelompok usia tidak produktif yang hanya berjumlah 75.988 jiwa atau 31,38% terhadap keseluruhan jumlah penduduk.

Gambar 1.6

Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlahnya semakin sedikit, jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 5-9 tahun masing-masing sebesar 22.619 orang dan 22.052 orang.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administrasi, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari dan 461 jorong sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.6
Tabel Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari dan Jorong Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Jorong
1	Sungai Rumbai	1. Sungai Rumbai	12,59	8
		2. Kurnia Koto Salak	10,48	13
		3. Sungai Rumbai Timur	9,70	6
		4. Kurnia Selatan	18,29	16
2	Koto Besar	1. Koto Besar	129,114	4



No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Jorong
		2. Koto Tinggi	24,80	4
		3. Koto Gadang	20,59	5
		4. Bonjol	273,16	4
		5. Abai Siat	60,05	13
		6. Koto Laweh	17,81	5
		7. Koto Ranah	35,07	7
3	Asam Jujuhan	1. Sungai Limau	58,77	5
		2. Alahan Nan Tigo	115,70	5
		3. Lubuk Besar	187,74	4
		4. Tanjung Alam	9,40	4
		5. Sinamar	113,80	4
4	Koto Baru	1. Koto Baru	37,43	19
		2. Sialang Gaung	97,03	28
		3. Ampang Kuranji	62,20	10
		4. Koto Padang	24,79	13
5	Koto Salak	1. Koto Salak	22,33	10
		2. Ampalu	8,13	7
		3. Padukuan	65,98	9
		4. Pulau Mainan	9,96	11
		5. Simalidu	15,05	7
6	Tiumang	1. Tiumang	56,78	8
		2. Sungai Langkok	25,67	8
		3. Koto Baringin	34,00	7
		4. Sipangkur	17,99	7
7	Padang Laweh	1. Padang Laweh	17,66	4
		2. Batu Rijal	8,95	5
		3. Muaro Sopan	15,5	4
		4. Sopan Jaya	18,51	4
8	Sitiung	1. Sitiung	32,27	13
		2. Siguntur	50,32	16
		3. Gunung Medan	30,65	8
		4. Sungai Duo	11,39	15
9	Timpeh	1. Timpeh	106,98	4

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Jorong
		2. Taratak Tinggi	40,45	12
		3. Tabek	73,00	8
		4. Panyubarangan	85,35	8
		5. Ranah Palabi	17,23	8
10	Pulau Punjung	1. Sungai Dareh	92,49	10
		2. Tebing Tinggi	65,6	7
		3. IV Koto Pulau Punjung	35,79	12
		4. Sungai Kambut	58,53	14
		5. Gunung Selasih	54,63	8
		6. Sikabau	132,79	11
11	Sembilan Koto	1. Silago	107,25	8
		2. Lubuk Karak	51,01	6
		3. Koto Nan IV Dibawah	116,15	8
		4. Banai	226,09	13
Jumlah		52	2961,13	461

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukannya

Tabel 1.7
Rincian Perangkat Daerah
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
A	Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya		Perda Nomor 6 Tahun 2016
B	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya		Perda Nomor 6 Tahun 2016
C	Inspektorat Kabupaten Dharmasraya		Perda Nomor 6 Tahun 2016
D	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya		Perda Nomor 6 Tahun 2016
	1	UPT SD Negeri 1 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	2	UPT SD Negeri 2 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	3	UPT SD Negeri 3 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	4	UPT SD Negeri 4 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	5	UPT SD Negeri 5 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	6	UPT SD Negeri 6 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	7	UPT SD Negeri 7 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	8	UPT SD Negeri 8 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	9	UPT SD Negeri 9 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	10	UPT SD Negeri 10 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	11	UPT SD Negeri 11 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	12	UPT SD Negeri 12 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	13	UPT SD Negeri 13 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	14	UPT SD Negeri 14 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	15	UPT SD Negeri 15 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	16	UPT SD Negeri 16 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	17	UPT SD Negeri 17 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	18	UPT SD Negeri 18 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	19	UPT SD Negeri 19 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	20	UPT SD Negeri 20 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	21	UPT SD Negeri 21 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	22	UPT SD Negeri 22 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	23	UPT SD Negeri 23 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	24	UPT SD Negeri 24 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	25	UPT SD Negeri 1 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	26	UPT SD Negeri 2 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	27	UPT SD Negeri 3 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017



No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
	28	UPT SD Negeri 4 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	29	UPT SD Negeri 5 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	30	UPT SD Negeri 6 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	31	UPT SD Negeri 7 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	32	UPT SD Negeri 8 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	33	UPT SD Negeri 9 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	34	UPT SD Negeri 10 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	35	UPT SD Negeri 11 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	36	UPT SD Negeri 12 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	37	UPT SD Negeri 13 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	38	UPT SD Negeri 14 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	39	UPT SD Negeri 1 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	40	UPT SD Negeri 2 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	41	UPT SD Negeri 3 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	42	UPT SD Negeri 4 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	43	UPT SD Negeri 5 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	44	UPT SD Negeri 6 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	45	UPT SD Negeri 7 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	46	UPT SD Negeri 8 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	47	UPT SD Negeri 9 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	48	UPT SD Negeri 10 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	49	UPT SD Negeri 11 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	50	UPT SD Negeri 12 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	51	UPT SD Negeri 13 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	52	UPT SD Negeri 14 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	53	UPT SD Negeri 15 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	54	UPT SD Negeri 16 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	55	UPT SD Negeri 17 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	56	UPT SD Negeri 18 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	57	UPT SD Negeri 19 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	58	UPT SD Negeri 20 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	59	UPT SD Negeri 01 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	60	UPT SD Negeri 02 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	61	UPT SD Negeri 03 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	62	UPT SD Negeri 04 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	63	UPT SD Negeri 05 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	64	UPT SD Negeri 06 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	65	UPT SD Negeri 07 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017



No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
	66	UPT SD Negeri 08 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	67	UPT SD Negeri 09 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	68	UPT SD Negeri 10 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	69	UPT SD Negeri 11 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	70	UPT SD Negeri 01 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	71	UPT SD Negeri 02 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	72	UPT SD Negeri 03 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	73	UPT SD Negeri 04 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	74	UPT SD Negeri 05 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	75	UPT SD Negeri 06 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	76	UPT SD Negeri 07 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	77	UPT SD Negeri 08 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	78	UPT SD Negeri 09 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	79	UPT SD Negeri 10 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	80	UPT SD Negeri 11 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	81	UPT SD Negeri 12 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	82	UPT SD Negeri 13 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	83	UPT SD Negeri 14 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	84	UPT SD Negeri 15 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	85	UPT SD Negeri 16 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	86	UPT SD Negeri 01 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	87	UPT SD Negeri 02 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	88	UPT SD Negeri 03 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	89	UPT SD Negeri 04 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	90	UPT SD Negeri 05 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	91	UPT SD Negeri 06 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	92	UPT SD Negeri 07 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	93	UPT SD Negeri 08 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	94	UPT SD Negeri 09 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	95	UPT SD Negeri 10 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	96	UPT SD Negeri 11 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	97	UPT SD Negeri 12 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	98	UPT SD Negeri 01 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	99	UPT SD Negeri 02 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	100	UPT SD Negeri 03 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	101	UPT SD Negeri 04 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	102	UPT SD Negeri 05 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	103	UPT SD Negeri 06 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
	104	UPT SD Negeri 07 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	105	UPT SD Negeri 08 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	106	UPT SD Negeri 09 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	107	UPT SD Negeri 10 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	108	UPT SD Negeri 11 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	109	UPT SD Negeri 12 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	110	UPT SD Negeri 01 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	111	UPT SD Negeri 02 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	112	UPT SD Negeri 03 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	113	UPT SD Negeri 04 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	114	UPT SD Negeri 05 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	115	UPT SD Negeri 01 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	116	UPT SD Negeri 02 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	117	UPT SD Negeri 03 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	118	UPT SD Negeri 04 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	119	UPT SD Negeri 05 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	120	UPT SD Negeri 06 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	121	UPT SD Negeri 07 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	122	UPT SD Negeri 08 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	123	UPT SD Negeri 09 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	124	UPT SD Negeri 10 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	125	UPT SD Negeri 01 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	126	UPT SD Negeri 02 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	127	UPT SD Negeri 03 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	128	UPT SD Negeri 04 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	129	UPT SD Negeri 05 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	130	UPT SD Negeri 06 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	131	UPT SD Negeri 07 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	132	UPT SD Negeri 08 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	133	UPT SD Negeri 09 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	134	UPT SD Negeri 10 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	135	UPT SD Negeri 11 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	136	UPT SD Negeri 12 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	137	UPT SD Negeri 13 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	138	UPT SD Negeri 14 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	139	UPT SD Negeri 15 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	140	UPT SD Negeri 01 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	141	UPT SD Negeri 02 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017



No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
	142	UPT SD Negeri 03 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	143	UPT SD Negeri 04 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	144	UPT SD Negeri 04 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	145	UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	146	UPT SMP Negeri 2 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	147	UPT SMP Negeri 3 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	148	UPT SMP Negeri 4 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	149	UPT SMP Negeri 5 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	150	UPT SMP Negeri 6 Pulau Punjung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	151	UPT SMP Negeri Unggul Dharmasraya	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	152	UPT SMP Negeri 1 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	153	UPT SMP Negeri 2 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	154	UPT SMP Negeri 3 Sembilan Koto	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	155	UPT SMP Negeri 1 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	156	UPT SMP Negeri 2 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	157	UPT SMP Negeri 3 Sitiung	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	158	UPT SMP Negeri 1 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	159	UPT SMP Negeri 2 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	160	UPT SMP Negeri 3 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	161	UPT SMP Negeri 4 Timpeh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	162	UPT SMP Negeri 1 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	163	UPT SMP Negeri 2 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	164	UPT SMP Negeri 3 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	165	UPT SMP Negeri 4 Koto Baru	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	166	UPT SMP Negeri 1 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	167	UPT SMP Negeri 2 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	168	UPT SMP Negeri 3 Koto Salak	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	169	UPT SMP Negeri 1 Tiumang	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	170	UPT SMP Negeri 1 Padang Laweh	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	171	UPT SMP Negeri 1 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	172	UPT SMP Negeri 2 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	173	UPT SMP Negeri 3 Sungai Rumbai	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	174	UPT SMP Negeri 1 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	175	UPT SMP Negeri 2 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	176	UPT SMP Negeri 3 Koto Besar	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
	177	UPT SMP Negeri 1 Asam Jujuhan	Perbup Nomor 45 Tahun 2017
E	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya		Perda Nomor 6 Tahun 2016

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
F	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup Nomor 31 Tahun 2021
G	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
H	Dinas Pemberbudayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
I	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
J	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
K	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
L	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Perbup Nomor 114 Tahun 2017
	UPTD Peralatan dan Perbekalan	Perbup Nomor 114 Tahun 2017
M	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
N	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Perbup Nomor 118 Tahun 2017
O	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perbup Nomor 115 Tahun 2017
	UPTD Pengelolaan Persampahan	Perbup Nomor 115 Tahun 2017
P	Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Balai Benih Ikan	Perbup Nomor 116 Tahun 2017
Q	Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Perbup Nomor 112 Tahun 2017
	UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan	Perbup Nomor 112 Tahun 2017
	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Perbup Nomor 112 Tahun 2017
R	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
S	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
T	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
U	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
W	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPTD Balai Latihan Kerja Sungai Dareh	Perbup Nomor 17 Tahun 2022
X	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
Y	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Perda Nomor 6 Tahun 2016
	UPT Puskesmas Sungai Limau	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Koto Baru	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Koto Besar	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Padang Laweh	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Sungai Dareh	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Sialang	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Silago	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Gunung Medan	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Sitiung I	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Sitiung II	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Timpeh	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Sungai Rumbai	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Tiumang	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPT Puskesmas Beringin Sakti	Perbup Nomor 43 Tahun 2017
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Perbup Nomor 113 Tahun 2017
	UPTD Instalasi Gudang Farmasi Kesehatan	Perbup Nomor 113 Tahun 2017
	UPT RSUD Sungai Rumbai	Perbup Nomor 100 Tahun 2019
	UPT RSUD Sungai Dareh	Perbup Nomor 22 Tahun 2023
Z	Kecamatan Pulau Punjung	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AA	Kecamatan Sembilan Koto	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AB	Kecamatan Sitiung	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AC	Kecamatan Timpeh	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AD	Kecamatan Padang Laweh	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AE	Kecamatan Tiumang	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AF	Kecamatan Koto Baru	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AG	Kecamatan Koto Salak	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AH	Kecamatan Sungai Rumbai	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AI	Kecamatan Koto Besar	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AJ	Kecamatan Asam Jujuhan	Perda Nomor 6 Tahun 2016
AK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya	Peraturan Bupati Nomor 12 Th 2010

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah.

Tabel 1.8
Rekap Pegawai Per OPD Berdasarkan Urusan Pemerintah
Keadaan Per 31 Desember 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH PEGAWAI				
		PNS		PPPK		TOTAL
		P	L	P	L	
1	Sekretariat Daerah	23	32	6	6	67
2	Sekretariat DPRD	6	11	3	0	20
3	Inspektorat	15	15	0	0	30
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10	8	3	1	22
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	18	18	4	2	42
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	6	5	1	14
7	Badan Keuangan Daerah	28	13	1	2	44
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	5	0	0	7
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	21	0	20	42
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	13	0	0	17
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7	9	4	0	20
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31	12	2		45
13	Dinas Perhubungan	7	24	0	0	31
14	Dinas Pangan dan Perikanan	7	11			18
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	9	2	0	19
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	6	3	1	24
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	17	7	3	34
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	6	0	1	22
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	12	1	0	21
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5	8	0	1	14
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	6	0	0	16
22	Dinas Lingkungan Hidup	8	12	0	1	21
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	6	7	1	25
24	Dinas Pertanian	41	38	9	23	111
25	Dinas Kesehatan	658	130	427	61	1276
26	Dinas Pendidikan	1108	365	801	179	2453
27	Kecamatan Asam Jujuhan	1	6	0	0	7



NO	NAMA OPD	JUMLAH PEGAWAI				
		PNS		PPPK		TOTAL
		P	L	P	L	
28	Kecamatan IX Koto	2	8	0	0	10
29	Kecamatan Koto Baru	8	8	0	0	16
30	Kecamatan Koto Besar	2	12	0	0	14
31	Kecamatan Koto Salak	5	3	0	0	8
32	Kecamatan Padang Laweh	2	6	0	0	8
33	Kecamatan Pulau Punjung	9	9	0	0	18
34	Kecamatan Sitiung	6	10	0	0	16
35	Kecamatan Sungai Rumbai	4	8	0	0	12
36	Kecamatan Timpeh	1	9	0	0	10
37	Kecamatan Tiumang	4	6	0	0	10
TOTAL		2098	898	1285	303	4584

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Per 31 Desember 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH PEGAWAI				
		PNS		PPPK		TOTAL
		P	L	P	L	
1	Sekretariat Daerah	23	32	6	6	67
2	Sekretariat DPRD	6	11	3	0	20
3	Inspektorat	15	15	0	0	30
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10	8	3	1	22
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	18	18	4	2	42
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	6	5	1	14
7	Badan Keuangan Daerah	28	13	1	2	44
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	5	0	0	7
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	21	0	20	42
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	13	0	0	17
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7	9	4	0	20
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31	12	2		45
13	Dinas Perhubungan	7	24	0	0	31
14	Dinas Pangan dan Perikanan	7	11			18
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8	9	2	0	19
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	6	3	1	24
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	17	7	3	34
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	6	0	1	22



NO	NAMA OPD	JUMLAH PEGAWAI				
		PNS		PPPK		TOTAL
		P	L	P	L	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	12	1	0	21
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5	8	0	1	14
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	6	0	0	16
22	Dinas Lingkungan Hidup	8	12	0	1	21
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	6	7	1	25
24	Dinas Pertanian	41	38	9	23	111
25	Dinas Kesehatan	658	130	427	61	1276
26	Dinas Pendidikan	1108	365	801	179	2453
27	Kecamatan Asam Jujuhan	1	6	0	0	7
28	Kecamatan IX Koto	2	8	0	0	10
29	Kecamatan Koto Baru	8	8	0	0	16
30	Kecamatan Koto Besar	2	12	0	0	14
31	Kecamatan Koto Salak	5	3	0	0	8
32	Kecamatan Padang Laweh	2	6	0	0	8
33	Kecamatan Pulau Punjung	9	9	0	0	18
34	Kecamatan Sitiung	6	10	0	0	16
35	Kecamatan Sungai Rumbai	4	8	0	0	12
36	Kecamatan Timpeh	1	9	0	0	10
37	Kecamatan Tiumang	4	6	0	0	10
TOTAL		2098	898	1285	303	4584

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya Per 31 Desember 2024

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN PNS																	GOLONGAN PPPK			
		I a	I b	I c	I d	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IVa	IV b	IV c	IV d	IV e	V	VII	IX	X
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	1	5	10	2	15	7	8	4	2	1	0	0	0	12	0
2	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	3	1	0	0	0	0	1	2	0
3	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	7	4	0	1	0	0	0	0	2	2
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	2	9	7	1	1	0	0	0	0	6	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0
7	Badan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	5	11	10	0	1	0	0	0	0	3	0
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0	0	2	9	2	1	0	4	2	2	0	0	0	20	0	0	0
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	8	2	1	0	0	0	0	0	4	0
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	6	3	8	7	2	14	2	1	0	0	0	0	0	2	0

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN PNS																		GOLONGAN PPPK			
		I a	I b	I c	I d	II a	II b	II c	II d	III a	III b	IIIc	III d	IVa	IV b	IV c	IV d	Iv e	V	VII	IX	X	
13	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	1	5	5	9	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	Dinas Pangan dan Perikanan	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	8	1	1	0	0	0	0	0	2	0	
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	6	3	1	0	0	0	0	2	2	0	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	8	4	2	1	0	0	0	0	10	0	
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	7	3	2	0	0	0	0	0	1	0	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	3	6	4	0	1	0	0	0	0	1	0	
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	4	1	1	0	0	0	0	1	0	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	1	3	3	1	0	0	0	0	5	3	0	
24	Dinas Pertanian	0	0	0	1	0	0	8	5	10	7	18	19	7	3	1	0	0	1 1	5	13	3	

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN PNS																		GOLONGAN PPPK			
		I a	I b	I c	I d	II a	II b	II c	II d	III a	III b	IIIc	III d	IVa	IV b	IV c	IV d	Iv e	V	VII	IX	X	
25	Dinas Kesehatan	0	2	0	1	1	2	6 2	70	11 4	13 5	12 9	17 5	62	27	8	0	0		28 2	79	12 7	
26	Dinas Pendidikan	0	1	1	0	1	2	1 0	5	79	38 7	20 3	45 0	12 7	16 7	40	0	0	0	0	98 0	0	
27	Kecamatan Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
28	Kecamatan IX Koto	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Kecamatan Koto Baru	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Kecamatan Koto Besar	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Kecamatan Koto Salak	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Kecamatan Padang Laweh	0	0	0	0	0	0	1	1		1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kecamatan Pulau Punjung	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kecamatan Sitiung	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kecamatan Sungai Rumbai	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kecamatan Timpeh	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Kecamatan Tiumang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		4584																					

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya Per 31 Desember 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN PNS									PENDIDIKAN PPPK								
		S D	SLT P	SLT A	D I	DI I	DII I	DIV / S1	S 2	S 3	S D	SLT P	SLT A	D I	DI I	DII I	DIV / S1	S 2	S 3
1	Sekretariat Daerah	0	0	6	0	0	2	24	2 3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	Sekretariat DPRD	0	0	2	0	0	1	9	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
3	Inspektorat	0	0	0	0	0	3	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0	0	1	0	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	0	0	2	0	0	5	21	8	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
7	Badan Keuangan Daerah	0	0	1	0	0	2	17	2 1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	13	0	0	0	7	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	3	3	1	0	0
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	0	1	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	10	0	0	1	28	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
13	Dinas Perhubungan	0	0	8	0	1	6	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dinas Pangan dan Perikanan	1	0	3	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0	0	4	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	3	0	0	5	9	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	1	16	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0

NO	NAMA	PENDIDIKAN PNS									PENDIDIKAN PPPK								
		S D	SLT P	SLT A	D I	DI I	DII I	DIV /S1	S 2	S 3	S D	SLT P	SLT A	D I	DI I	DII I	DIV /S1	S 2	S 3
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	1	1	1	15	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	0	2	10	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0	0	1	0	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2	0	0	2	12	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	0	0	4	8	4	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0
24	Dinas Pertanian	1	0	12	0	1	10	46	9	0	0	0	11	0	0	5	13	3	0
25	Dinas Kesehatan	1	2	34	3	0	37 7	297	7 4	0	0	0	0	0	0	28 5	197	6	0
26	Dinas Pendidikan	0	0	6	0	3	0	144 4	2 0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0
27	Kecamatan Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kecamatan IX Koto	0	0	1	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kecamatan Koto Baru	0	0	6	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kecamatan Koto Besar	0	0	3	0	2	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kecamatan Koto Salak	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kecamatan Padang Laweh	0	0	2	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kecamatan Pulau Punjung	0	0	2	0	1	3	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kecamatan Sitiung	0	0	4	0	0	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kecamatan Sungai Rumbai	0	0	4	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kecamatan Timpeh	1	0	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kecamatan Tiumang	0	0	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4584																	

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.12
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	26.432.781.411,00	25.087.546.325,58	94,91	23.692.000.465,50
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	78.258.242.617,00	65.934.612.330,00	84,25	2.449.560.848,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	5.347.929.006,00	5.347.929.006,00	100,00	4.832.210.107,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	12.199.230.000,00	12.007.270.531,21	98,43	85.022.257.585,15
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		122.238.183.034,00	108.377.358.192,79	88,66	115.996.029.005,65
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b.				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	11.920.351.000,00	14.676.153.000,00	123,12	15.830.852.055,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	18.103.314.000,00	22.402.073.000,00	123,75	19.414.761.014,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	519.999.606.000,00	512.944.707.932,00	98,64	489.147.246.531,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	170.139.551.644,00	166.360.138.484,00	97,78	183.418.901.715,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		720.162.822.644,00	716.383.072.416,00	99,48	707.811.761.315,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	V.A.1.b.2				
Dana Insentif Fiskal	V.A.1.b.2.a	20.744.862.000,00	20.745.042.000,00	100,00	8.601.217.000,00
Dana Desa	V.A.1.b.2.b	55.320.687.000,00	55.320.687.000,00	100,00	54.485.661.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya		76.065.549.000,00	76.065.729.000,00	100,00	63.086.878.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	-	-	-	-
Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00
Total Pendapatan Transfer		880.926.579.803,00	850.689.858.617,00	96,57	819.526.123.990,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	100.000.000,00	71.350.441,00	71,35	1.991.137.370,00
Pendapatan Dana Darurat	V.A.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.A.1.c.3	11.764.153.215,00	11.690.998.858,00	99,38	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		11.864.153.215,00	11.762.349.299,00	99,14	1.991.137.370,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.015.028.916.052,00	970.829.566.108,79	95,65	937.513.290.365,65
BELANJA	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	469.211.518.709,00	454.925.701.972,94	96,96	373.990.257.238,36
Belanja Barang	V.A.2.a.2	324.625.008.037,00	304.013.952.063,19	93,65	278.076.015.874,40
Bunga		-	-	-	-
Subsidi		-	-	-	-
Hibah	V.A.2.a.3	34.593.015.000,00	34.253.926.757,00	99,02	28.767.442.546,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		828.429.541.746,00	793.193.580.793,13	95,75	680.833.715.658,76
BELANJA MODAL	V.A.2.b.				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	27.871.180.864,00	24.238.374.788,00	86,97	39.031.009.865,00
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	35.814.155.477,00	28.954.072.575,16	80,85	45.091.507.154,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	45.373.640.452,00	45.054.989.838,00	99,30	50.167.680.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	3.812.797.200,00	3.810.397.200,00	99,94	2.751.538.825,00
Belanja Aset Lainnya	V.A.2.b.6	131.674.000,00	131.000.000,00	99,49	242.499.170,00
Jumlah Belanja Modal		113.003.447.993,00	102.188.834.401,16	90,43	137.284.235.323,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	3.924.380.709,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	3.924.380.709,00

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
JUMLAH BELANJA		944.432.989.739,00	897.867.935.481,29	95,07	822.042.331.690,76
Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		2.651.291.150,00	1.809.666.373,00	68,26	1.107.049.776,00
Bagi Hasil Retribusi		269.402.000,00	174.703.451,00	64,85	110.265.502,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	100,00	108.235.636.000,00
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA		116.251.465.790,00	115.315.142.464,00	99,19	109.452.951.278,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.060.684.455.529,00	1.013.183.077.945,29	95,52	931.495.282.968,76
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	(45.655.539.477,00)	(42.353.511.836,50)	(92,77)	6.018.007.396,89
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	V.A.5.a	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	100,00	41.912.532.080,16
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	100,00	41.912.532.080,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b	775.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran		775.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN NETTO		45.655.539.477,00	46.430.539.477,05	100	40.412.532.080,16

Uraian	Ref	Anggaran 2024 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI		-	4.077.027.640,55	-	46.430.539.477,05
KOREKSI SILPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	V.A.6	-	4.077.027.640,55	-	46.430.539.477,05

Tabel 1.13
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan

NO	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		JUMLAH (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
	1	Pendidikan	320.101.605.390	310.607.135.346,00	97,03
	2	Kesehatan	259.982.392.986,00	243.167.252.374,90	93,53
	3	Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.243.716.022,00	68.808.326.143,00	90,25
	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.573.992.987,00	10.573.992.987,00	100,00
	5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.038.613.214,00	10.681.057.369,00	96,76
		a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		b. Badan Penanggulangan Bencana			
	6	Sosial	4.531.204.802,00	4.450.471.600,00	98,22
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
		Tenaga Kerja	1.118.954.300,00	932.925.873,00	83,37
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.238.365.100,00	1.122.047.242,00	90,61
		Pangan	3.958.313.200,00	3.850.600.917,00	97,28
		Pertanahan	185.259.000,00	179.179.652,00	96,72
		Lingkungan Hidup	6.583.758.275,00	6.381.732.158,39	96,93
		Admnistrasi Kependudukan dan Capil	4.245.810.794,00	4.162.710.345,00	98,04
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.780.953.850,00	4.635.014.363,00	96,95
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.119.970.000,00	4.024.031.810,00	97,67
		Perhubungan		11.863.338.737,00	95,53

NO	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
	Komunikasi dan Informatika	5.841.534.474,00	5.641.490.314,00	96,58
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.843.626.010,00	3.659.800.692,00	95,22
	Penanaman Modal	4.340.694.650,00	4.265.247.603,00	98,26
	Kepemudaan dan Olah Raga	1.970.497.214,00	1.844.677.885,00	93,61
	Statistik	43.721.650,00	30.990.297,00	70,88
	Persandian	21.124.000,000	19.118.750,00	90,51
	Kebudayaan	12.651.935.874,00	12.209.519.193,00	96,50
	Perpustakaan	3.765.166.710,00	3.671.855.338,00	97,52
	Kearsipan	117.530.000,00	107.916.017,00	91,82
3	Urusan Pilihan			
	Kelautan dan Perikanan	867.824.600,00	857.388.887,00	98,80
	Pariwisata	471.652.800,00	455.988.945,00	96,68
	Pertanian	20.512.690.371,00	17.465.505.291,00	85,14
	Perdagangan	183.598.050,00	182.942.094,00	99,64
	Perindustrian	117.058.800,00	116.915.297,00	99,88
	Transmigrasi	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00	97,43
4.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Sekretariat Daerah	36.510.944.634,00	34.946.055.803,00	95,71
	Sekretariat DPRD	48.425.539.686,00	46.592.012.129,00	96,21
	Perencanaan	4.474.523.850,00	4.259.998.162,00	95,21
	Keuangan	133.926.049.190,00	131.886.723.637,00	98,48
	Kepegawaian	5.450.934.720,00	5.204.675.792,00	95,48
5.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah			
	Inspektorat Daerah	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00	94,09

NO	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
	Unsur Kewilayahan			
	Kecamatan Pulau Punjung	2.259.238.500,00	2.195.817.966,00	97,19
	Kecamatan Sitiung	1.970.561.800,00	1.920.430.459,00	97,46
	Kecamatan Sungai Rumbai	1.626.463.950,00	1.578.590.161,00	97,06
	Kecamatan Sembilan Koto	1.661.455.000,00	1.516.607.037,00	91,28
	Kecamatan Timpeh	1.325.442.750,00	1.194.469.284,00	90,12
	Kecamatan Koto Salak	1.221.976.200,00	1.171.730.313,00	95,89
	Kecamatan Asam Jujuhan	1.160.033.000,00	1.097.530.544,00	94,61
	Kecamatan Koto Besar	1.837.788.600,00	1.792.779.213,00	97,55
	Kecamatan Padang Laweh	1.187.281.800,00	1.139.101.310,00	95,94
	Kecamatan Tiumang	1.439.253.800,00	1.388.346.439,00	96,46
6	Unsur Pemerintahan Umum			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00	99,38

5

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.14
Program Berdasar Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

	KODE		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALLISASI
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	682.471.525.401,00	648.096.692.802,90
1.01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	320.101.605.390,00	310.607.135.346,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	320.101.605.390,00	310.607.135.346,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	248.051.752.036,00	239.912.442.867,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	71.566.510.004,00	70.223.322.273,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	428.756.850,00	423.017.397,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	54.586.500,00	48.352.809,00
1.02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	259.982.392.986,00	243.167.252.374,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	118.993.821.630,00	116.627.803.290,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.780.105.594,00	68.216.466.259,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.960.748.136,00	46.359.086.930,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.518.846.900,00	1.450.689.620,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	372.331.000,00	363.319.000,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	361.790.000,00	238.241.481,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	11.616.494.798,00	10.309.168.047,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.206.494.798,00	6.199.062.469,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.410.000.000,00	4.110.105.578,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Sungai Rumbai	2.559.383.840,00	2.517.555.211,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.507.941.840,00	1.478.218.148,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.051.442.000,00	1.039.337.063,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Koto Besar	1.951.941.741,00	1.657.768.512,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.180.627.741,00	989.305.926,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	771.314.000,00	668.462.586,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Sungai Limau	1.472.432.348,00	1.307.641.753,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	513.226.348,00	470.400.227,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	959.206.000,00	837.241.526,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Koto Baru	3.176.959.788,00	2.824.519.872,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	Program Penunjang Urusan	2.066.194.788,00	1.835.033.330,00

			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.110.765.000,00	989.486.542,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Tiumang	1.674.863.233,00	1.594.864.154,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	770.367.233,00	755.743.215,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	904.496.000,00	839.120.939,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Padang Laweh	1.341.185.024,00	1.296.951.925,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	640.723.024,00	623.180.982,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	700.462.000,00	673.770.943,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Sitiung I	2.920.247.922,00	2.644.888.767,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.935.222.922,00	1.807.051.023,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	985.025.000,00	837.837.744,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Timpeh	1.976.575.240,00	1.874.899.464,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.067.608.240,00	977.183.064,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	908.967.000,00	897.716.400,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Gunung Medan	1.524.472.867,00	1.466.113.399,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	Program Penunjang Urusan	802.219.867,00	783.390.344,00

			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	722.253.000,00	682.723.055,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Sitiung Ii	1.677.908.645,00	1.638.101.609,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	952.163.445,00	952.081.187,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	725.745.200,00	686.020.422,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Beringin Sakti	1.223.093.570,00	1.092.640.528,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	554.142.570,00	534.851.637,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	668.951.000,00	557.788.891,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Silago	1.748.056.545,00	1.707.248.242,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	922.254.545,00	909.752.095,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	825.802.000,00	797.496.147,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Sungai Dareh	3.081.675.232,00	2.851.136.541,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.028.633.232,00	1.832.085.582,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.053.042.000,00	1.019.050.959,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Sialang	1.588.693.904,00	1.474.761.453,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01	Program Penunjang Urusan	885.385.904,00	805.255.705,00

			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	703.308.000,00	669.505.748,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Laboratorium Kesehatan Daerah	575.964.248,00	482.475.423,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	273.572.248,00	224.226.494,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	302.392.000,00	258.248.929,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	100.878.622.411,00	89.798.714.183,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97.762.527.529,00	86.682.619.903,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00
1.03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	76.243.716.022,00	68.808.326.143,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	76.243.716.022,00	68.808.326.143,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.594.332.500,00	7.827.182.179,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	3.821.042.000,00	3.788.502.838,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	804.227.750,00	693.579.309,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	44.113.500,00	7.289.700,00

1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	628.055.354,00	307.390.628,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	8.305.980.425,00	2.747.034.399,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	53.357.011.493,00	52.875.771.630,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	70.250.000,00	44.359.421,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	618.703.000,00	517.216.039,00
1.04			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10.573.992.987,00	10.382.449.970,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10.573.992.987,00	10.382.449.970,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.461.612.750,00	2.336.463.624,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	211.204.550,00	200.197.088,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	35.265.000,00	33.923.700,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	517.774.600,00	517.719.805,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	7.348.136.087,00	7.294.145.753,00
1.05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.038.613.214,00	10.681.057.369,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.173.389.214,00	7.958.612.893,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.331.857.114,00	7.125.707.202,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	526.054.050,00	517.668.591,00

1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	315.478.050,00	315.237.100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.865.224.000,00	2.722.444.476,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.224.878.500,00	2.103.384.394,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	640.345.500,00	619.060.082,00
1.06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.531.204.802,00	4.450.471.600,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.531.204.802,00	4.450.471.600,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.879.906.450,00	3.803.267.381,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	75.984.079,00	75.931.000,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	400.403.823,00	397.283.398,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	97.362.000,00	97.042.021,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06	Program Penanganan Bencana	77.548.450,00	76.947.800,00
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	71.246.241.271,00	68.602.197.186,39
2.07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1.118.954.300,00	932.925.873,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.118.954.300,00	932.925.873,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.957.600,00	23.220.400,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.462.150,00	50.304.000,00

2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	95.433.350,00	93.579.959,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05	Program Hubungan Industrial	948.101.200,00	765.821.514,00
2.08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.238.365.100,00	1.122.047.242,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.238.365.100,00	1.122.047.242,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	534.515.650,00	528.951.291,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	124.505.000,00	92.605.251,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	34.692.700,00	34.303.650,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	55.766.000,00	53.275.900,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	488.885.750,00	412.911.150,00
2.09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3.958.313.200,00	3.850.600.917,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan Dan Perikanan	3.958.313.200,00	3.850.600.917,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.553.185.850,00	3.452.314.689,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	196.880.250,00	193.549.778,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	187.059.300,00	185.444.400,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21.187.800,00	19.292.050,00
2.10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	185.259.000,00	179.179.652,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanian	185.259.000,00	179.179.652,00

2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	68.000.000,00	67.559.552,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	117.259.000,00	111.620.100,00
2.11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6.583.758.275,00	6.381.732.158,39
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	6.583.758.275,00	6.381.732.158,39
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.037.459.100,00	3.933.047.510,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	40.115.000,00	40.047.900,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	234.990.015,00	230.168.066,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.113.377.800,00	1.035.310.784,39
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.005.000,00	14.273.200,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	64.053.000,00	63.755.100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	5.001.000,00	4.580.600,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.025.022.360,00	1.012.744.598,00

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.022.000,00	4.555.300,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.225.000,00	14.992.700,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	28.488.000,00	28.256.400,00
2.12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.245.810.794,00	4.162.710.345,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.245.810.794,00	4.162.710.345,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.965.975.244,00	3.884.841.256,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	44.613.550,00	43.633.000,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	200.000.000,00	199.045.356,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.222.000,00	35.190.733,00
2.13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.780.953.850,00	4.635.014.363,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.780.953.850,00	4.635.014.363,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.256.498.350,00	3.116.889.978,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	32.989.900,00	32.203.900,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	534.465.600,00	529.067.495,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	957.000.000,00	956.852.990,00
2.14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.119.970.000,00	4.024.031.810,00

2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.119.970.000,00	4.024.031.810,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	222.000.000,00	220.473.550,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.684.470.000,00	2.598.782.260,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.213.500.000,00	1.204.776.000,00
2.15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	12.419.026.170,00	11.863.338.737,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.419.026.170,00	11.863.338.737,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.990.877.150,00	11.436.064.637,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	428.149.020,00	427.274.100,00
2.16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	5.841.534.474,00	5.641.490.314,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.841.534.474,00	5.641.490.314,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.119.579.024,00	3.932.069.307,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.721.955.450,00	1.709.421.007,00
2.17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3.843.626.010,00	3.659.800.692,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	3.843.626.010,00	3.659.800.692,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.739.969.060,00	3.556.460.692,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	39.841.700,00	39.812.950,00

2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	63.815.250,00	63.527.050,00
2.18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.340.694.650,00	4.265.247.603,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.340.694.650,00	4.265.247.603,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.207.865.300,00	3.134.580.750,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	393.061.350,00	391.942.161,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	159.676.000,00	158.931.492,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	580.092.000,00	579.793.200,00
2.19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1.970.497.214,00	1.844.677.885,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.970.497.214,00	1.844.677.885,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	190.328.000,00	186.948.800,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.649.728.214,00	1.528.032.785,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	130.441.000,00	129.696.300,00
2.20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	43.721.650,00	30.990.297,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi Dan Informatika	43.721.650,00	30.990.297,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43.721.650,00	30.990.297,00
2.21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	21.124.000,00	19.118.750,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi Dan Informatika	21.124.000,00	19.118.750,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	21.124.000,00	19.118.750,00

			Informasi		
2.22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	12.651.935.874,00	12.209.519.193,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	12.651.935.874,00	12.209.519.193,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.198.383.550,00	3.067.941.190,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	6.458.174.774,00	6.287.821.294,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.926.408.550,00	2.797.034.509,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	68.969.000,00	56.722.200,00
2.23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.765.166.710,00	3.671.855.338,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.765.166.710,00	3.671.855.338,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.135.214.120,00	3.050.221.188,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	629.952.590,00	621.634.150,00
2.24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	117.530.000,00	107.916.017,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	117.530.000,00	107.916.017,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	117.530.000,00	107.916.017,00
3			Urusan Pemerintahan Pilihan	26.319.259.221,00	23.138.289.642,00
3.25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	867.824.600,00	857.388.887,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan Dan Perikanan	867.824.600,00	857.388.887,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	807.091.100,00	797.564.437,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.002.500,00	14.651.200,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	45.731.000,00	45.173.250,00

3.26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	471.652.800,00	455.988.945,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	471.652.800,00	455.988.945,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18.376.000,00	14.583.600,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	103.980.000,00	103.775.183,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	349.296.800,00	337.630.162,00
3.27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	20.512.690.371,00	17.465.505.291,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	20.512.690.371,00	17.465.505.291,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.733.101.050,00	12.496.023.287,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.905.218.050,00	923.959.954,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.414.842.351,00	3.586.240.350,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	66.961.300,00	66.801.050,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	13.700.000,00	13.652.000,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	378.867.620,00	378.828.650,00
3.30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	183.598.050,00	182.942.094,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	183.598.050,00	182.942.094,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	121.211.300,00	120.897.250,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang	10.174.500,00	10.102.400,00

			Penting		
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	52.212.250,00	51.942.444,00
3.31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	117.058.800,00	116.915.297,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	117.058.800,00	116.915.297,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	109.757.050,00	109.626.847,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	7.301.750,00	7.288.450,00
3.32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	84.936.484.320,00	81.538.067.932,00
4.01			Sekretariat Daerah	36.510.944.634,00	34.946.055.803,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	36.510.944.634,00	34.946.055.803,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.399.419.184,00	27.870.910.935,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.958.434.900,00	5.930.645.444,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.153.090.550,00	1.144.499.424,00
4.02			Sekretariat DPRD	48.425.539.686,00	46.592.012.129,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	48.425.539.686,00	46.592.012.129,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.637.167.386,00	19.332.307.799,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan	27.788.372.300,00	27.259.704.330,00

			Tugas Dan Fungsi Dprd		
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	144.718.356.760,00	142.174.107.016,00
5.01			Perencanaan	4.474.523.850,00	4.259.998.162,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	4.474.523.850,00	4.259.998.162,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.367.606.150,00	3.222.609.937,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	750.739.100,00	682.974.273,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	356.178.600,00	354.413.952,00
5.02			Keuangan	133.926.049.190,00	131.886.723.637,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	133.926.049.190,00	131.886.723.637,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.517.672.150,00	8.029.440.940,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	123.824.144.340,00	122.311.911.666,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	349.934.250,00	338.648.034,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.234.298.450,00	1.206.722.997,00
5.03			Kepegawaian	5.450.934.720,00	5.204.675.792,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.450.934.720,00	5.204.675.792,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.120.868.920,00	4.003.976.046,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1.330.065.800,00	1.200.699.746,00
5.04			Pendidikan Dan Pelatihan	306.646.000,00	270.703.164,00

5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	306.646.000,00	270.703.164,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	306.646.000,00	270.703.164,00
5.05			Penelitian Dan Pengembangan	560.203.000,00	552.006.261,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	560.203.000,00	552.006.261,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	560.203.000,00	552.006.261,00
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00
6.01			Inspektorat Daerah	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.824.110.706,00	5.531.473.522,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	610.950.300,00	559.565.527,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	984.499.000,00	890.227.177,00
7			Unsur Kewilayahan	17.742.285.350,00	16.980.677.618,00
7.01			Kecamatan	17.742.285.350,00	16.980.677.618,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Pulau Punjung	2.259.238.500,00	2.195.817.966,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.211.553.500,00	2.148.447.966,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.685.000,00	47.370.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sitiung	1.970.561.800,00	1.920.430.459,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.938.111.100,00	1.888.083.009,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.620.700,00	14.585.650,00

7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.830.000,00	13.761.800,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Koto Baru	2.052.789.950,00	1.985.274.892,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.027.910.050,00	1.962.514.992,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.455.000,00	2.555.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.344.900,00	13.344.900,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.455.000,00	2.555.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.625.000,00	4.305.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Sungai Rumbai	1.626.463.950,00	1.578.590.161,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.605.143.950,00	1.557.310.161,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.550.000,00	1.550.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.860.000,00	13.860.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.875.000,00	2.835.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.035.000,00	3.035.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Sembilan Koto	1.661.455.000,00	1.516.607.037,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.650.785.000,00	1.506.017.037,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	1.500.000,00	1.500.000,00

			Publik		
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.510.000,00	5.480.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.160.000,00	2.140.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.470.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Timpeh	1.325.442.750,00	1.194.469.284,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.255.453.800,00	1.125.144.504,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.029.950,00	26.727.350,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.959.000,00	42.597.430,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Koto Salak	1.221.976.200,00	1.171.730.313,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.209.046.200,00	1.158.800.313,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.850.000,00	2.850.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.680.000,00	7.680.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Asam Jujuhan	1.160.033.000,00	1.097.530.544,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.148.253.000,00	1.087.400.544,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.900.000,00	950.000,00

7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.180.000,00	9.180.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	700.000,00	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Koto Besar	1.837.788.600,00	1.792.779.213,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.815.213.600,00	1.770.204.213,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.950.000,00	1.950.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.275.000,00	9.275.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.630.000,00	3.630.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.720.000,00	7.720.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Padang Laweh	1.187.281.800,00	1.139.101.310,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.172.386.800,00	1.124.206.310,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.550.000,00	2.550.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.945.000,00	9.945.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Tiumang	1.439.253.800,00	1.388.346.439,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.414.553.800,00	1.363.646.439,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	7.010.000,00	7.010.000,00

			Publik		
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.690.000,00	11.690.000,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	6.000.000,00
8			Unsur Pemerintahan Umum	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00
8.01			Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.426.906.450,00	1.354.622.853,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.118.334.500,00	1.114.907.441,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	22.739.662.200,00	22.675.718.507,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	45.412.500,00	44.282.950,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	500.427.550,00	482.247.771,00
			Jumlah	1.060.684.455.529,00	1.013.183.077.945,29

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Dharmasraya diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a) Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup

1. Jalan

Rendahnya persentase jalan mantap diantaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan.

2. Pelayanan transportasi

Rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan .

3. Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaaan

4. Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai serta jangkauan pelayanan yang belum merata

5. Komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomunikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir

6. Lingkungan Hidup dan kebencanaan: meningkatnya ali fungsi lahan, aktivitas illegal mining dan illegal logging yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian

7. Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial

b) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

- Lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
- Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD
- Rendahnya budaya baca dan literasi

2. Kesehatan

- Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya sumber daya manusia kesehatan
- Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup
- Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabetes, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup

c) Permasalahan erekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

1. Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan
2. Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan
3. Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak
4. Pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
5. Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata

d) Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah

1. Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah
2. Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3. Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah
4. Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representative

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

a) Visi Kepala Daerah

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang

daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri
Dan Berbudaya ”**

1. Maju

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

2. Mandiri

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

3. Berbudaya

- Kondisi Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

b) Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

c. Program Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tabel 1.15
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya
dalam RKPJMD Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah penanggung		
					2021		2022		2023		2024		2025			2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					671.848.059.146		596.486.335.515		630.828.971.397		678.174.747.496		728.082.699.006		788.346.312.792	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					314.284.432.684		276.312.726.228		303.943.998.051		334.338.398.736		367.772.238.609		404.549.462.470	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	235.514.069.986	100	268.204.846.228	100	295.025.330.851	100	324.527.863.936	100	356.980.650.329	100	392.678.715.362	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	78.611.464.698	73	7.510.800.000	75,5	8.261.880.000	75,5	9.088.068.000	78	9.996.874.800	80,5	10.996.562.280	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94		106,94	18.434.130.000	107,94	20.277.543.000	107,94	22.305.297.300	108,94	24.535.827.030	109,94	26.989.409.733	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3		105,3	9.057.620.000	106,3	9.963.382.000	106,3	10.959.720.200	107,3	12.055.692.220	108,3	13.261.261.442	
		APK Non Formal/Kesetaraan	-	-	-		-	714.120.000	-	785.532.000	-	864.085.200	-	950.493.720	-	1.045.543.092	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1	dokumen	1	28.899.000	1	171.710.000	1	188.881.000	1	207.769.100	1	228.546.010	1	251.400.611	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	-	Persen	95	129.999.000	96	425.370.000	97	467.907.000	97	514.697.700	98	566.167.470	99	622.784.217	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					222.458.327.012		214.446.902.330		229.986.946.503		249.737.402.994		263.837.837.501		285.955.114.301	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	131.796.236.232	100	93.629.843.730	100	100.656.328.103	100	108.204.460.914	100	116.857.907.005	100	126.092.197.706	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.	100	persen	38,75	89.756.962.980	100	118.277.876.600	100	126.310.000.000	100	138.055.000.000	100	143.000.000.000	100	155.290.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	17	105.154.000	60	985.000.000	65	1.182.000.000	65	1.368.400.000	70	1.556.080.000	80	1.787.296.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kualitas dan kuantitas sarana farmakmin sesuai standar	100	persen	100	633.123.600	100	912.182.000	100	1.084.618.400	100	1.278.542.080	100	1.508.850.496	100	1.778.620.595	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	53,75	166.850.200	60	642.000.000	65	754.000.000	65	831.000.000	70	915.000.000	80	1.007.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					109.003.476.401		75.818.196.587		60.976.719.536		61.137.620.329		61.300.934.634		61.466.698.653	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	10.412.016.342	100	10.568.196.587	100	10.726.719.536	100	10.887.620.329	100	11.050.934.634	100	11.216.698.653	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen		7.092.867.359	62	4.000.000.000	65	4.000.000.000	65	4.000.000.000	66	4.000.000.000	67	4.000.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	8.350.317.000	65	5.000.000.000	70	5.000.000.000	70	5.000.000.000	80	5.000.000.000	95	5.000.000.000	
		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90		92		95		95		97		98		



1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	4.469.756.000	92	4.000.000.000	92	4.000.000.000	95	4.000.000.000	97	4.000.000.000	98	4.000.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,39	2.792.103.800	5,56	1.500.000.000	5,77	1.500.000.000		1.500.000.000	5,98	1.500.000.000	6,19	1.500.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	59	44.577.589.200	60	15.000.000.000	65		65		70		75	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	30.829.225.570	57	35.000.000.000	60	35.000.000.000	60	35.000.000.000	63	35.000.000.000	65	35.000.000.000
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40		43		44		47		50		53	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	0	246.784.930	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	59	232.816.200	60	500.000.000	65	500.000.000	69	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.861.733.010		13.639.109.000		14.314.109.000		14.914.109.000		15.439.109.000		15.439.109.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.553.660.210	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni		85 Persen	85,85	4.109.256.700	88,65	1.215.000.000	91,45	2.015.000.000	91,45	2.415.000.000	94,25	2.415.000.000	97,05	2.415.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	78.874.500	100	5.450.000.000	100	5.325.000.000	100	5.525.000.000	100	6.050.000.000	100	6.050.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95,96	Persen	55,74	3.119.941.600	60,66	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	70,49	3.200.000.000	75,41	3.200.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.132.118.639		6.328.713.800		10.798.500.000		6.280.000.000		6.938.000.000		7.085.000.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	9.071.298.638	100	2.320.713.800	100	7.510.500.000	100	2.607.000.000	100	3.120.000.000	100	2.787.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	91	Persen	100	110.344.200	100	378.000.000	100	423.000.000	100	433.000.000	100	448.000.000	100	458.000.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	929.657.051	3	3.630.000.000	3	2.865.000.000	1	3.240.000.000	2	3.370.000.000	4	3.840.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	-	20.818.750	80	0	90	0	90	0	100	0	100	0	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.107.971.400		9.940.687.570		10.808.697.507		11.767.216.438		12.794.579.261		13.850.928.368	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.679.814.900	100	5.211.187.570	100	5.726.697.507	100	6.314.716.438	100	6.914.579.261	100	7.573.428.368	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 Persen	100	115.993.150	100	1.350.000.000	100	1.600.000.000	100	1.750.000.000	100	1.875.000.000	100	2.075.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	5000	55.781.500	5000	979.500.000	5000	1.157.000.000	5000	1.252.500.000	5000	1.380.000.000	5000	1.502.500.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	75	Persen	78	53.414.350	80	1.500.000.000	82	1.600.000.000	82	1.700.000.000	85	1.850.000.000	88	1.900.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	202.967.500	75	900.000.000	75	725.000.000	75	750.000.000	75	775.000.000	75	800.000.000	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					56.903.972.390		83.060.257.596		85.249.647.516		91.688.717.635		91.943.972.104		94.184.223.168	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					234.315.200		3.156.000.000		3.502.000.000		3.867.000.000		4.049.000.000		4.401.000.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja formal.	41,07	persen		45.934.700	42	0	42,5	0	42,5	0	43,5	0	44	0	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	persen	75,62	120.347.500	77,84	1.700.000.000	78,92	1.902.000.000	78,92	2.104.000.000	80,25	2.136.000.000	81,43	2.338.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	persen	26,32	26.221.000	27,56	1.245.000.000	29,32	1.374.000.000	29,32	1.522.000.000	30,54	1.657.000.000	32,18	1.792.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	50	persen	65	41.812.000	70	211.000.000	76	226.000.000	85	241.000.000	90	256.000.000	95	271.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					799.678.500		854.407.000		897.127.350		941.983.718		989.082.903		1.038.537.049	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	persen	100	711.818.500	100	54.407.000	100	57.127.350	100	59.983.718	100	62.982.903	100	66.132.049	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	persem	Pratama	47.784.000	Pratama	500.000.000	Pratama	525.000.000	Pratama	551.250.000	Madya	578.812.500	Madya	607.753.125	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	58%	persen	60%		61%	50.000.000	63%	52.500.000	63%	55.125.000	64%	57.881.250	65%	60.775.313	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	bobot	-	40.076.000	Pratama	250.000.000	-	262.500.000	-	275.625.000	Pratama	289.406.250	-	303.876.563	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.529.992.840		4.956.000.000		5.095.000.000		5.165.100.000		5.320.000.000		5.448.500.000	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.939.927.190	100	4.186.000.000	100	4.235.000.000	100	4.290.100.000	100	4.380.000.000	100	4.423.500.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	254	persen	255	553.542.600	255	605.000.000	256	660.000.000	256	675.000.000	256	730.000.000	257	785.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	2	nagari	2	18.185.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	120.000.000	1	125.000.000	0	140.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	254	persen	255	18.338.050	255	65.000.000	256	75.000.000	256	80.000.000	256	85.000.000	257	100.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					602.218.000		1.950.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	100	persen	100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persen	100		100	600.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persil	100		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persil	5		6	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persen	5		6	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	8	450.000.000	9	450.000.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	20,2	persen	100	551.933.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat		persil	1,202778	50.285.000	32,93	100.000.000	1,565278	100.000.000	1,565278	100.000.000	41,75	100.000.000	1,927778	100.000.000	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.175.437.780		14.769.950.000		14.826.448.750		15.026.672.469		15.393.339.280		15.669.172.762	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.795.115.680	100	4.058.500.000	100	4.159.712.500	100	4.263.455.313	100	4.369.791.695	100	4.478.786.488	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup		2 dokumen	2	503.149.000	2	675.000.000	2	691.875.000	2	543.984.375	2	553.833.984	2	563.929.834	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan		6 ha	6	1.179.594.200	6	6.415.700.000	6	6.263.592.500	6	6.415.182.313	6	6.570.561.870	6	6.629.825.917	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		2 kawasan	22%	20.003.600	22%	725.750.000	22%	743.893.750	22%	762.491.094	22%	781.553.371	22%	801.092.205	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		29 usaha/kegiatan	10000	14.250.000	12000	30.000.000	12000	30.750.000	12000	31.518.750	13000	32.306.719	14000	33.114.387	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		1 perusahaan	1	46.400.100	3	165.000.000	3	169.125.000	1	173.353.125	1	177.686.953	1	182.129.127	
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.			0		0		3		1		1		1		
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1 kelompok MHA	1	26.806.000	3	1.500.000.000	3	1.537.500.000	1	1.575.937.500	1	1.615.335.938	1	1.655.719.336	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan		3 jenis	3	20.500.000	3	120.000.000	3	123.000.000	3	126.075.000	3	129.226.875	3	132.457.547	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani		100 persen	100	9.874.600	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya		78,31 persen	80	559.744.600	82	1.055.000.000	84	1.081.375.000	86	1.108.409.375	88	1.136.119.609	90	1.164.522.600	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.898.859.900		5.332.944.000		5.462.444.000		5.577.944.000		5.677.444.000		4.692.094.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.874.963.900	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el		persen	100	622.042.500	100	635.650.000		642.650.000	100	665.650.000		665.650.000	100	665.650.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		99,67 persen	100	248.201.000	100	600.450.000	100	662.450.000	100	715.450.000	100	775.450.000	#N/A		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		99,67 persen	100	151.852.500	100	167.400.000	100	197.400.000	100	217.400.000	100	237.400.000	#N/A		0



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2024	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.994.543.848		7.069.568.893		6.295.900.400		6.432.198.220		6.574.335.931		6.730.605.528	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.421.761.470	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama		2 nagari	2	58.921.250	2	119.837.438	2	128.700.000	2	135.135.000	2	141.891.750	2	148.986.338	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari		80 persen	85	711.992.228	90	1.729.975.956	100	841.679.325	100	883.763.291	100	927.951.456	100	974.349.029	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan		84 persen	86	801.868.900	88	1.290.311.500	90	1.365.577.075	90	1.433.855.929	92	1.505.548.725	94	1.580.826.161	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.671.989.100		977.148.000		865.600.000		906.740.000		1.168.750.000		920.600.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kelompok tribina yang aktif		100 persen	100	3.631.989.000	100	533.250.000	100	259.600.000	100	282.900.000	100	533.250.000	100	259.600.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)		81,1 persen	81,15	40.000.100	81,2	443.898.000	81,25	606.000.000	81,25	623.840.000	81,3	635.500.000	81,35	661.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.391.694.825		13.244.322.243		14.519.552.088		18.396.084.692		15.894.785.207		16.945.104.586	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	5.981.422.100	100	6.047.217.743	100	6.113.737.138	100	6.180.988.247	100	6.248.979.118	100	6.317.717.888	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang		50 persen	60	410.272.725	70	7.197.104.500	72	8.405.814.950	70	12.215.096.445	75	9.645.806.090	80	10.627.386.698	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.822.039.276		4.860.600.000		5.429.500.000		6.009.246.800		6.554.540.592		7.183.964.428	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.229.788.276	100	4.310.600.000	100	4.739.500.000	100	5.211.246.800	100	5.726.940.592	100	6.300.844.428	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat		70 persen	75	301.001.000	80	200.000.000	85	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		43 Aplikasi	43	291.250.000	10 Aplikasi	350.000.000	15 Aplikasi	490.000.000	20 Aplikasi	598.000.000	25 Aplikasi	627.600.000	30 Aplikasi	683.120.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.318.035.994		5.066.500.000		5.429.925.000		5.671.596.250		5.915.351.062		6.089.543.615	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.827.719.694	100	4.533.500.000	100	4.879.925.000	100	5.099.596.250	100	5.326.351.062	100	5.488.543.615	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas baik		21 Koperasi	16		16	8.000.000	20	10.000.000	24	12.000.000	28	14.000.000	32	16.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik		6 KSP/USP	15	52.252.300	25	60.000.000	30	65.000.000	35	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian		30 Orang	40	197.379.000	60	200.000.000	60	205.000.000	60	210.000.000	60	215.000.000	60	220.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha		3 Koperasi	3		3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas		22 usaha mikro	30	240.685.000	40	255.000.000	50	260.000.000	60	270.000.000	70	275.000.000	80	280.000.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.880.656.020		5.293.801.610		5.699.134.077		6.146.635.637		6.598.327.278		7.070.585.350	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	2.987.170.650	100	3.886.909.805	100	4.165.594.491	100	4.466.647.330	100	4.762.645.273	100	5.062.197.215	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi		4 dok	4	100.001.800	4	335.500.000	4	369.050.000	4	405.955.000	4	446.550.500	4	491.205.550	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi		4 kegiatan	4	432.400.300	4	541.640.330	4	595.804.363	4	655.384.799	4	720.923.279	4	793.015.607	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPSTP sesuai peruntukanya		100 persen	100	35.071.250	100	180.078.375	100	198.872.969	100	220.993.711	100	247.134.889	100	278.150.636	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal		80 perusahaan	100	326.012.020	130	349.673.100	160	369.812.255	190	397.654.797	220	421.073.338	250	446.016.342	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.241.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		1 tahun	1	155.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		1 tahun	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksananya Pengembangan kapasitas kepramukaan		1 tahun	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					118.058.600		450.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		100 persen	65	118.058.600	70	450.000.000	75	650.000.000	75	650.000.000	80	650.000.000	90	650.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					74.790.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital		2 Unit persen	2 Unit	74.790.000	0,4	100.000.000	0,5	100.000.000	0,5	200.000.000	0,6	250.000.000	0,8	250.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.173.089.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.674.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan		100 persen	100	1.953.367.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan		- tahun	12	486.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestari		15 unit	15	58.722.500	15	88.722.500	15	88.722.500	17	88.722.500	18	88.722.500	20	88.722.500	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.917.539.657		4.689.200.000		4.737.200.000		4.957.700.000		5.169.200.000		5.354.700.000	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.662.510.157	21	4.064.200.000	22	4.049.700.000	25	4.207.700.000	25	4.356.700.000	25	4.479.700.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan		67742 perpustakaan	63000	255.029.500	20	550.000.000	20	600.000.000	20	650.000.000	20	700.000.000	20	750.000.000	
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan		6% persen	32%		39%		45%		51%		58%		64%		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya		- dokumen	-		10	75.000.000	16	87.500.000	22	100.000.000	28	112.500.000	34	125.000.000	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				60.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	38	persen	47%	60.000.000	58%	385.000.000	68%	385.000.000	68%	385.000.000	79%	385.000.000	89%	385.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	1	persen	9		10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang dikelola dengan baik sesuai dengan aturan	1	SOP	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					29.127.366.783		89.598.078.500		48.147.029.700		50.814.850.520		53.606.599.572		56.729.057.130	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.601.187.400		1.900.000.000		2.055.000.000		2.140.000.000		2.275.000.000		2.385.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan budidaya	21.993	ton	25.309	1.555.276.700	26.579	1.690.000.000	27.913	1.825.000.000	29.314	1.890.000.000	30.780	2.015.000.000	32.325	2.095.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap	192	ton	200	24.008.700	205	55.000.000	210	65.000.000	215	70.000.000	220	75.000.000	225	85.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang berdaya saing	1	jenis	1	21.902.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1	205.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					296.151.150		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	1	destinasi	1	178.476.500	1	288.476.500	1	288.476.500	1	288.476.500	1	288.476.500	1	288.476.500	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	1	unit	1	86.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	800	kelompok	32	31.439.650	36	55.000.000	40	55.000.000	#N/A	55.000.000	45	55.000.000	52	55.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.078.188.098		25.999.062.000		28.748.968.200		31.683.865.020		34.679.751.522		38.065.226.674	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	14.758.019.030	100	16.953.896.000	100	18.799.285.600	100	20.739.214.160	100	22.640.635.576	100	24.822.199.134	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	60	persen	65	1.546.304.750	70	1.943.804.000	75	2.138.184.400	80	2.352.002.840	85	2.587.203.124	90	2.845.923.436	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terairi irigasi	70	persen	72	6.158.822.000	74	6.486.321.000	76	7.134.953.100	78	7.848.448.410	80	8.633.293.251	85	9.496.622.576	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	60	persen	65	52.242.850	70	52.242.000	75	57.466.200	80	63.212.820	85	69.534.102	90	76.487.512	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	70	persen	75	562.799.468	77	562.799.000	80	619.078.900	82	680.986.790	85	749.085.469	90	823.994.016	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					149.991.075		53.480.000.000		8.495.000.000		7.550.000.000		6.620.000.000		5.700.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	paket	35	18.597.700	15	53.100.000.000	16	8.055.000.000	13	7.060.000.000	10	6.065.000.000	7	5.070.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	-	indeks	-	31.399.210	-	155.000.000	-	180.000.000	-	205.000.000	-	230.000.000	-	255.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	25,13	unit	30	99.994.165	170	225.000.000	232	260.000.000	260	285.000.000	280	325.000.000	295	375.000.000	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					681.972.700		3.300.000.000		3.520.000.000		3.840.000.000		4.160.000.000		4.480.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	IKM	8	610.777.650	175	1.800.000.000	218	2.000.000.000	257	2.200.000.000	298	2.400.000.000	339	2.600.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	7,05	persen	40	31.534.500	50	200.000.000	60	100.000.000	70	100.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	-	persen	-	39.660.550	-	1.300.000.000	-	1.420.000.000	-	1.540.000.000	-	1.660.000.000	-	1.780.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					3.319.876.360		4.469.305.000		4.878.350.000		5.151.274.000		5.422.136.550		5.649.118.956	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.275.183.360	100	4.469.305.000	100	4.878.350.000	100	5.151.274.000	100	5.422.136.550	100	5.649.118.956	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					73.313.990.399		89.262.778.850		79.468.355.640		81.406.384.024		84.389.457.161		92.506.176.543	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					31.809.742.914		41.865.434.655		37.475.655.685		38.271.006.752		40.368.300.929		47.929.936.163	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	27.092.347.098	100	36.035.751.363	100	30.494.326.994	100	30.642.378.643	100	31.600.808.518	100	38.396.311.090	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	16	indeks	20	3.854.888.382	20	4.313.481.600	20	5.335.081.600	20	5.694.081.600	20	6.499.081.600	20	6.884.081.600	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	98	indeks	100	862.507.434	100	1.516.201.692	100	1.646.247.091	100	1.934.546.509	100	2.268.410.811	100	2.649.543.473	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					41.504.247.485		47.397.344.195		41.992.699.955		43.135.377.272		44.021.156.232		44.576.240.380	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	20.682.471.485	100	24.097.215.920	100	23.479.230.180	100	23.993.263.497	100	24.929.042.457	100	25.784.126.605	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	-	persen	90	20.821.776.000	90	23.300.128.275	90	18.513.469.775	90	19.142.113.775	90	19.092.113.775	90	18.792.113.775	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					162.625.618.062		166.976.464.217		171.177.122.826		173.227.746.055		176.170.340.728		179.273.535.221	
5.01	PERENCANAAN					6.056.351.000		5.734.833.715		5.849.530.389		5.966.520.997		6.085.851.417		6.207.568.445	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	4.161.719.250	100	4.244.953.635	100	4.329.852.708	100	4.416.449.762	100	4.504.778.757	100	4.594.874.332	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	-	persen	90	1.340.827.750	75	925.000.000	90	943.500.000	90	962.370.000	95	981.617.400	95	1.001.249.748	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	100	persen	100	553.804.000	100	564.880.080	100	576.177.682	100	587.701.235	100	599.455.260	100	611.444.365	
5.02	KEUANGAN					148.137.394.494		151.842.563.002		156.431.520.562		158.753.096.590		161.190.751.420		163.750.288.991	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	34.220.837.164	100	35.347.563.002	100	39.589.270.562	100	41.568.734.090	100	43.647.170.795	100	45.829.529.334	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	100	persen	100	112.976.630.730	100	113.540.000.000	100	113.739.500.000	100	113.926.475.000	100	114.122.798.750	#N/A	114.328.938.688	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	100	persen	100	557.165.600	100	1.060.000.000	100	1.113.000.000	100	1.168.650.000	100	1.227.082.500	#N/A	1.288.436.625	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	19,35	persen	20	382.761.000	22	1.895.000.000	25	1.989.750.000	28	2.089.237.500	24	2.193.699.375	25	2.303.384.344	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03	KEPEGAWAIAN					6.622.829.768		6.952.697.500		7.465.941.875		7.077.998.468		7.463.607.891		7.885.547.789	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	6.038.556.168	50	5.537.697.500	5	5.988.941.875	5	5.551.998.468	5	5.880.607.891	5	6.250.547.789	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keuangan		0 indeks	0	584.273.600	250	1.415.000.000	278	1.477.000.000	274	1.526.000.000	276	1.583.000.000	278	1.635.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.785.393.800		2.421.370.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN		0 persen	62	1.785.393.800	17	2.421.370.000	10	1.405.130.000	10	1.405.130.000	10	1.405.130.000	10	1.405.130.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					23.649.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi		41,25 inovasi	42	23.649.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	50	25.000.000	5	25.000.000	
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN							0		0		0		0		0	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	6.565.620.902	100	6.577.245.902	100	6.837.598.852	100	6.945.039.852	100	7.056.775.212	100	7.173.528.852	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi SistemPengendalian Intern Pemerintah		3 dokumen	-	883.755.000	2	883.755.000	3	1.016.826.000	3	1.068.197.000	3	1.122.164.000	3	1.210.373.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	dokumen	0,2	360.067.500	0,2	360.067.500	0,2	414.284.000	0,2	435.176.000	0,2	457.163.000	0,2	480.066.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.435		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01	KECAMATAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.435		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	18.236.063.422	100	18.509.604.373	100	18.787.248.435	100	19.069.057.166	100	19.355.093.023	100	19.645.419.418	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80	13.576.000	80	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yangditampung dalam RKPD	-	persen	60	75.260.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan		100 persen	100	4.940.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahannagari		52 kasus	52	15.490.000	50	88.000.000	50	88.000.000	50	88.000.000	50	88.000.000	50	88.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	1.181.885.100	100	1.664.160.000	100	1.740.576.000	100	1.824.633.600	100	1.917.096.960	100	2.018.806.656	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTERKEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial		- persen	5	24.956.700	5	365.000.000	5	401.500.000	5	441.650.000	5	485.815.000	5	534.396.500	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik		- persen	30	842.386.580	30	1.021.558.880	30	1.043.875.680	30	1.068.424.160	68	1.095.427.488	100	1.125.131.148	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		- persen	30	30.000.000	30	51.250.000	30	56.375.000	30	62.012.500	50	68.213.750	75	75.035.125	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM		- kasus	30	85.012.750	30	130.000.000	30	143.000.000	30	157.300.000	63	173.030.000	75	190.333.000	



KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	100.599.050	3	400.000.000	3	440.000.000	2	484.000.000	3	532.400.000	4	585.640.000	
	TOTAL BELANJA					966.756.780.000		976.157.480.000		1.011.674.900.000		1.037.192.310.000		1.063.709.730.000		1.094.050.590.000	



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kebijakan SPM pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pelayanan kepada masyarakat terhadap ke-enam urusan tersebut menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar.

Dalam penerapan dan pencapaian SPM diupayakan memerhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah secara optimal dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah. Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah berupa kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan sarana dan prasarana ataupun partisipasi swasta/masyarakat.

Dasar hukum penerapan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kentenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, terkait ketercapaian indikator SPM pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial telah menjadi acuan penetapan indikator kinerja maupun strategi dan arah kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD sedangkan arah kebijakan dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) sesuai dengan klasifikasi belanja daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,87	74.82	1,29
2.	Angka Kemiskinan	5.56	5.32	-4.317
3.	Angka Pengangguran	6,22	6.02	-3.215
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,35	3.86	-11,26
5.	Pendapatan Per Kapita	55,63	58,71	5,54
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,291	0,233	-19,931

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator guna mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Angka IPM memberikan gambaran universal terhadap tingkat pencapaian pembangunan manusia, semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM Kab. Dharmasraya di tahun 2024 tumbuh 1,29% dibandingkan tahun 2023, dengan capaian IPM sebesar 74,82 klasifikasi pembangunan manusia di Kab. Dharmasraya tergolong pada kategori tinggi.

Tabel 2.2
Capaian IPM Kab. Dharmasraya

No	Komponen IPM	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Umur Harapan Hidup	73,87	74.25
2	Harapan Lama Sekolah	12.68	12.89
3	Rata-rata Lama Sekolah	8.71	8.98
4	Pengeluaran perkapita	11.901	12,254

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

Kualitas kesehatan masyarakat Kab. Dharmasraya secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Umur harapan hidup naik dari 73,87 tahun 2023 menjadi 74,25 tahun 2024, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Berdasarkan empat komponen pembentuk IPM, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,10% yaitu dari 8,71 tahun 2023 meningkat ke 8,98 tahun 2024, jika dikaitkan dengan sistem pendidikan Indonesia, angka ini bermakna sama dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata penduduk Kab. Dharmasraya hanya menempuh pendidikan hingga kelas 2 atau 3 jenjang Sekolah Menengah Pertama, tetapi belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah atas. Kondisi RLS yang meingkat seiring berjalannya waktu menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sudah memahami pentingnya dunia pendidikan. Meskipun demikian, dengan angka RLS yang masih

jauh di bawah angka program wajib belajar, pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih perlu upaya ekstra dalam meningkatkan angka RLS agar bisa menyentuh angka 12 tahun. Harapan lama sekolah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang turut menunjukan perbaikan dari 12,68 (2023) menjadi 12,89 (2024) hal ini menunjukan menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia penduduk Kabupaten Dharmasraya dalam memandang pentingnya pendidikan semakin membaik dari tahun ke tahun. Dimana penduduk Kab. Dharmasraya dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) atau bahkan sebagian hingga perguruan tinggi (diploma/sarjana tahun pertama). Sedangkan Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp. 11.901 pada tahun 2023 menjadi Rp. 12,254 pada tahun 2024. Pengeluaran perkapita penduduk Kab. Dharmasraya dilihat dari komoditas makanan ditopang oleh makanan dan minuman jadi 15,05%, rokok sebesar 8,63% beras sebesar 5,76%, sayur sebesar 5,41% dan buah-buahan sebesar 4,61% sedangkan dari sisi komoditas non makanan pengeluaran perkapita dikarenakan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 21,58%, aneka barang dan jasa sebesar 11,21% dan barang tahan lama pada 5,37%.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.3
Indikator Kemiskinan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kemiskinan	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (Rp)	15,49	15,25
2	Persentase Penduduk Miskin	5,56	5,32
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,42	0,64
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,06	0,15
5	Garis Kemiskinan (Rp)	581.058	622.190

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah penduduk miskin Kab. Dharmasraya menurun dari 15,49 ribu jiwa tahun 2023 menjadi 15,25 ribu jiwa tahun 2024 atau 5,32% dari total penduduk Kab. Dharmasraya. Namun garis kemiskinan tahun 2024 meningkat 7,08% dari Rp. 581.058 perkapita perbulan tahun 2023 menjadi Rp. 622.190 perkapita perbulan tahun 2024. Terdapat empat komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2024 yaitu beras, minyak goreng, rokok, dan daging ayam ras. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bahan bakar rumah tangga dan listrik.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan dimensi penting dalam menganalisis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kab. Dharmasraya tercatat sebesar 0,64 tahun 2024 yang berarti mengalami peningkatan 0,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin juga turut meningkat dari 0,06 tahun 2023 menjadi 0,15 tahun 2024. Meningkatnya angka P2 menandakan ketimpangan antara penduduk miskin yang semakin melebar.

3. Angka Pengangguran

Indikator kinerja makro ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.4
Indikator Ketenagakerjaan Kab. Dharmasraya

No	Kegiatan Utama	Tahun	
		2023	2024
1	Angkatan Kerja	131,713	135,394
	Bekerja	123,524	127,247
	Pengangguran	8,189	8,147
2	Bukan Angkatan Kerja	46,455	36,477
	Sekolah	13,841	4,310
	Mengurus Rumah Tangga	28,347	29,246
	Lainnya	4,267	2,921
3	TPAK (%)	73.93	74.45
4	TPT (%)	6.22	6.02

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2024, Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Sebanyak 135.394 orang penduduk Kab. Dharmasraya yang berusia 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja sedangkan sisanya 36.477 orang bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja tahun 2024 meningkat dikarenakan meningkatnya 3.723 orang penduduk bekerja pada angkatan kerja. Kondisi ini berbanding terbalik dengan menurunnya sebanyak 9.978 orang penduduk bukan angkatan kerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 74,45 tahun 2024. Namun kondisi ini bermakna positif karena kenaikan persentase angkatan kerja tidak linear terhadap pengangguran tahun 2024 yang justru mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. TPT Kab. Dharmasraya tahun 2024 tercatat sebesar 6,02 persen dari total penduduk angkatan kerja, mengalami penurunan sebesar 0,20% terhadap tahun 2023.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Total perekonomian Kab. Dharmasraya pada tahun 2024 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha tercatat sebesar 14.327,63 milyar atau jika diukur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB tersebut sebesar 8.711,16 milyar rupiah, dengan besaran tersebut, ekonomi Kab. Dharmasraya berkontraksi -11,26% dari 4,35% tahun 2023 menjadi 3,86% tahun 2024.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Dharmasraya (persen),
2023-2024

Lapangan Usaha		2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.03	2.15
B	Pertambangan dan Penggalian	2.34	-3.98
C	Industri Pengolahan	1.76	1.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.25	4.59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.88	-0.03
F	Konstruksi	6.10	4.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.31	5.56
H	Transportasi dan Pergudangan	5.47	5.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.58	6.10
J	Informasi dan Komunikasi	7.88	5.63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.90	6.95
L	Real Estat	6.20	5.34
M.N	Jasa Perusahaan	6.45	4.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.71	8.53
P	Jasa Pendidikan	2.04	3.08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.80	5.34
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.92	7.10
PDRB Dharmasraya		4.35	3.86

Sumber : Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.4 diatas terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kab. Dharmasraya dipengaruhi penurunan nilai PDRB pada 9 (sembilan) sektor yakni sektor pertambangan dan penggalian turun 6,32 poin menjadi -3,98% tahun 2024, informasi dan komunikasi turun 2,25 poin ke 5,63% , jasa perusahaan turun ke -2,15% dan jasa kesehatan turun ke -1,46% dan konstruksi turun ke -1,42%, real estat turun ke -0,86%, penyediaan akomodasi dan makan minum ke -0,48%,

industri pengolahan ke -0,26 dan transportasi dan pergudangan ke -0,24%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kab. Dharmasraya masih mampu tumbuh positif ditopang oleh lapangan usaha yang tumbuh cukup baik yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang meningkat 6,82 poin dari 2,04% tahun 2023 menjadi 8,53% tahun 2024, jasa keuangan dan asuransi naik 3,05 poin, diikuti jasa pendidikan meningkat 1,04 poin menjadi 3,08%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada -0,03 %, pengadaan listrik dan gas dengan 4,59% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada 5,56% dan jasa lainnya meningkat 0,18 poin menjadi 7,10%.

5. PDRB Perkapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Kab. Dharmasraya

No	Indikator	2022	2023	2024
1	PDRB Perkapita ADHB (Juta/Rp/Tahun)	51.89	55,63	58,71
2	PDRB ADHK Perkapita (Juta/jiwa/Tahun)	34,09	34,96	35,69

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025, Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

PDRB perkapita ADHB Kab. Dharmasraya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Secara nominal PDRB Perkapita ADHB meningkat 58,71 juta sedangkan PDRB Perkapita ADHK meningkat sebesar 35,69. Peningkatan laju kinerja pendapatan perkapita dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dengan capaian peningkatan yang sangat signifikan pada tiga sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Rp. 3.935,77,- miliar, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp. 2.204,41,- miliar dan konstruksi pada Rp.2.115,79,- miliar namun terkecuali pada

pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif dari Rp.686,41,- miliar tahun 2023 menjadi Rp.799,22,- miliar tahun 2024. Dengan meningkatnya capaian PDRB perkapita tahun 2024 menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kab. Dharmasraya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

6. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Angka ketimpangan pendapatan/*gini ratio* merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, nilai 0 sampai 0,3 berarti ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 berarti ketimpangan sedang dan antara 0,5 sampai 1 yang berarti ketimpangan tinggi, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi.

Tabel 2.7
Ketimpangan Pendapatan Kab. Dharmasraya

No	Indikator Kinerja Makro	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Ketimpangan Pendapatan	0.287	0.291	0.233

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2025

Angka ketimpangan pendapatan (rasio gini) Kab. Dharmasraya selama kurun waktu tiga tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun menjadi 0,233 tahun 2024. Kondisi ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kab. Dharmasraya cukup merata dengan klasifikasi ketimpangan rendah.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Outcome

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kunci Outcome

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome		Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	102,73%	Dinas Pendidikan
		1.a.2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	110,18%	Dinas Pendidikan
		1.a.3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	104,59%	Dinas Pendidikan
		1.a.4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,09%	Dinas Kesehatan
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan
		1.b.3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,04%	Dinas Kesehatan
		1.b.4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	91,39%	Dinas Kesehatan
		1.b.5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91,97%	Dinas Kesehatan

		1.b.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	96,33%	Dinas Kesehatan
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,97%	Dinas Kesehatan
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,23%	Dinas Kesehatan
		1.b.9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,94%	Dinas Kesehatan
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,32%	Dinas Kesehatan
		1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,06%	Dinas Kesehatan
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC	100%	Dinas
			mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		Kesehatan
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	0%	Dinas PUPR
		1.c.2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0%	Dinas PUPR
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,45%	Dinas PUPR
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	89,64%	Dinas PUPR
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,5%	Dinas PUPR
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas PUPR
		1.c.7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	54,61%	Dinas PUPR

		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18,27%	Dinas PUPR
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	Dinas PUPR
4.	Perumahan Rakyat	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	Dinas Perkimtan
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Perkimtan
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	5,28%	Dinas Perkimtan
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,40%	Dinas Perkimtan
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,41%	Dinas Perkimtan
5.	Trantibum Linmas	1.e.1	Presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Dina Satpol PP & Damkar
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Dina Satpol PP & Damkar
		1.e.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
		1.e.4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12,07%	BPBD
		1.e.5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dina Satpol PP & Damkar
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,12 Menit	Dina Satpol PP & Damkar
6.	Sosial	1.f.1	persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas Sosial P3APPKB
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	Dinas Sosial P3APPKB

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
7.	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Transnaker
		2.a.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3,8%	Dinas Transnaker
		2.a.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	1,7814	Dinas Transnaker
		2.a.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	81,8%	Dinas Transnaker
		2.a.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	21,5%	Dinas Transnaker
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	4,81%	Dinas Sosial P3APPKB
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	100%	Dinas Sosial P3APPKB
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	37%	Dinas Sosial P3APPKB
9.	Pangan	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	41,57%	Dinas Pangan dan Perikanan
10.	Pertanahan	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perkimtan
		2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Dinas Perkimtan
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	Dinas Perkimtan
		2.i.4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0,0%	Dinas Perkimtan
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	Dinas Perkimtan
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0,0%	Dinas Perkimtan

11.	Lingkungan Hidup	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	65,79	Dinas Lingkungan Hidup
		2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	93,14%	Dinas Lingkungan Hidup
		2.j.3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	98,8%	Dinas Dukcapil
		2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	68,93%	Dinas Dukcapil
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	97,16%	Dinas Dukcapil
		2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	38,5%	Dinas Dukcapil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.l.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	Dinas PMD
		2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	20%	Dinas PMD
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,24	Dinas Sosial P3APPKB
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	69,5%	Dinas Sosial P3APPKB
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet Need</i>)	16,6%	Dinas Sosial P3APPKB
15.	Perhubungan	2.n.1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,7	Dinas Perhubungan
		2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,24	Dinas Perhubungan
16.	Kominfo	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Kominfo
		2.o.3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100%	Dinas Kominfo
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.p.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	35,82%	Dinas Kumperdag
		2.p.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	6,42%	Dinas Kumperdag

18.	Penanaman Modal	2.q	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	9,031%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
19.	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	19,62%	Dinas Budparpora
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	42,49%	Dinas Budparpora
		2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	5 Medali	Dinas Budparpora
20.	Statistik	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo
		2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo
21.	Persandian	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	49,9%	Dinas Kominfo
22.	Kebudayaan	2.u	Terlestarikannya cagar budaya	100%	Dinas Budparpora
23.	Perpustakaan	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	73,70%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			- Indikator frekuensi membaca		
			- Indikator Durasi Membaca		
			- Indikator Jumlah Bahan Bacaan		
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	96,39%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25.	Kelautan dan Perikanan	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	92,98%	Dinas Kelautan & Perikanan

26.	Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0,00%	Dinas Budparpora
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	-76,00%	Dinas Budparpora
		3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	20,95%	Dinas Budparpora
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,02%	Dinas Budparpora
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,97%	Dinas Budparpora
27.	Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,73387187%	Dinas Pertanian
		3.c.2	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	89,18%	Dinas Pertanian
28.	Kehutanan	3.d	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura, Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga, Pemulihan ekosistem pada Tahura, Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	100%	DLH
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin kab/kota	0%	Bagian Perekonomian dan SDA
30.	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	86,3%	Dinas Kumperdag
		3.f.2	Persentase kinerja pupuk	91,2%	Dinas Kumperdag
		3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	67,41%	Dinas Kumperdag
			(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
31.	Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	10,69%	Dinas Kumperdag
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	98,02%	Dinas Kumperdag
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Kumperdag

		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Kumperdag
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0%	Dinas Kumperdag
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Dinas Kumperdag
32.	Transmigrasi	3.h	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya , Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya, Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0%	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome		Capaian Kinerja	Sumber Data
33	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,82%	BKD
		4.a.2	Rasio PAD	11,16%	BKD
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Level 3	Inspektorat
		4.a.5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	74,91%	BKD
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	10 WTP	BKD
34	Pengadaan	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian PBJ

		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	66,18%	Bagian PBJ
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	13,34%	Bagian PBJ
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1,98%	
35	Kepegawaian	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	83,12%	BKPSDM
		4.c.2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38,86%	BKPSDM
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,16%	BKPSDM
36	Manajemen Keuangan	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-7,2%	BKD
		4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-11,6%	BKD
		4.d.3	Assets management	Ya	BKD
		4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,44%	BKD
37	Transparansi dan Partisipasi Publik	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	98,72%	Dinas Kominfo
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Dinas Kominfo

Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH)

38		1	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu	Bag. Pemerintahan Setda
		2	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD
		3	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten Kepada Bupati dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Ada	Sekretariat DPRD

PHD

39		1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2024	Tepat	Bag. Hukum Setda /BKD
40		2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun 2024	61,5%	Bag. Hukum Setda

KKPD

41		1	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administari Pemerintahan)	Ya	Bag. Hukum Setda
42		2	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	Ya	Bag. Organisasi Setda
43		3	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	100%	Bag. Organisasi Setda
44		4	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	77,4%	BKPSDM
		5	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N	100%	BKPSDM

Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD)

		1	Monitoring Center for Prevention Tahun N	79	Inspektorat
		2	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Perpres No 134 Tahun 2022	278 Program	Bappeda
		3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	95,0%	BKD
		4	Persentase Penurunan SILPA	-91,2%	BKD
		5	Pertambahan Nilai Aset Tetap		BKD
		6	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	64,9%	Inspektorat
		7	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	91,14	Bag. Organisasi Setda
		8	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada	Bag. Organisasi Setda
		9	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	36	Bappeda
		10	Kerjasama Daerah	5 KSD	Bag. Pemerintahan Setda
		11	Jumlah Kerjasama Daerah	25 KS	
		12	Jumlah Penanganan Konflik Tahun 2024	10 Penanganan konflik	Badan Kesbangpol
		13	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,98%	Bapperida

Uraian indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Lampiran Laporan ini.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Output

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Kunci Output

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	256	Dinas Pendidikan
		2.	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6515	Dinas Pendidikan
		3.	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6515	Dinas Pendidikan
		4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	575	Dinas Pendidikan
		5.	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	795	Dinas Pendidikan
		6.	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	477	Dinas Pendidikan
		7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	4	Dinas Pendidikan
		8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	180	Dinas Pendidikan
		9.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	26514	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		10.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8749	Dinas Pendidikan
		11.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	26514	Dinas Pendidikan
		12.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8749	Dinas Pendidikan
		13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	131	Dinas Pendidikan
		14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	79	Dinas Pendidikan
		15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1885	Dinas Pendidikan
		16.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	846	Dinas Pendidikan
		17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan (Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	135	Dinas Pendidikan
		18.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan (Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	73	Dinas Pendidikan
		19.	Jumlah tenaga kependidikan (Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	374	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		20.	Jumlah tenaga kependidikan (Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya) pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	144	Dinas Pendidikan
		21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	839	Dinas Pendidikan
		22.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	329	Dinas Pendidikan
		23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	147	Dinas Pendidikan
		24.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33	Dinas Pendidikan
		25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya (Pegawai administrasi, petugas kebersihan, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, petugas labor dll/tenaga non guru) pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	65	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		26.	Jumlah tenaga penunjang lainnya (Pegawai administrasi, petugas kebersihan, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, petugas labor dll/tenaga non guru) pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	31	Dinas Pendidikan
		27.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	9	Dinas Pendidikan
		28.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	463	Dinas Pendidikan
		29.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	463	Dinas Pendidikan
		30.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	124	Dinas Pendidikan
		31.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	75	Dinas Pendidikan
		32.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	72	Dinas Pendidikan
		33.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	147	Dinas Pendidikan
		34.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan	9 Orang	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		
2.	Kesehatan	35.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS	Dinas Kesehatan
		36.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	Dinas Kesehatan
		37.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	681,205	Dinas Kesehatan
		38.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (pemeriksaan kehamilan bagi kesehatan ibu hamil)	1184	Dinas Kesehatan
		39.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.342	Dinas Kesehatan
		40.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1184	Dinas Kesehatan
		41.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24.784	Dinas Kesehatan
		42.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial (pelayanan kesehatan menunjang bayi baru lahir) sesuai standar	2519	Dinas Kesehatan
		43.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan Kesehatan balita)	85.712	Dinas Kesehatan
		44.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3232	Dinas Kesehatan
		45.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (anak usia Pendidikan dasar)	131.987	Dinas Kesehatan
		46.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	4.360	Dinas Kesehatan
		47.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan)	317.322	Dinas Kesehatan
		48.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan usia 15-59 tahun mendapatkan	2452	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
		skrining Kesehatan		
		49. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan)	107.052	Dinas Kesehatan
		50. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.452	Dinas Kesehatan
		51. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan)	266.410	Dinas Kesehatan
		52. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.266	Dinas Kesehatan
		53. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan)	41.579	Dinas Kesehatan
		54. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	736	Dinas Kesehatan
		55. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ berat yang Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa)	77	Dinas Kesehatan
		56. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	225	Dinas Kesehatan
		57. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC)	22.204	Dinas Kesehatan
		58. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	2.030	Dinas Kesehatan
		59. Jumlah dukungan logistik	20.805	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kesehatan yang tersedia (orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV)		
		60.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	2.460	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	61.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	Dinas PUPR
		62.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1	Dinas PUPR
		63.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	Dinas PUPR
		64.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1	Dinas PUPR
		65.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
		66.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
		67.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
			i. Bangunan perkuatan tebing (m)	1	
			ii. Tanggul sungai (m)	1	
			iii. Kanal bajir (m)	1	
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	1	
		68.	Luas kawasan	1	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		
		69.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1	Dinas PUPR
		70.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	Dinas PUPR
		71.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1	Dinas PUPR
		72.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
		73.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
		74.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas PUPR
			i. Bangunan perkuatan tebing (m)		
			ii. Tanggul sungai (m)		
			iii. Kanal bajir (m)		
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		
			v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)		
			vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)		
			vii. Breakwater (m)		
			viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		
		75.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	100%	Dinas PUPR
		76.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	50,8%	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		77.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100%	Dinas PUPR
		78.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada	Dinas PUPR
		79.	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	ada	Dinas PUPR
		80.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 UPT	Dinas PUPR
		81.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Dinas PUPR
		82.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	-	Dinas PUPR
		83.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	474	Dinas PUPR
		84.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	895	Dinas PUPR
		85.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1.369	Dinas PUPR
		86.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	3.495	Dinas PUPR
		87.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	3.495	Dinas PUPR
		88.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.495	Dinas PUPR
		89.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	89,6%	Dinas PUPR
		90.	Kinerja penyediaan	4,9%	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			elayanan SPALD S akses aman		
		91.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	16,9%	Dinas PUPR
		92.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	5,7%	Dinas PUPR
		93.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	33,3%	Dinas PUPR
		94.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	73,5%	Dinas PUPR
		95.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	66,2%	Dinas PUPR
		96.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	7,7%	Dinas PUPR
		97.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas PUPR
		98.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	49	Dinas PUPR
		99.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR
		100.	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR
		101.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Dinas PUPR
		102.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Dinas PUPR
		103.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Dinas PUPR
		104.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		Dinas PUPR
		105.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1042,85 KM	Dinas PUPR
		106.	Panjang jalan yang dibangun		Dinas PUPR
		107.	Panjang jembatan yg	18 meter	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			dibangun		
		108.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	15,41KM	Dinas PUPR
		109.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		Dinas PUPR
		110.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Dinas PUPR
		111.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	356,1 M	Dinas PUPR
		112.	Panjang jalan yang dipelihara	600KM	Dinas PUPR
		113.	Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas PUPR
		114.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1 Pelatihan	Dinas PUPR
		115.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	38	Dinas PUPR
		116.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	38	Dinas PUPR
		117.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Dinas PUPR
		118.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ada	Dinas PUPR
		119.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	Dinas PUPR
		120.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas PUPR
		121.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai	ada	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		
		122.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR
		123.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	ada	Dinas PUPR
		124.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ada	Dinas PUPR
		125.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	ada	Dinas PUPR
		126.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ada	Dinas PUPR
		127.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ada	Dinas PUPR
		128.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau	ada	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		129.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Dinas PUPR
		130.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Dinas PUPR
		131.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	50	Dinas PUPR
		132.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	50	Dinas PUPR
		133.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	50	
		134.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	50	Dinas PUPR
		135.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	Dinas PUPR
		136.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas PUPR
		137.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	172	Dinas PUPR
		138.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan	-	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			pengawasannya		
		139.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	172	Dinas PUPR
4.	Perumahan Rakyat	140.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2563	Dinas Perkimtan
		141.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	10	Dinas Perkimtan
		142.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1	Dinas Perkimtan
		143.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	Dinas Perkimtan
		144.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1	Dinas Perkimtan
		145.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	1	Dinas Perkimtan
		146.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1	Dinas Perkimtan
		147.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1RT, 1KK, 3Jiwa	Dinas Perkimtan
		148.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1	Dinas Perkimtan
		149.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	Dinas Perkimtan
		150.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	Dinas Perkimtan
		151.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan	1	Dinas Perkimtan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		
		152.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	Dinas Perkimtan
		153.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	Dinas Perkimtan
		154.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	1	Dinas Perkimtan
		155.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	5,70Ha	Dinas Perkimtan
		156.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1	Dinas Perkimtan
		157.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,65 ha	Dinas Perkimtan
		158.	Jumlah rumah di kab/kota	59.108	Dinas Perkimtan
		159.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	72 unit	Dinas Perkimtan
		160.	Jumlah rumah tidak layak huni	4964 unit	Dinas Perkimtan
		161.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	1406	Dinas Perkimtan
		162.	Rasio rumah dan KK	1,28	Dinas Perkimtan
		163.	Jumlah rumah pembangunan baru	91 unit	Dinas Perkimtan
		164.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	50 Perumahan	Dinas Perkimtan
		165.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	52465	Dinas Perkimtan
		166.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	54315	Dinas Perkimtan
		167.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	52880	Dinas Perkimtan
		168.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	50 Perumahan	Dinas Perkimtan
		169.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	447584	Dinas Perkimtan
		170.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	40	Dinas Perkimtan
		171.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	40	Dinas Perkimtan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		172.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	40	Dinas Perkimtan
5.	Trantibum Linmas	173.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kba/kota yang ditangani	4	Dinas Satpol PP dan Damkar
		174.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1084	Dinas Satpol PP dan Damkar
		175.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	Dinas Satpol PP dan Damkar
		176.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Dinas Satpol PP dan Damkar
		177.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	Dinas Satpol PP dan Damkar
		178.	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	Dinas Satpol PP dan Damkar
		179.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
		180.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD
		181.	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
		182.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD
		183.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pen)5cegahan dan mitigasi bencana)	12%	BPBD
		184.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	10%	BPBD
		185.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		186.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	BPBD
		187.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD
		188.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD
		189.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD
		190.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD
		191.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	155	Dinas Satpol PP dan Damkar
		192.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada	Dinas Satpol PP dan Damkar
		193.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Satpol PP dan Damkar
		194.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Dinas Satpol PP dan Damkar
		195.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	72 Unit	Dinas Satpol PP dan Damkar
		196.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan	35	Dinas Satpol PP dan Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		
		197.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	74 Orang	Dinas Satpol PP dan Damkar
		198.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	48	Dinas Satpol PP dan Damkar
6.	Sosial	199.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 layanan	Dinas SosialP3APPKB
		200.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	14 orang	Dinas SosialP3APPKB
		201.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 tim	Dinas SosialP3APPKB
		202.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	25 orang	Dinas SosialP3APPKB
		203.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 unit	Dinas SosialP3APPKB
		204.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		205.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	5 Unit	Dinas SosialP3APPKB
		206.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		207.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	3 Orang	Dinas SosialP3APPKB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		208.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	37 Buah	Dinas SosialP3APPKB
		209.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	37 Paket	Dinas SosialP3APPKB
		210.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		211.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	12 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		212.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	9 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		213.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		214.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	6 Kali Bimbingan	Dinas SosialP3APPKB
		215.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		216.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		217.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	25 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		218.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	19 Orang	Dinas SosialP3APPKB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		
		219.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	8 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		220.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	500 Paket	Dinas SosialP3APPKB
		221.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 Paket	Dinas SosialP3APPKB
		222.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	12 Tempat	Dinas SosialP3APPKB
		223.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	8 Paket	Dinas SosialP3APPKB
		224.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	Dinas SosialP3APPKB
		225.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	29 Orang	Dinas SosialP3APPKB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
7.	Tenaga Keja	226.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada/sesuai	Dinas Transnaker
		227.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99%	Dinas Transnaker
		228.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Dinas Transnaker
		229.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Transnaker
		230.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	Dinas Transnaker
		231.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2%	Dinas Transnaker
		232.	Persentase LPK yang terakreditasi	50%	Dinas Transnaker
		233.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Transnaker
		234.	Jumlah penganggur yang dilatih	288 orang	Dinas Transnaker
		235.	Persentase lulusan	100%	Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			bersertifikat pelatihan	Transnaker
		236. Persentase penyerapan lulusan	51,4%	Dinas Transnaker
		237. Lulusan bersertifikat kompetensi	54,5%	Dinas Transnaker
		238. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0,0%	Dinas Transnaker
		239. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ;	0%	Dinas Transnaker
		240. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Transnaker
		241. Data tingkat produktivitas total	-1,85%	Dinas Transnaker
		242. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	100%	Dinas Transnaker
		243. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	67%	Dinas Transnaker
		244. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	15	Dinas Transnaker
		245. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Transnaker
		246. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas Transnaker
		247. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	27%	Dinas Transnaker
		248. Jumlah mogok kerja	300 orang	Dinas Transnaker
		249. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Transnaker
		250. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Transnaker
		251. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Transnaker
		252. Jumlah perselisihan PHK	9 perselisihan	Dinas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
					Transnaker
		253.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	283 orang	Dinas Transnaker
		254.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	283 perselisihan	Dinas Transnaker
		255.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Dinas Transnaker
		256.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%	Dinas Transnaker
		257.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	32 lowongan	Dinas Transnaker
		258.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	121	Dinas Transnaker
		259.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	9 BKK	Dinas Transnaker
		260.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	1	Dinas Transnaker
		261.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	8 Orang	Dinas Transnaker
		262.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas Transnaker
		263.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	18 Perjanjian	Dinas Transnaker
		264.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1425	Dinas Transnaker
		265.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0%	Dinas Transnaker
		266.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	100	Dinas Transnaker
		267.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang	0%	Dinas Transnaker

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			mendapatkan fasilitas kepulauan		
		268.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100%	Dinas Transnaker
		269.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%	Dinas Transnaker
		270.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0%	Dinas Transnaker
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	271.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	44 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		272.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	48 Program, 49 Kegiatan	Dinas SosoalP3APPKB
		273.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Media massa	Dinas SosoalP3APPKB
		274.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		275.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas SosoalP3APPKB
		276.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		277.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		278.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	17 Organisasi	Dinas SosoalP3APPKB
		279.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota	85 Kader	Dinas SosoalP3APPKB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			yang sudah dilatih		
		280.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	17 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		281.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 Lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		282.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 Kebijakan	Dinas SosoalP3APPKB
		283.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 lembaga	Dinas SosoalP3APPKB
		284.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas SosoalP3APPKB
9.	Pangan	285.	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		286.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		287.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		288.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		289.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		290.	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		291.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
		292.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan
10.	Pertanahan	293.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		Dinas Perkimtan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output			Sumber Data
		294.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	0%	Dinas Perkimta
		295.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0%	Dinas Perkimta
		296.	Dokumen Izin membuka tanah		Dinas Perkimta
		297.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Perkimta
11.	Lingkungan Hidup	298.	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH) d. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	65,79	Dinas Lingkungan Hidup
		299.	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 2. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		Dinas Lingkungan Hidup
		300.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		301.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin	3%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		
		302.	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		303.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	50%	Dinas Lingkungan Hidup
		304.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		305.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	306.	Penerbitan akta perkawinan	100%	Disdukcapil
		307.	Penerbitan akta perceraian	100%	Disdukcapil
		308.	Penerbitan akta kematian	100%	Disdukcapil
		309.	Penyajian data kependudukan	100%	Disdukcapil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	310.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1	Dinas PMD
		311.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1	Dinas PMD
		312.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa tertinggal yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1	Dinas PMD
		313.	Jumlah peningkatan desa tertinggal yang lembaga	1	Dinas PMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		
		314.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	10 Desa	Dinas PMD
		315.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	10 Desa	Dinas PMD
		316.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	112 Lembaga	Dinas PMD
		317.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	112 Lembaga	Dinas PMD
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	318.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perda-kan	Ada	Dinas SosialP3APPKB
		319.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	7832	Dinas SosialP3APPKB
		320.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	48,77864213	Dinas SosialP3APPKB
		321.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	Dinas SosialP3APPKB
		322.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi	55 stakeholders	Dinas SosialP3APPKB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		
		323.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas SosialP3APPKB
		324.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	70%	Dinas SosialP3APPKB
		325.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	52 Kelompok kerja	Dinas SosialP3APPKB
		326.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	105%	Dinas SosialP3APPKB
		327.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinas SosialP3APPKB
		328.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	1 desa	Dinas SosialP3APPKB
15.	Urusan Perhubungan	329.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	50%	Dinas Perhubungan
		330.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	68%	Dinas Perhubungan
		331.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0%	Dinas Perhubungan
		332.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100%	Dinas Perhubungan
		333.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	334.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo
		335.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		336.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	27	Dinas Kominfo
		337.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Dinas Kominfo
		338.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas Kominfo
		339.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	53%	Dinas Kominfo
		340.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Kominfo
		341.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	7%	Dinas Kominfo
		342.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo
		343.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung	100%	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			layanan pemerintah		
		344.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	34%	Dinas Kominfo
		345.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	34%	Dinas Kominfo
		346.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	39%	Dinas Kominfo
		347.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	92%	Dinas Kominfo
		348.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	53%	Dinas Kominfo
		349.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo
		350.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Kominfo
		351.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas Kominfo
		352.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas Kominfo
		353.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Kominfo
17.	Koperasi Usaha Kecil Menengah	354.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	0,0%	Dinas Kumperdag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
		355.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,0%	Dinas Kumperdag
		356.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80,2%	Dinas Kumperdag
		357.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85,2%	Dinas Kumperdag
		358.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74,4%	Dinas Kumperdag
		359.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,9%	Dinas Kumperdag
		360.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70,9%	Dinas Kumperdag
		361.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Dinas Kumperdag
		362.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	67%	Dinas Kumperdag
		363.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	56%	Dinas Kumperdag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
		364.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	62%	Dinas Kumperdag
		365.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	80%	Dinas Kumperdag
		366.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74%	Dinas Kumperdag
		367.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1%	Dinas Kumperdag
		368.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2%	Dinas Kumperdag
		369.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2%	Dinas Kumperdag
		370.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	32%	Dinas Kumperdag
		371.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1%	Dinas Kumperdag
		372.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3%	Dinas Kumperdag
		373.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	4%	Dinas Kumperdag
18.	Penanaman Modal	374.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan	6 Fasilitas/insentif	Dinas PMPTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			daerah kabupaten/kota		
		375.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada	Dinas PMPTSP
		376.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	9 evaluasi	Dinas PMPTSP
		377.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 kegiatan	Dinas PMPTSP
		378.	Kegiatan pameran penanaman modal	7 kegiatan	Dinas PMPTSP
		379.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	7 kegiatan	Dinas PMPTSP
		380.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	17066	Dinas PMPTSP
		381.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	17066	Dinas PMPTSP
		382.	Laporan realisasi penanaman modal	371.870.044.004	Dinas PMPTSP
		383.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	16 orang	Dinas PMPTSP
		384.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	183 perusahaan	Dinas PMPTSP
		385.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	17066	Dinas PMPTSP
19.	Pemuda dan Olaraga	386.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	406	Disbudparpora
		387.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	406	Disbudparpora
		388.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	25511	Disbudparpora
		389.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	25511	Disbudparpora
		390.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi	43	Disbudparpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			di satuan-satuan pendidikan		
		391.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	Disbudparpora
20.	Statistik	392.	Tersedianya buku profil daerah	ada	Dinas Kominfo
		393.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	6	Dinas Kominfo
		394.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	7	Dinas Kominfo
		395.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	6	Dinas Kominfo
		396.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	7	Dinas Kominfo
		397.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	90%	Dinas Kominfo
		398.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	90%	Dinas Kominfo
21.	Persandian	399.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Dinas Kominfo
		400.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	Dinas Kominfo
		401.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	93%	Dinas Kominfo
		402.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas Kominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
22.	Kebudayaan	403.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	106	Disbudparpora
		404.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	106	Disbudparpora
		405.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	106	Disbudparpora
		406.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	19 orang	Disbudparpora
		407.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	106	Disbudparpora
		408.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	106	Disbudparpora
		409.	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Disbudparpora
		410.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	106	Disbudparpora
		411.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	106	Disbudparpora
		412.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Disbudparpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		413.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	100%	Disbudparpora
		414.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Disbudparpora
		415.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5 orang	Disbudparpora
		416.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	6 orang	Disbudparpora
		417.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	6 orang	Disbudparpora
		418.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	8 orang	Disbudparpora
		419.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	6 orang	Disbudparpora
		420.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	Disbudparpora
		421.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1	Disbudparpora
23.	Perpustakaan	422.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,868975854	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		423.	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	62,45%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		424.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0018886933	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		425.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,9%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		426.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	162	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		427.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		428.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		429.	Jumlah koleksi budaya	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
			etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Perpustakaan dan Arsip
24.	Kearsipan	430.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		431.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		432.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		433.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	85,5%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		434.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		435.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		436.	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	8 OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		437.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	535	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		438.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		439.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
URUSAN PILIHAN					
25.	Kelautan dan Perikanan	440.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1	Dinas Pangan dan Perikanan
		441.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	0%	Dinas Pangan dan Perikanan
		442.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1	Dinas Pangan dan Perikanan
		443.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	892 Orang	Dinas Pangan dan Perikanan
		444.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	872.600 ekor	Dinas Pangan dan Perikanan
26.	Pariwisata	445.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	36	Disbudparpora
		446.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	9	Disbudparpora
		447.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	368 TDUP	Disbudparpora
		448.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Disbudparpora
		449.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 Event	Disbudparpora
		450.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	1	Disbudparpora
		451.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	10 Industri	Disbudparpora
		452.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	7%	Disbudparpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output		Capaian Kinerja	Sumber Data
		453.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	54,27%	Disbudparpora
		454.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4 Lokasi	Disbudparpora
27.	Pertanian	455.	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan		Dinas Pertanian
			- Alsintan	863	
			- Tempat Alsintan	1	
			- Jln usaha tani	70	
			- Cetak Sawah	12	
			- Irigasi (M/Ha)	130	
			- Drainase	1	
			- Pompa tenaga surya	5	
			- Pompa sentrifugal	4	
			- Embung pertanian	60	
			- Dam parit	27	
			- Jln produksi	73	
			- Irigasi perpompaan	3	
			- Irigasi perpipaan	10	
		456.	Prasarana pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian
			- Tempat Alsintan	1	
			- Jln usaha tani	70	
			- Cetak Sawah	12	
			- Irigasi (M/Ha)	130	
			- Drainase	1	
			- Pompa tenaga surya	5	
			- Pompa sentrifugal	4	
			- Embung pertanian	60	
			- Dam parit	27	
			- Jln produksi	73	
			Irigasi perpompaan	3	
			Irigasi perpipaan	10	
		457.	Penerbitan izin usaha pertanian	7 izin	Dinas Pertanian
		458.	Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian
		459.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	Dinas Pertanian
		460.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	0%	Dinas Pertanian

28.	Kehutanan	461.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dinas Lingkungan Hidup
		462.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	1	Dinas Lingkungan Hidup
		463.	Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	Dinas Lingkungan Hidup
		464.	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	1	Dinas Lingkungan Hidup
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	465.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	100%	Bagian Perekonomian
30.	Perdagangan	466.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	100%	Dinas Kumperdag
			b. Toko swalayan	100%	
		467.	Persentase penerbitan TDG (Tanda Daftar Gudang)	24%	Dinas Kumperdag
		468.	Persentase Gedung yang tidak mempunyai TDG	84%	Dinas Kumperdag
		469.	Persentase penertiban STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%	Dinas Kumperdag
		470.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	100%	Dinas Kumperdag
		471.	Persentase penertiban SKA yang tepat waktu	100%	Dinas Kumperdag
		472.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan wilayah kerja	0%	Dinas Kumperdag
		473.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	18,20%	Dinas Kumperdag
		474.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	41,04%	Dinas Kumperdag

		475.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	67,38%	Dinas Kumperdag
			dalam tahun berjalan		
		476.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100,0%	Dinas Kumperdag
31.	Perindustrian	477.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Kumperdag
		478.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Dinas Kumperdag
		479.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Kumperdag
		480.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Kumperdag
		481.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	13,93%	Dinas Kumperdag
32.	Transmigrasi	482.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100%	Dinas Transnaker
		483.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	100%	Dinas Transnaker
		484.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	Dinas Transnaker

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengukur pencapaian visi dan misi tersebut maka telah ditetapkan setiap tahunnya sasaran dan indikator kinerja Bupati kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang tertuang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber dana lainnya.

2.3.1. Perencanaan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Penetapan kinerja bupati merupakan bagian penting dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan visi, misi, serta program kerja pemerintahan daerah. Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya tahun 2024 disusun berdasarkan :

- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
- 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara

Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- 4 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- 5 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja dan target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		SKPD Penanggung Jawab
				AWAL	Perubahan	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	63	63	DPUPR
		2	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	80	89.07	DPUPR
		3	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97	97	DPUPR
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4	% lingkungan permukiman kumuh	50.67	68	PERKIMTAN
		5	Rasio pemukiman layak huni	94.25	94.25	PERKIMTAN
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	71.3	76.36	DPUPR
		7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	29.12	0	DPUPR
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	72.05	72.24	DINKES/BPS
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9	Angka rata-rata lama sekolah	8.49	8.71	DISDIK/BPS
		10	Harapan lama sekolah	12.45	12.68	DISDIK/BPS
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender	89.34	89.34	DINSOS/BPS
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12	PDRB Per Kapita	45.76	55.95	BAPPERIDA/ BPS
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	3.6	8.05	BAPPERIDA/ BPS

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		SKPD Penanggung Jawab
				AWAL	Perubahan	
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.29	5.3	NAKERTRANS/BPS
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.97	5.4	BAPPERIDA/BPS
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.45	3.92	INSPEKTORAT
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	BKD
		18	Hasil evaluasi AKIP	70	70	SETDA
		19	Nilai LPPD	3.75	3.75	SETDA
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	0	-
		21	Indeks SPBE	2.45	2.83	KOMINFO
		22	Indeks Profesionalisme ASN	71	71.7	BKPSDM
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.21	3.21	SETDA
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84.35	BAPPERIDA
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8437	0.8464	DPMD
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7198	0.7436	DPMD
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.607	0.6667	DPMD
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	15	10	PUPR
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	66	DLH
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	120	130	BPBD
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31	Persentase peningkatan zakat	2	6	SETDA/BAZNAS
		32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90	90.47	SETDA
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	10	3	BUDPARPORA

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya. 2024

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan daerah,

beberapa indikator kinerja utama mengalami penyesuaian target. Perubahan ini dilakukan karena capaian tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga targetnya dinaikkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam mencapai sasaran strategis.

Dari seluruh indikator kinerja, terdapat 19 indikator yang mengalami perubahan target dari target RPJMD, 17 target mengalami peningkatan dan 2 target mengalami penurunan target yang dikarenakan perubahan strategi serta terkait ketersediaan sumberdaya. Perubahan ini mencerminkan kinerja positif dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta efektivitas pembangunan di berbagai sektor.

Selama tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.015.028.916.052,00,-.

2.3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian atas target indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Tujuan I : Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata and Berkualitas

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	63%	54.60	86.67
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber	89.07%	89.64	100.64

			air minum layak dan berkelanjutan			
		3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97%	92.45	95.31
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	68%	69.76	102.59
		5	Rasio pemukiman layak huni	94.25%	86.29	91.55
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76.36%	69.57	91.11
		7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	29.12%	-	0.00

Tujuan II: Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	72.24 Tahun	74.25 Tahun	102.78
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9	Angka rata-rata lama sekolah	8.71 Tahun	8.98 Tahun	103.10
		10	Harapan lama sekolah	12.68 Tahun	12.89 Tahun	101.66
6	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender	89.34	89.58	100.27

Tujuan III : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12	PDRB Per Kapita	55.95 Juta Rupiah	58.71 Juta Rupiah	104.93
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	8.05 %	8.83	109.70
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.3%	6.02	86.42
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	5.4%	5.32	101.48

Tujuan IV : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.92	3.83	97.70
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100.00
		18	Hasil evaluasi AKIP	70	67.24	96.06
		19	Nilai LPPD	3.75	3.5036	93.43
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	0	-	0.00

		21	Indeks SPBE	2.83	3.61	127.56
		22	Indeks Profesionalisme ASN	71.7	82.77	115.44
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.21	3.21	100.00
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.35%	84.65	100.36
Tujuan V : Meningkatnya Kemampuan Nagari dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Nagari						
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8464	0.8651	102.21
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7436	0.7798	104.87
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.6667	0.7154	107.30
Tujuan VI : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Lingkungan (<i>Green Development</i>)						
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	10 %	10.87	108.69
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	65.79	99.68
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30	Indeks Resiko Bencana Daerah	130	130.03	99.98
Tujuan VII : Meningkatkan Pembangunan Mental dan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Nilai Nilai Agama, Adat, dan Budaya						
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31	Persentase peningkatan zakat	6	19,39	323,09
		32	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	90.47	90.48	100.01
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	3 Nagari	2	66.67

Sumber : Data Perangkat Daerah di olah Oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,2024

2.3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI 1. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 1.1 Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Untuk Pencapaian misi 1 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tetapkan 1 tujuan yaitu “Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkualitas” Tujuan misi 1 memiliki sasaran yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja Utama, Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR

1. *RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN*

RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

$$= \frac{\text{Jumlah Jalan dalam keadaan mantap (Kecepatan kendaraan } \pm 40 \text{ km per jam)}}{\text{Seluruh Jumlah Jalan di Dharmasraya}} * 100\%$$

$$\text{RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN} = \frac{574.8}{1.052.6} * 100\% = 54.16 \%$$

2. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah tabel Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
51.25 %	63	54.6	86.67%	Sangat Berhasil	68 %	80.3%

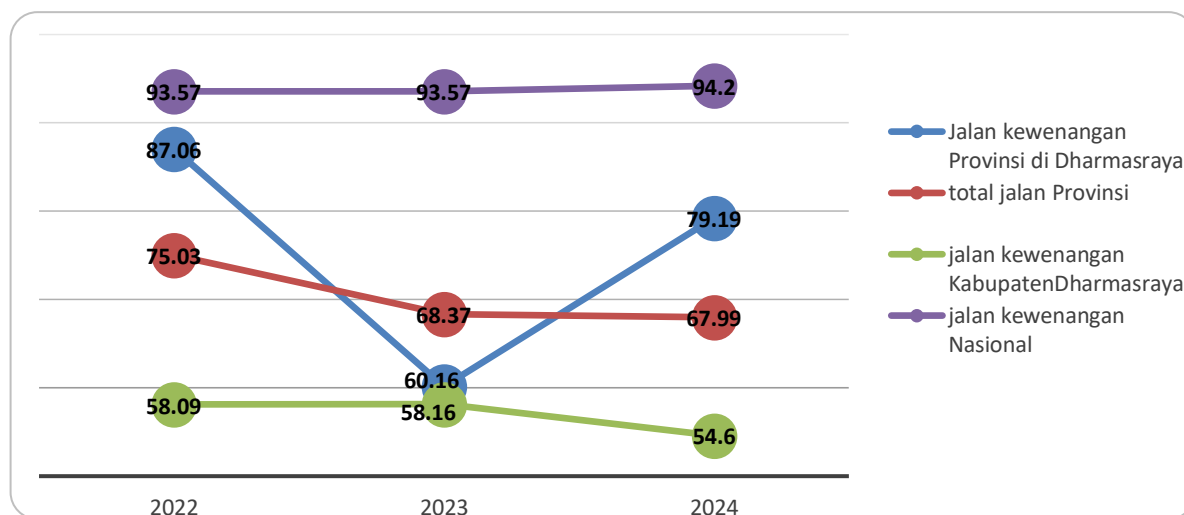
Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Tabel 2.14
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

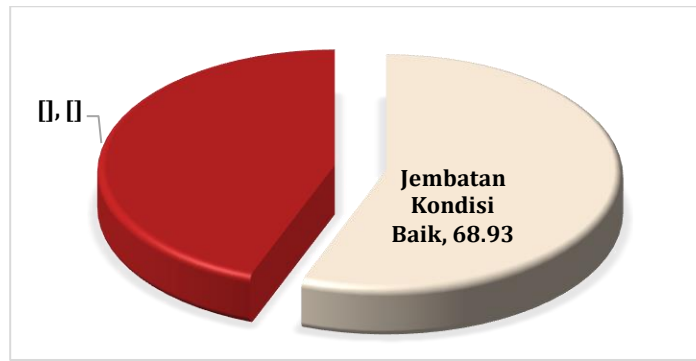
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	53%	50.19%	94.70%	→	Sangat Berhasil
2022	57%	58.09%	101.90%	↑	Memuaskan
2023	60%	58.16%	96.93%	↓	Sangat Berhasil
2024	63	54.6	86.67%	↓	Sangat Berhasil

Sumber data : Dinas PUPR Dharmasraya.2024

Tabel 2.15
Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat dan Kementerian PUPR. 2024



Tabel 2.16
Volume Capacity Ratio Jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024

Kecamatan	PANJANG JALAN (KM)	LEBAR LAJUR EFEKTIF (M)	Lebar Jalur (M)	Lebar Bahu (M)	KAPASITAS JALAN (C) Smp/Jam	VOLUME (V) Smp/Jam	V/C Ratio (Smp/Jam)
Pulau Punjung	123.987	104	208	11.5	2493.7	592.7	0.24
IX KOTO	121.8	74	148	9	2473.3	607.3	0.25
SITIUNG	84.39	100	200	4	2641.3	581.2	0.22
TIMPEH	113.1	59.5	119	3	2553.1	537.3	0.21
KOTO BARU	101.913	101	202	3	2451.3	600.4	0.25
PADANG LAWEH	46.42	46	92	5.5	2438.7	659.1	0.27
TIUMANG	80	72	144	4.5	2617.3	610.2	0.24
KOTO SALAK	62.5	51.5	103	6	2382.5	553.3	0.23
SEI RUMBAI	68.7	61	122	2.5	2430.3	645.7	0.27
KOTO BESAR	153.85	77	154	5.5	2532.8	564.3	0.23
ASAM JUJUHAN	96	41	82	0	2650.1	561.9	0.21
RATA - RATA	1052.7	71.5	143.1	5.0	2514.9	592.1	0.24

Sumber : Dinas Perhubungan Dharmasraya, 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai keberhasilan kinerja indikator sasaran rasio kemantapan jalan didukung oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dengan indikator kinerja perangkat daerah yaitu Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Beberapa penyebab keberhasilan dakam pencapaian ini antara lain melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. SDM Teknis yang memadai
2. Sarana Prasarana yang memadai
3. Ketersediaan anggaran yang mendukung

beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten adalah:

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan
2. Mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih terjadi. sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan

Solusi atau faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya pemeliharaan jalan dengan mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim URC harus dibentuk. Untuk memperbaiki. rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*). penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).

Indikator kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten ini di capai dengan melaksanakan program penyelenggaraan jalan. dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran yang di alokasikan sebesar Rp. 40.368.464.175.00 untuk Pembangunan jalan. Dari dana yang dianggarkan tersebut ditargetkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga batas layan kondisi jalan tersebut masih dapat diterima dan nilai konstruksi jalan berada diatas batas bawah kemantapan konstruksi jalan. Realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menggunakan jasa pihak ketiga (kontrak). pada akhir tahun anggaran realisasi fisik pekerjaan ini mencapai 100%

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten antara lain:

1. Pembangunan Jalan Spesifikasi : Aspal Hotmix :Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin. pemeliharaan berkala. peningkatan/rekonstruksi) Koto Besar - Lubuk Karya (R. 171) 3.34 Km
2. Pembangunan Jalan Spesifikasi : Aspal Hotmix :Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin. pemeliharaan berkala. peningkatan/rekonstruksi) [-] Simpang Kelapa - Simpang 3 Blok A Sitiung IV (R. 172) 3.67 Km.
3. Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Sitiung. Kec.Timpeh & Kec.Koto Baru
4. Aspal Hotmix Jalan Lingkar Nagari Siguntur Kec.Sitiung 0.27 Km
5. Aspal Hotmix Jorong Piruko Selatan Menuju Jorong Piruko Timur nagari Sitiung
6. Kecamatan Sitiung 0.27 Km

7. Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Seberang Piruko Kec.Koto Baru 0.34 Km
 8. Peningkatan jalan aur jaya ampang kuraji 0.34 Km
 9. Peningkatan Jalan Lingkar Sitiung 0.34 Km
 10. Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Besar & Kec.Asam Jujuhan)
 11. Aspal Hotmix Jalan Lingkar Bonjol 0.34 Km
 12. Aspal Hotmix Jalan Tanjung Alam Sungai Limau 0.34 Km
 13. Pembangunan Jalan Sitiung IV Koto Ranah Kec. Koto Besar 0.27 Km
 14. Pengaspalan jalan lingkar abai siat nagari abai siat 0.5 Km
 15. Rehabilitasi Jalan Padang Bungur Kec. Koto Besar 0.4 Km
 16. Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sungai Rumbai)
 17. Aspal Hotmix Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai 0.27 Km
 18. DAM Jalan SDIT Sungai Rumbai 0.17 KM
 19. Jalan Lingkar Sungai Rumbai Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai 0.34 Km
 20. Pengerasan dan Pengaspalan jalan dibawah Tower Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai 0.27 Km
 21. Peningkatan Jalan Sungai Rumbai Timur 0.34 Km
4. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN $= \frac{\text{jumlah rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100$ $= \frac{52.462 \text{ Rumah Tangga}}{58.526 \text{ Rumah Tangga}} * 100\% = 89.64 \%$
--

5. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
59%	89.07%	89.64%	100.64	Memuaskan	100 %	89.64%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

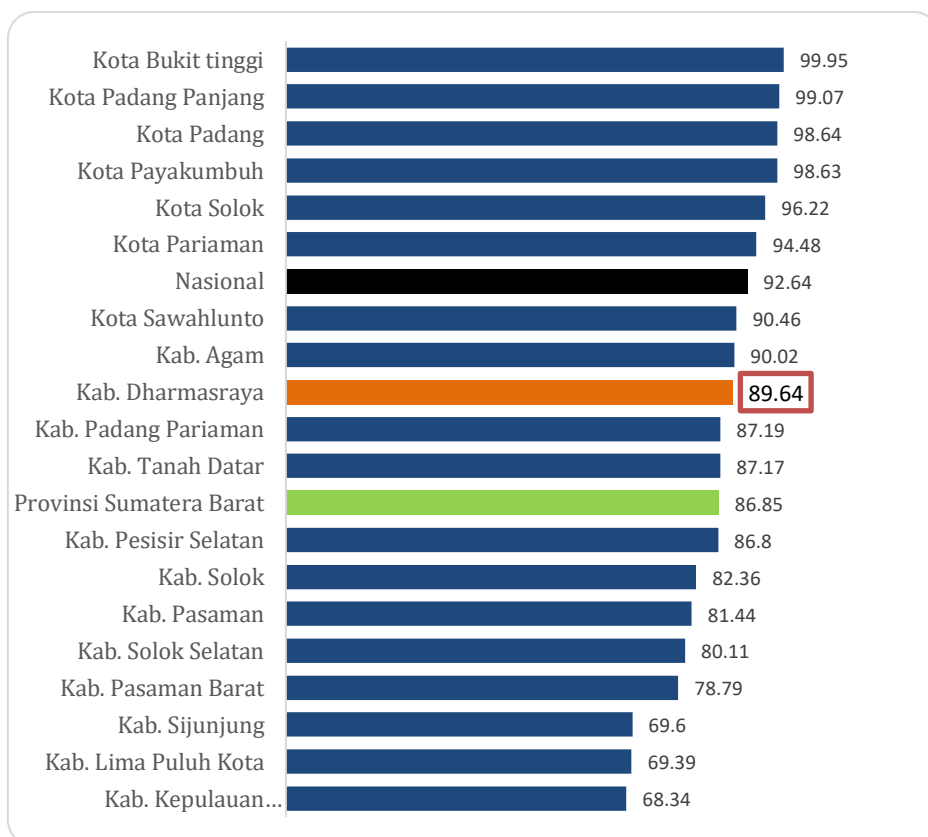
Tabel 2.18
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			Tren	Predikat
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	61.00%	60.82%	99.70%	→	Sangat Berhasil
2022	65%	88%	135.90%	↑	Memuaskan
2023	89.00%	89.07%	100.08%	↓	Memuaskan
2024	89.07%	89.64%	100.64%	↑	Memuaskan

Sumber Data : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Perbandingan kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara Kabupaten Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat. dan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 0.1 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2024

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan didukung oleh sasaran kinerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang yaitu Sasaran Meningkatnya layanan penyediaan air minum dengan indikator Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara lain:

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan. Pemberdayaan. Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagai coordinator

2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Air Minum.
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Air Minum berbasis masyarakat

Beberapa Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koodinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

7. *PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN ❏ $= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang m miliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100\%$ $= \frac{54110}{58.526} * 100\% = 92.45\%$
--

8. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2023

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
87.25 %	97%	92.45%	95.31%	Sangat Berhasil	100 %	92.45%

Sumber Data: Dinas PUPR. 2024

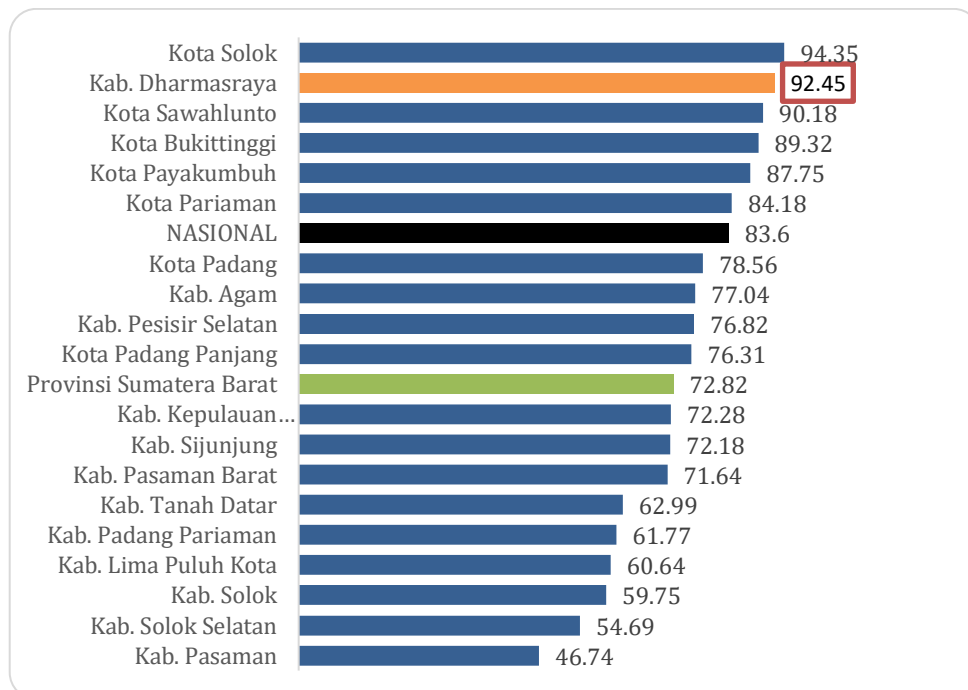
Berikut adalah perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.20
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	87.25%	80.00%	91.70%	→	Sangat Berhasil
2022	92%	91.73%	99.70%	↑	Sangat Berhasil
2023	95%	92.50%	97.36%	↓	Sangat Berhasil
2024	97%	92.45%	95.31%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya 2024

Grafik 0.2 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, 2024

9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan didukung oleh sasaran kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Sasaran Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah dengan menyediakan ketersediaan anggaran yang mendukung pencapaian jumlah rumah tangga yang terlayani limbah domestik

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN

10. PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

= Luas Kawasan kumuh yang terlayani (luas Kawasan kumuh tahun 2021-luas Kawasan kumuh tahun 2024)/Luas Kawasan Kumuh Yang Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati Berdasarkan Kriteria Teknis Tertentu *100

$$= \frac{(337.36-102.02 \text{ Ha})}{337.36 \text{ ha}} * 100\%$$

$$= 69.76\%$$

11. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Dalam rentang waktu dua tahun. dari tahun 2021 hingga tahun 2024. terjadi penurunan yang signifikan dalam luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Luas kawasan kumuh telah berkurang sebesar 235.34 hektar. menunjukkan upaya yang sukses dalam program penurunan kawasan kumuh.

Dengan penurunan sebesar 235.34 hektar dari total luas kawasan kumuh pada tahun 2021 yang mencapai 337.36 hektar. persentase kawasan kumuh yang berhasil diperbaiki mencapai 69.76%. Hal ini mencerminkan kesuksesan program-program rehabilitasi kawasan kumuh yang telah diterapkan.

Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
22.7 %	68	69.76	102.59%	Memuaskan	68.66 %	101.6%

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Tabel 2.22
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	36.14%	22.70%	63.05%	→	Cukup Berhasil
2023	43.03%	68%	157.99%	↑	Memuaskan
2024	68	69.76	102.59%	↓	Memuaskan

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Tabel 2.23
Data Kawasan Lingkungan Kumuh Tahun 2024

No	Kecamatan	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (2024)		Luas Yang Ditangani (Ha) (2024)	Sisa Permukiman Kumuh
		Nama	Luas (Ha)		
1	Sembilan Koto	silago	1.68		1.68
2	Pulau Punjung	Tarandam Sungai Kambut	3.59	0.65	2.94
		Lambau	3.7		3.7
3	Sitiung	Siguntur 2	8.31	0.15	8.16
		Koto / Sungai Duo	7.32	0.35	6.97
4	Timpeh	Marga Makmur	2.13	0.65	1.48
		Sungai Bulian	8.82	0.55	8.27
5	Koto Baru	Lubuk Agam	3.37		3.37
		Koto Gadang	5.24	0.15	5.09
		Cangkir batu	3.63		3.63
		Teluk Alai	9.53		9.53
7	Tiumang	Sungai Langkok	3.4	0.5	2.9
		Sipangkur	5.81		5.81
8	Padang laweh	Sopan Jaya	2.04		2.04
9	Sungai Rumbai	Balai Tengah	6.25	0.3	5.95
10	Koto Besar	Tuo	4	0.25	3.75
		Ranah	3.13		3.13
		Padang Bungur	7.29	2.4	4.89
11	Asam Jujuhan	Bukit Sembilan /Lubuk Baru	9.75		9.75
		Sungai Limau	8.99		8.99
TOTAL			107.98	5.7	102.28

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

12. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dari kondisi awal (2020) RPJMD hingga realisasi tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya perbaikan atau pengembangan lingkungan permukiman kumuh selama periode tersebut.

1. PENYEBAB KEBERHASILAN

- a. Implementasi Program yang Efektif, terdapat implementasi program yang efektif dalam meningkatkan kondisi lingkungan permukiman kumuh. Program-program ini mungkin mencakup upaya rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, atau penyediaan layanan dasar yang memadai.
- b. Komitmen Bupati dengan adanya alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
- c. Partisipasi Masyarakat yang aktif dari masyarakat setempat dalam program-program yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanggulangan sampah.

2. ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penguatan Program yang Berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat program-program yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Ini termasuk alokasi sumber daya yang cukup, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pemeliharaan lingkungan.
- c. Kolaborasi dengan instansi Pemerintah maupun swasta untuk penanggulangan Kawasan lingkungan kumuh

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh, serta memastikan keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, Dinas Perkimtan

telah menetapkan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani. Program yang dijalankan adalah Program Kawasan Permukiman dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Analisis mendalam terhadap program dan kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

Pertama. efektivitas pelaksanaan kegiatan peremajaan/pemugaran permukiman kumuh memainkan peran penting dalam mencapai target indikator. Kegiatan ini melibatkan pembenahan fisik lingkungan permukiman. seperti infrastruktur. akses jalan. dan fasilitas publik lainnya. yang secara langsung mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal. Kedua. keterbatasan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan. seperti proses pengadaan yang lambat. kurangnya koordinasi antar instansi terkait. atau perubahan kebijakan yang tidak terduga. dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program.

Ketiga. perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. termasuk identifikasi dan penanganan sumber daya yang tidak efisien atau terbuang. untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian. diperlukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dengan lebih baik di masa mendatang.

13. RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

$$= \frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Pemukiman}} * 100\%$$

$$= \frac{2128.69 \text{ Ha}}{2467 \text{ Ha}} * 100\% = 86.29 \%$$

14. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Luas Kawasan pemukiman di Kabupaten Dharmasraya sekitar 2.467 hektar dan 84.24% dari total luas wilayah pemukiman di Kabupaten Dharmasraya telah dianggap layak huni. Ini menunjukkan tingkat kelayakan yang cukup tinggi dalam wilayah pemukiman. namun juga menyoroti potensi untuk meningkatkan kondisi hunian di sisa wilayah tersebut. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan proporsi pemukiman yang layak huni di masa mendatang. Capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
83.88%	94.25%	86.29%	91.55%	Sangat Berhasil	100%	86.29

Sumber Data: Dinas Perkimtan. 2024

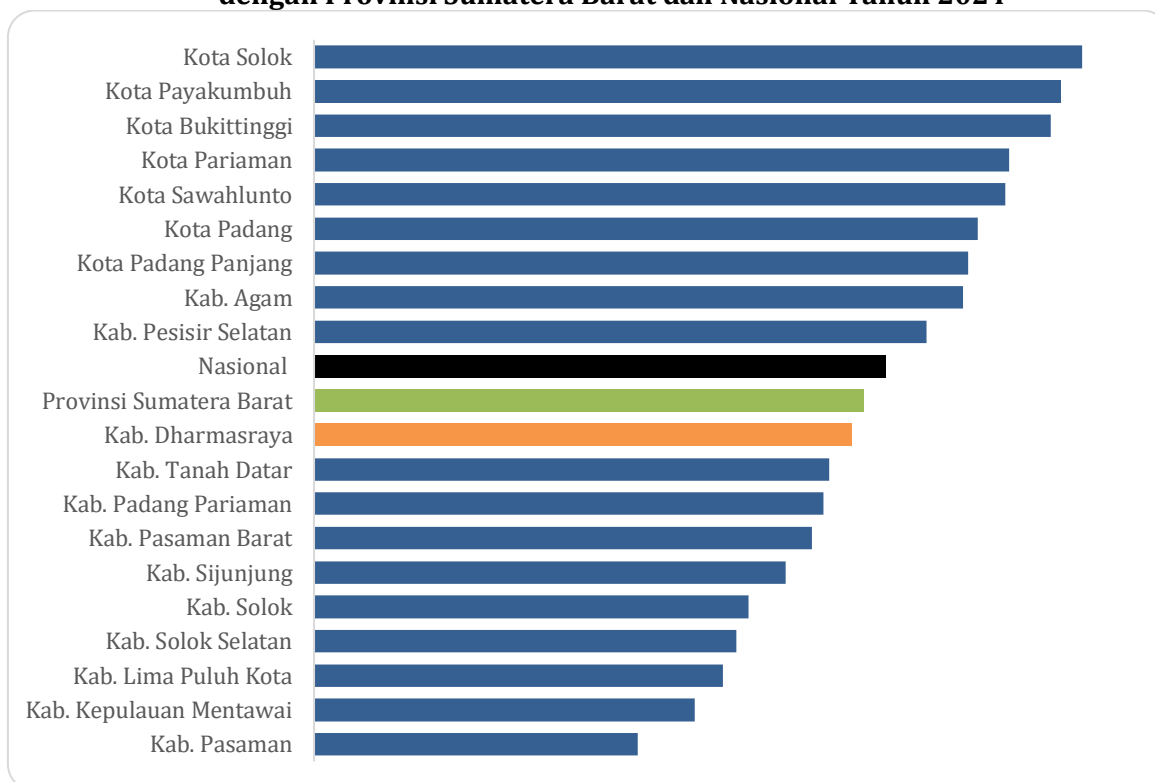
Tabel 2.25

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Permukiman Layak Huni			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	85.85	83.99	97.83%	→	Sangat Berhasil
2022	88.65	84.15	94.93%	↓	Sangat Berhasil
2023	91.45	84.31	92.19%	↓	Sangat Berhasil
2024	94.25	86.29	91.55%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2024

Tabel 2.26
Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2023

15. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan mencapai indikator

Adanya kerjasama dengan developer untuk penyediaan rumah yang layak huni di daerah.

2. Penyebab kegagalan pencapaian indikator

- Karena tidak dapat mengetahui kepastian jumlah rumah swadaya yang terbangun di nagari-nagari setiap tahunnya.
- Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai

3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik.
- Aspirasi dewan yang ada pada Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang lokasinya berada di kawasan kumuh. maka akan dimasukkan pada DPA untuk peningkatan dan pembangunan rumah layak huni.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

16. PERSENTASE LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN KONDISI BAIK

Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

$$= \frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} * 100\%$$

$$= \frac{1.612 \text{ km}}{2.317 \text{ km}} * 100\% = 69,57\%$$

17. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Luas daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 1683.95 km. dari total luas seluruh daerah irigasi dalam kewenangan Kabupaten Dharmasraya. yang mencapai 2205 km. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi luas daerah irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total daerah irigasi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah sekitar 76.34%. Capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.36 %	76.36%	69.57%	91.11%	Sangat Berhasil	73.5 %	91.11%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Tabel 2.28
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	67.36%	70.40%	104%	→	Memuaskan
2022	71%	73.85%	104%	→	Memuaskan
2023	76.37%	76.37%	100.00%	↓	Sangat Berhasil
2024	76.36%	69.57%	91.11%	↓	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Tabel 2.29
Perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

Kewenangan	Luas Daerah Irigasi Berdasarkan Permen 14/2015	Berfungsi dengan Pemetaan IGT	%
Kabupaten Dharmasraya	2.317 Ha	1.612 Ha	69.57
Provinsi Sumatera Barat	65.007 Ha	32.787 Ha	50.43
Nasional	7.1juta Ha	3.8juta Ha	53.52

Sumber Data: data.sumbarprov.go.id, Dinas PUPR Dharmasraya dan Kementerian PUPR, 2024

18. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan

- a. Konsistensi dalam Perawatan dan Pemeliharaan: Terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2024. terdapat konsistensi dalam upaya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Realisasi capaian kinerja selalu melebihi atau setidaknya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perawatan infrastruktur irigasi dilakukan secara konsisten dan efektif selama periode tersebut.
- b. Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat: Peningkatan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh pengalokasian sumber daya yang tepat. baik dari segi anggaran. tenaga kerja. maupun peralatan. Adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif memungkinkan pelaksanaan program perawatan infrastruktur irigasi berjalan dengan baik.

Dengan demikian. keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas yang saling mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :
 - a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan.
 - b. Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan

3. Solusi atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi. rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan. dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarap nya sudah siap.
 - b. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk terwujudnya persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam Kondisi baik di dukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian. dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2026 mempunyai kriteria penilaian yang tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang mencapai 100 %. Setelah dicermati lebih mendalam ternyata penentuan target capaian indikator yang memang terlampau kecil. yaitu hanya 2 persen dari kondisi tahun sebelumnya.

19. *INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR*

Tidak ada penilaian dan data terkait pengendalian daya rusak air. sehingga tidak dapat diukur untuk keter capaian indikator kinerja ini

MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

20. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup = Rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x
= 74.25 Tahun

21. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
71.33	72.24	74.25	102.78%	Memuaskan	72.42	102.53%

Sumber : BPS. diolah oleh Dinas Kesehatan Dharmasraya. 2024

Berdasarkan data indikator kinerja usia harapan hidup, terjadi peningkatan signifikan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 71,33 menjadi 74,25 pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 ini tidak hanya melampaui target tahun 2024 sebesar 72,24 (102,78%) tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 72,42 (102,53%).

Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan usia harapan hidup yang lebih cepat dari proyeksi awal. Untuk mendapatkan gambaran tren perkembangan ini, penting untuk melihat capaian kinerja usia harapan hidup dalam empat dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.31
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2024 dengan
Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

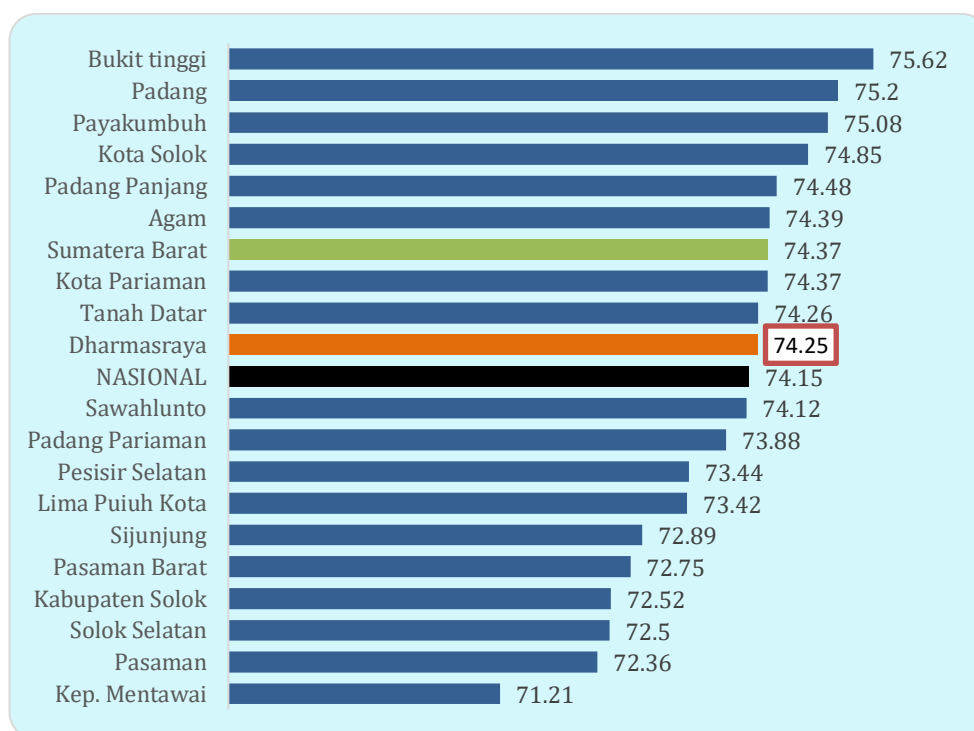
Tahun	Angka Harapan Hidup			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	71.51	71.53	102.74%	↔	Memuaskan
2022	71.69	71.9	100.30%	↓	Memuaskan
2023	71.87	72.24	100.50%	↑	Memuaskan
2024	72.24	74.25	102.78%	↑	Memuaskan

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh Dinas Kesehatan. 2024

Pada tahun 2024, capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 74.25 dari target 72.24, menghasilkan capaian kinerja sebesar 102.78%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perbaikan yang substansial dalam kinerja daerah. Tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan serta komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan predikat *Memuaskan*, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan performanya dari tahun ke tahun.

Untuk melihat bagaimana capaian ini dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat serta tingkat nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 0.3 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024

22. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja usia harapan hidup. didukung oleh capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dengan 2 (dua) sasaran kinerja dan 9 indikator kinerja. dengan mencapai sasaran kinerja yang ada Dinas Kesehatan. usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya ikut meningkat. Berikut capaian kinerja yang mendukung pencapaian usia harapan hidup tahun 2023

Tabel 2.32

Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	183	187	97,8
		Angka Kematian Bayi (AKB)	16	13	118,7
		Prevalensi Malnutrisi	9%	5,5%	138,8
		Presentase Rumah Tangga PHBS	55%	55,20%	100,4

		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75%	75%	100
		Presentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	100%	100%	100
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100%	100%	100
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	99,46%	99,46
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Visite Rate	5	5,32	101
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	100%	100%	100
		Presentase UPT RSUD Terakreditasi	100%	100%	100
3	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 78.612	BB 78,98	BB 100,46
		Nilai Indeks Kepuasan	B 81,5	96,68	118,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2024

Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Dukungan pemerintah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir secara jelas tergambar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan No 1. 2 dan 3 dimana Seluruh Ibu Hamil. ibu melahirkan. ibu nifas dan bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. selain itu. dukungan berupa anggaran dari Dana Alokasi Khusus non Fisik seperti Jaminan Persalinan atau yang lebih sering disebut Jampersal diberikan dalam mendukung peningkatan keselamatan ibu melahirkan sehingga mengurangi Angka Kematian Ibu dan bayi karena keterlambatan merujuk.
2. Komitmen kepala daerah dengan seluruh camat dan OPD terkait yang menyatakan tidak ada lagi BABS di Kabupaten Dharmasraya.
3. Adanya alokasi anggaran dana alokasi khusus bidang kesehatan DAK Non Fisik yang membantu pembiayaan kegiatan program baik di dinas kesehatan maupun puskesmas untuk akreditasi dan re akreditasi puskesmas. termasuk pembiayaan

kepesertaan JKN bagi Masyarakat ekonomi menengah ke bawah. selain itu alokasi anggaran yang cukup memastikan pemenuhan sarana dan prasarana bidang Kesehatan dapat perlahan dipenuhi

4. Terdeteksi secara dini kasus – kasus potensial KLB di lapangan. karena adanya laporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) mingguan puskesmas berbasis aplikasi
5. Sudah adanya 3 Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) Kabupaten Dharmasraya untuk penjangkauan dan pengobatan kasus HIV
6. Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan. dimana dijelaskan semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus segera melakukan persiapan dan survey akreditasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan paling lambat tanggal 31 desember tahun 2023 semua FKTP sudah terakreditasi.
7. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya 94.2% pengelolaan keuangan dengan BLUD. tinggal 1 puskesmas yang masih berproses untuk BLUD. dan 15 UPT sudah bekerjasama dengan BPJS.
8. Adanya program nusantara sehat. sehingga dapat memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas. khususnya di puskesmas kawasan pedesaan dan kawasan terpencil

Dalam analisis kinerja indikator usia harapan hidup. kami menemukan beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target yang ditetapkan antara lain:

1. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan. Masih ada persalinan yang ditolong non Kesehatan. serta belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin. selain itu Masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi dan Masih ditemui remaja anemia. ibu hamil KEK dan Bayi dengan BBLR
2. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan ke daerah sulit/terpencil.
3. Kurangnya SDM Kesehatan. kurangnya pelatihan dan diklat kepada SDM Kesehatan yang mendukung kegiatan program. serta kurangnya memadai nya

sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan kepada ibu maternal dan bayi belum maksimal.

4. Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait. tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan
5. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat serta partisipasi Masyarakat dalam rangka mengentaskan penyakit tidak menular dan penyakit menular yang ada di lingkungan sekitar Masyarakat
6. Sedangkan untuk mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dapat dianalisa beberapa masalah antara lain kurangnya komitmen puskesmas dalam melaksanakan implementasi kegiatan program dan pelayanan pasca akreditasi. sarana. prasarana dan alkes di Puskesmas yang belum memenuhi standar serta tenaga Kesehatan di puskesmas belum memenuhi sembilan ketenagaan yang wajib ada di puskesmas sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas
7. Minimnya alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan termasuk pengadaan prasarana dan alat Kesehatan. karena saat ini. Sebagian besar anggaran perbaikan sarana. prasarana dan pengadaan alat puskesmas serta perbaikan kualitas mutu pelayanan Kesehatan dibebankan kepada anggaran DAK. BOK. serta APBN.

Dalam rangka menangani permasalahan ini. diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama lintas sektor. peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer. program pendidikan kesehatan yang terfokus. serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan mengidentifikasi akar masalah ini. diyakini bahwa tindakan yang tepat dan terkoordinasi dapat diambil untuk meningkatkan kinerja indikator usia harapan hidup dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam mencapai kinerja ini, Penggunaan sumber daya dibutuhkan untuk mencapai kinerja usia harapan hidup. beberapa Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah adanya kelompok- kelompok posbindu di sekolah dan di perkantoran
2. Adanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/JPTS-BUP/2022 tertanggal 1 November 2022. Dimana masing –masing OPD terkait mengambil peran penting dalam rangka penanggulangan ODGJ berat. sehingga kendala dalam merujuk

pasien ODGJ berat karena factor ekonomi dan tidak adanya kartu JKN sudah mulai dapat teratasi.

3. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya. dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/65/KPTS-BUP/2022. tanggal 19 Januari 2022
4. Evaluasi Infrastruktur Kesehatan dengan melakukan analisis jumlah. lokasi. dan kapasitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas. rumah sakit. dan posyandu. Hal ini digunakan untuk menganalisa ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya kesehatan.
5. Penilaian Alokasi Sumber Daya yaitu meninjau alokasi sumber daya kesehatan. termasuk anggaran. tenaga medis. dan peralatan medis. untuk menilai efisiensi penggunaannya. hal ini dilaksanakan untuk memeriksa apakah sumber daya tersebut dialokasikan secara proporsional untuk mendukung upaya pencegahan. deteksi dini. dan pengobatan penyakit.
6. Ketersediaan Layanan Kesehatan Primer. ini untuk menganalisis ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan primer. seperti pemeriksaan kesehatan rutin. imunisasi. dan konseling kesehatan. Kami mengevaluasi efisiensi operasional puskesmas dan posyandu dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
7. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Kami meneliti sejauh mana teknologi dan inovasi digunakan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis serta pengobatan penyakit. Kami juga mengevaluasi integrasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
8. Kerjasama dan Koordinasi Antar instansi: Kami memeriksa tingkat kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. termasuk dinas kesehatan. pemerintah daerah. organisasi non-pemerintah. dan sektor swasta. Kami mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup.
9. Rekomendasi untuk Peningkatan Efisiensi: Berdasarkan hasil analisis kami. kami menyusun rekomendasi konkret untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan di Kabupaten Dharmasraya. Rekomendasi ini mencakup perbaikan infrastruktur kesehatan. optimalisasi alokasi anggaran. peningkatan

kapasitas SDM kesehatan. penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. serta promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

23. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH = JUMLAH TAHUN YANG DIGUNAKAN OLEH PENDUDUK DALAM MENJALANI PENDIDIKAN FORMAL (data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik = 8.98

24. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
8.47	8.71	8.98	103.10%	Memuaskan	8.50	105.65%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

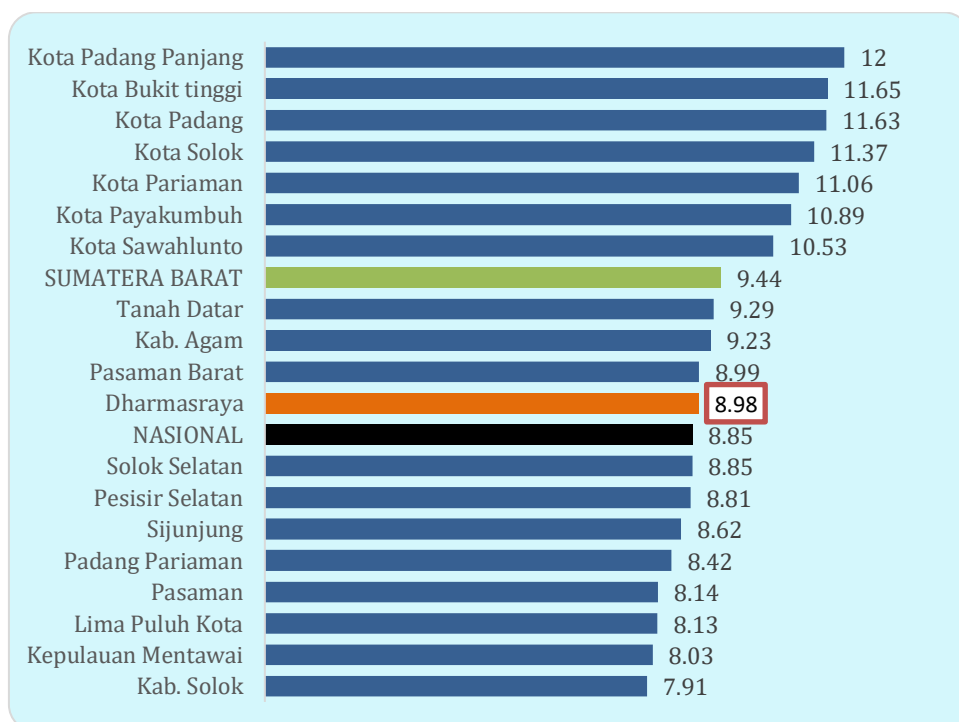
Tabel 2.34

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	8.48	8.55	100.83	→	Memuaskan
2022	8.48	8.56	100.94	↑	Memuaskan
2023	8.56	8.71	101.75	↑	Memuaskan
2024	8.71%	8.98%	103.10%	↓	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Grafik 0.4 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Badan Pusat Statistik, .2024

25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 antara lain:

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA
Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	APK PAUD	75.50%
	APK SD/MI	107.94%
	APK SMP/MTs	106.30%
	APM SD/MI	99.55%
	APM SMP/MTs	96.13%

Sumber :Dinas Pendidikan . 2024

Hasil pengukuran atas target dan realisasi indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan sudah melebihi target RPJMD tahun 2026 Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Di tahun 2024. sudah tidak ada lagi Penduduk yang tamat SD lebih dari 6 tahun. tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun. Selain itu. hal yang mendukung pemenuhan angka rata-rata lama sekolah seperti terpenuhinya ruang kelas baru. terbangunnya sekolah baru dengan jarak tempuh dekat dengan warga serta kecilnya angka putus sekolah di tahun 2024.

26. HARAPAN LAMA SEKOLAH

HARAPAN LAMA SEKOLAH
= LAMANYA SEKOLAH (DALAM TAHUN) YANG DIHARAPKAN AKAN DIRASAKAN OLEH ANAK PADA UMUR TERTENTU DIMASA MENDATANG
= 12.89 Tahun

27. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian(%)			
12.43	12.68	12.89	101.66	Memuaskan	12.46	103.45%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

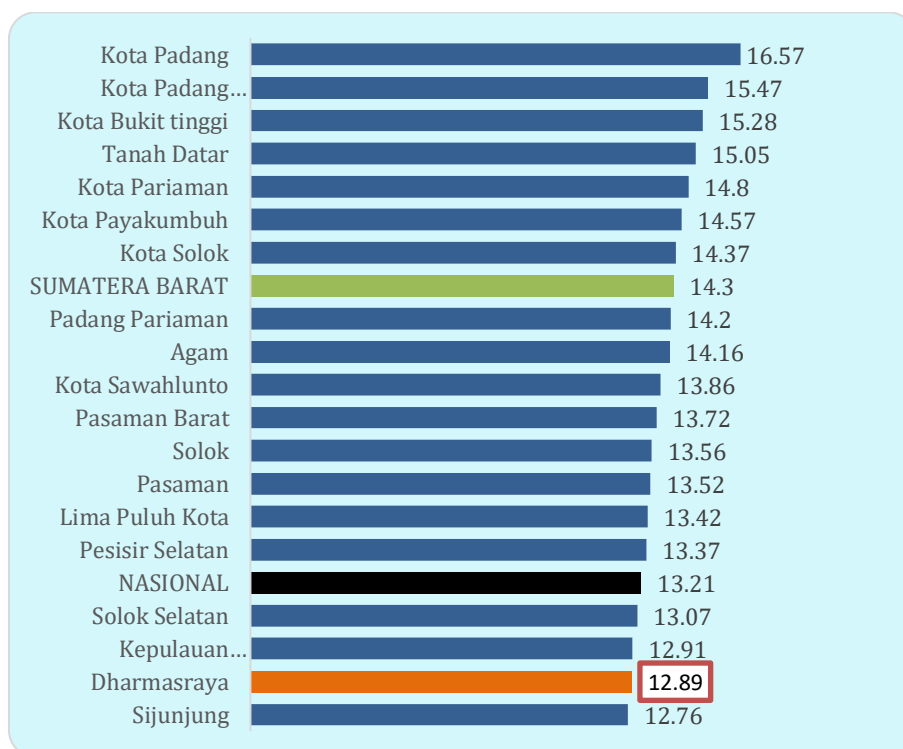
Untuk melihat perkembangan kinerja harapan lama sekolah dari tahun ke tahun. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	12.44	12.44	100.00%	→	Sangat Berhasil
2022	12.44	12.51	100.56%	↑	Memuaskan
2023	12.51	12.68	101.36%	↑	Memuaskan
2024	12.68	12.89	101.66%	↑	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2024

Grafik 0.5 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber :Badan Pusat Statistik Nasional,2024

28. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yaitu Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

SASARAN STRATEGIS 2.1.3 MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

29. INDIKATOR SASARAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

= PERBANDINGAN (RASIO) CAPAIAN ANTARA IPM PEREMPUAN DENGAN IPM LAKI-LAKI.
= 89.

30. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
88.31	89.34	89.58	100.27%	Memuaskan	89.67	99.9

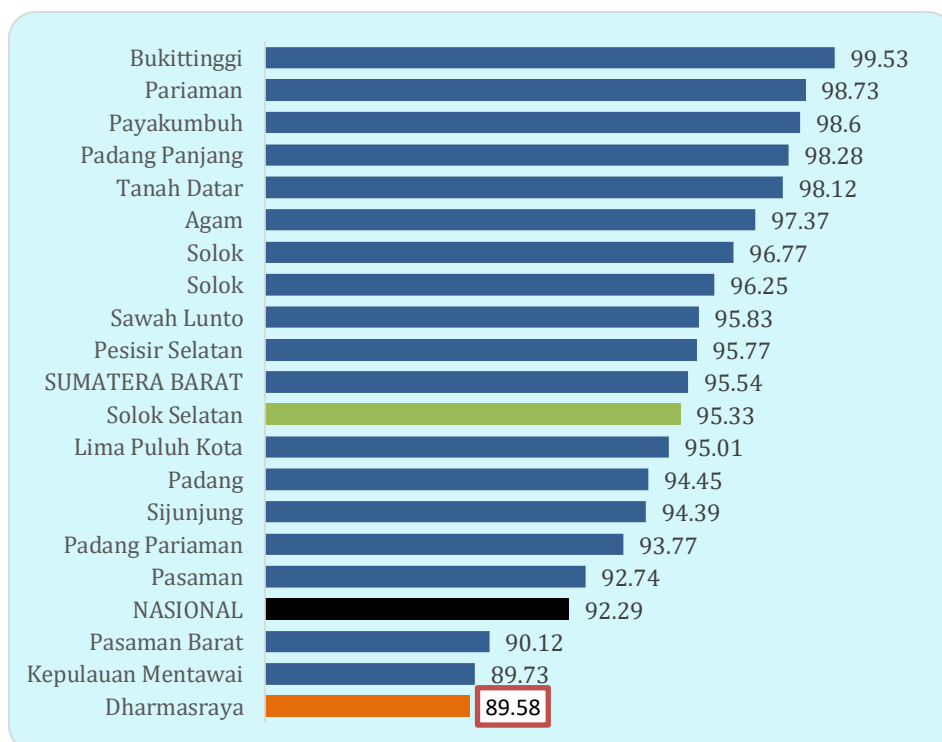
Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Tabel 2.39
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Gender			Tren	Prediket
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
2021	88.35	88.32	99.97%	→	Sangat Berhasil
2022	89	88.56	99.23%	↓	Sangat Berhasil
2023	89.17	88.56	99.32%	↑	Sangat Berhasil
2024	89.34	89.58	100.27%	↑	Memuaskan

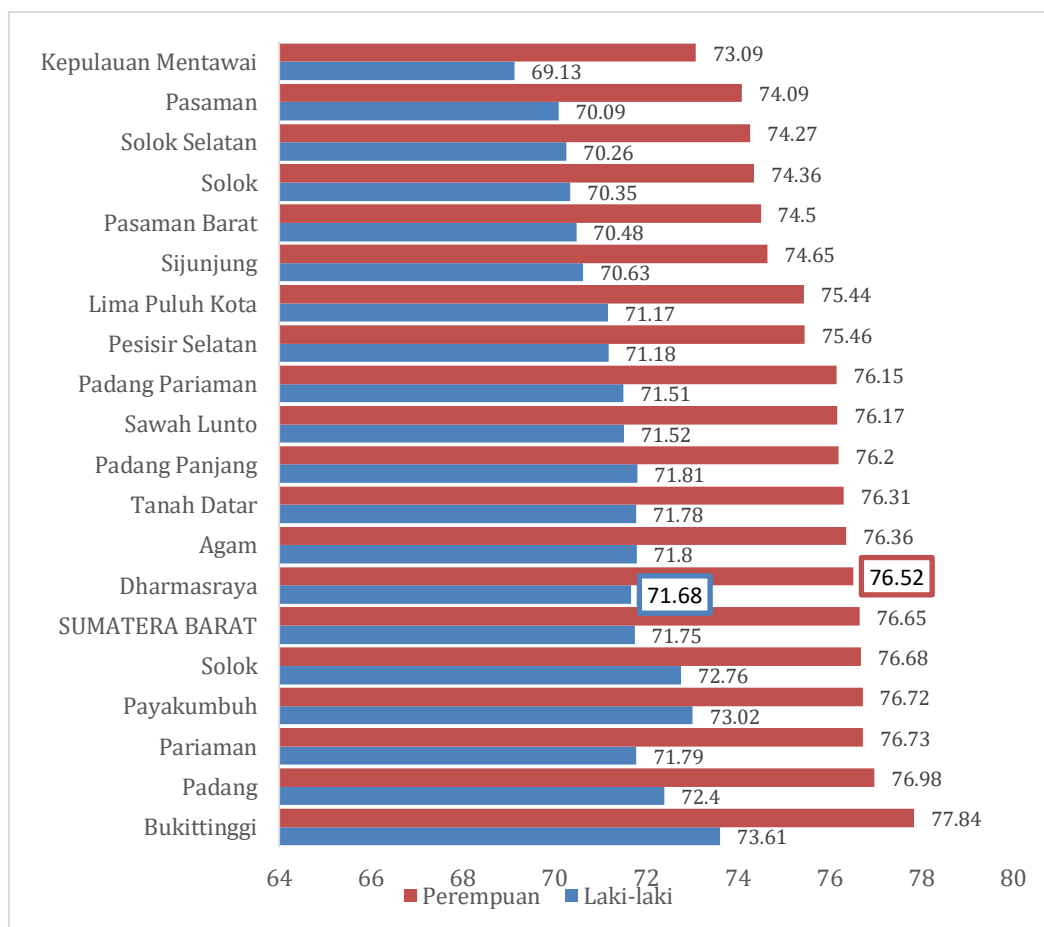
Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Grafik 0.6 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Catalog Analisis Gender Sumatera Barat, Vol-1, 2024

Grafik 0.7 Umur Harapan Hidup Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin, 2020–2023



Sumber : *Catalog Analisis Gender Sumatera Barat, Vol-1, 2024*

31. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung berdasarkan data pembangunan IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021-2024 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Kabupaten Dharmasraya telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Hal ini didukung dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif

Gender (PPRG) serta komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat setiap tahun namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

MISI 3. MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Tujuan 3.1 Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH

32. PDRB PER KAPITA

PDRB PER KAPITA

= JUMLAH NILAI TAMBAH YANG DIHASILKAN OLEH SELURUH UNIT USAHA PER JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (DATA DHARMASRAYA DALAM ANGKA)

= 58.71 Juta Rupiah

33. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.40
Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
40.48	55.95	58.71	104.93%	Memuaskan	47.72	123.03%

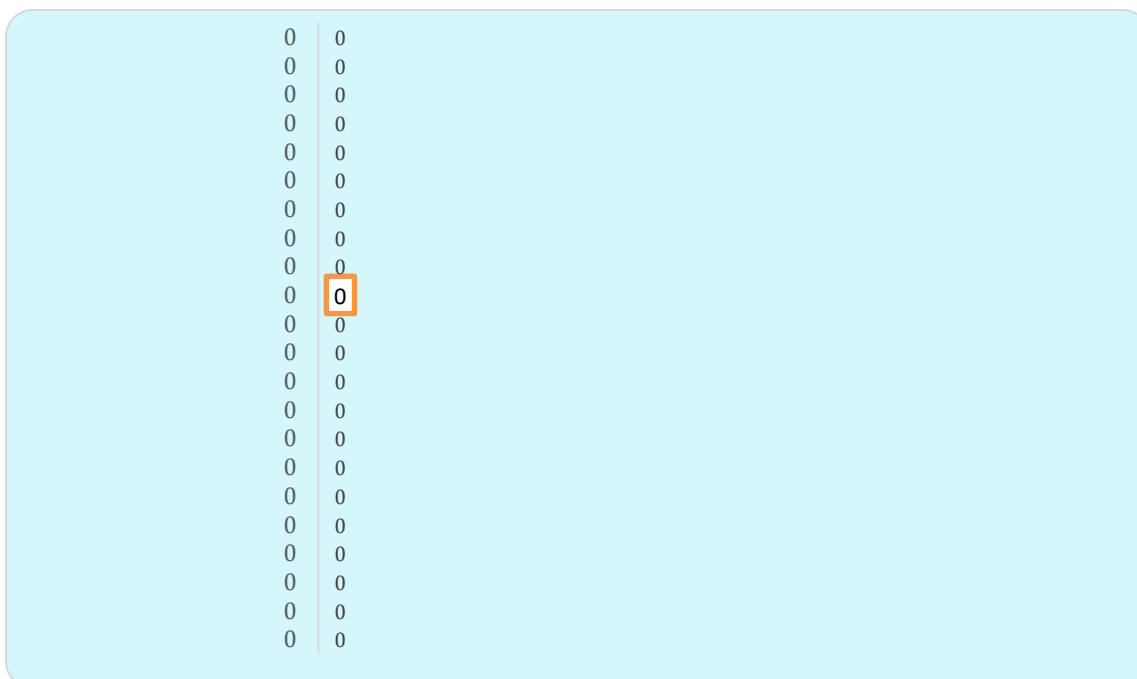
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Tabel 2.41
Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	42.83	46.449	108.45	→	Memuaskan
2022	43.81	51.885	118.40%	↓	Memuaskan
2023	44.79	55.62	124.19%	↑	Memuaskan
2024	55.95	58.71	104.93%	↓	Memuaskan

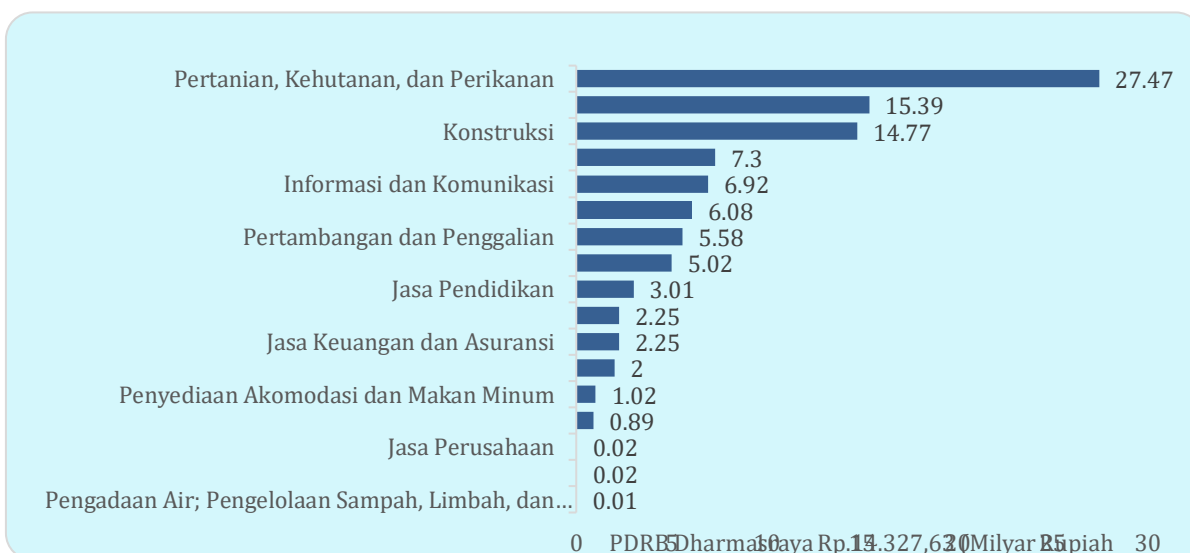
Sumber: Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Tabel 2.42
Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan
Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional



Sumber data: Publish BPS (Sumatera Barat Dalam Angka. 2025)

Tabel 2.43
Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha tahun 2024 (PDRB Dharmasraya)
Sumber: Dharmasraya Dalam Angka, 2025



34. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator PDRB per kapita di Kabupaten Dharmasraya melibatkan beberapa faktor. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mempromosikan investasi, pengembangan sektor ekonomi yang potensial, dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memberikan kontribusi positif.

Di sisi lain, kegagalan dalam mencapai target PDRB per kapita disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang potensial, kendala dalam pengembangan infrastruktur yang memadai, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan promosi investasi, mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan PDRB per kapita dan mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja PDRB perkapita:

1. Pengembangan sektor unggulan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan PDRB perkapita. Diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan PDRB perkapita. Hal ini dapat

dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. serta mendorong adopsi teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja.

4. Investasi dalam Infrastruktur. Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB perkapita. Tenaga kerja yang terampil dan produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Program ini memiliki alokasi anggaran yang besar dan bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dalam rangka mendukung sektor perikanan, yang merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan PDRB per kapita.
7. Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, dan penguatan kelembagaan. program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
8. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri lokal, yang dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita.
9. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor utama dalam kontribusi terhadap PDRB per kapita.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program di atas termasuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program, optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan kerjasama antar instansi terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.

35. PDRB RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

$$= \frac{\text{Jumlah PDRB perkapita net ekspor}}{\text{PDRB per Kapita Tahun } n} * 100\%$$

$$= \frac{1265.22}{14.327.63} * 100\% = 8.83$$

PDRB perkapita net ekspor Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah 1.073.815 juta rupiah dari total PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 13.345.769 juta rupiah. jadi. PDRB perkapita net ekspor di Kabupaten Dharmasraya berkontribusi sekitar 8.04% terhadap total PDRB perkapita. Ini menunjukkan seberapa besar peran ekspor dalam menyumbang pendapatan per kapita di Kabupaten Dharmasraya. Semakin tinggi persentasenya. semakin besar kontribusi ekspor terhadap ekonomi lokal.

36. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.08	8.05	8.83	109.7	Memuaskan	3.8	232.39

Sumber Data : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Secara garis besar. Kabupaten Dharmasraya berkontribusi terhadap ekspor Provinsi Sumatera Barat. dari data BPS bulan Januari 2024 menunjukkan pola ekspor yang menjanjikan dengan fokus pada beberapa golongan barang utama. Pada bulan tersebut. golongan barang yang paling banyak diekspor adalah lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US\$100.01 juta. diikuti oleh berbagai produk karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US\$8.87 juta. dan sari bahan samak dan celup (HS 32) sebesar US\$5.24 juta.

Komoditi Dharmasraya utama untuk mendukung ekspor adalah Produk Karet dan Barang dari Karet (HS 40). Ekspor produk karet menunjukkan bahwa Dharmasraya memiliki potensi yang signifikan dalam industri karet. Produk karet dari daerah ini mungkin memiliki kualitas yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Dukungan dari pemerintah dan inisiatif swasta dalam pengembangan industri karet juga dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ekspor golongan ini.

Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Dharmasraya menurut data BPS tahun 2020 seluas 40.909 hektar atau 409 km². sedangkan luas daerah di Kabupaten Dharmasraya seluas 2.961.19 Km². artinya 13.8% Kawasan di Kabupaten Dharmasraya adalah Perkebunan karet. sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB

Tabel 2.45
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	3.15	3.06	97.10%	→	Sangat Berhasil
2022	3.25	6.32	194%	↑	Memuaskan
2023	3.4	8.05	236.65%	↑	Memuaskan
2024	8.05	8.83	109.70%	↓	Memuaskan

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2025

Tabel 2.46
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Dharmasraya (miliar rupiah)

NO	Jenis Pengeluaran / Type of Expenditure	Nilai (Miliar Rp)	Persentase (%)
1	Perubahan Inventory / Changes in Inventories	-20,66	-0,14
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT / NPISH Consumption Expenditure	140,53	0,98
3	Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	1.265,22	8,83
4	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / Government Consumption Expenditure	1.102,38	7,70
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	4.116,18	28,73
7	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption Expenditure	7.723,98	53,92

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka, 2025

37. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan rasio net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya yang dapat dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi performa ekspor. antara lain:

1. Kualitas dan Daya Saing Produk Ekspor. Salah satu penyebab utama keberhasilan ekspor Dharmasraya adalah kualitas produk yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Produk unggulan seperti produk karet (HS 40) Dharmasraya memiliki standar produksi yang tinggi dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain.

2. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur. antara lain Pembangunan akses jalan tani. irigasi. infrastruktur lainnya merupakan beberapa bentuk adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. termasuk fasilitasi perizinan dan insentif pajak. serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor jaringan transportasi.
3. Inovasi dan Pengembangan Produk. Upaya dalam inovasi produk dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor juga dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspor Dharmasraya. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

Dengan kombinasi dari faktor-faktor di atas. Kabupaten Dharmasraya telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekspor. yang pada gilirannya berkontribusi secara signifikan terhadap rasio net ekspor terhadap PDRB.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Namun. dalam pencapaian indikator ini. masih ditemukan beberapa masalah antara lain dalam beberapa kemungkinan. produk ekspor mengalami masalah kualitas atau tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh pasar tujuan. Serta akses pasar atau jaringan distribusi yang efisien masih belum maksimal juga menjadi penyebab kegagalan dalam meningkatkan ekspor di Kabupaten Dharmasraya.

Dari masalah yang ditemui dapat disusun beberapa alternatif Solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB antara lain

1. Peningkatan kualitas dan standar produk serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan ekspor.
2. Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari peluang di pasar baru atau mengembangkan kemitraan dengan perusahaan asing dapat membantu mengurangi risiko kegagalan ekspor.
3. Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan kemampuan produksi. serta dukungan dalam penerapan inovasi teknologi. akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk ekspor.

Untuk mencapai kinerja ini, tidak dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah, hal ini didukung oleh kolaborasi beberapa perangkat daerah, antara lain:

1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produksi komoditi ekspor. Hal ini termasuk penggunaan teknologi modern, peningkatan proses produksi, dan pemenuhan standar kualitas. Melalui program pengembangan industri kecil dan menengah, dinas ini membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran, sehingga mereka dapat memproduksi komoditi ekspor dengan kualitas yang lebih baik. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi juga dilakukan untuk melakukan riset dan pengembangan terkait inovasi produk dan proses produksi untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memberikan fasilitasi dalam proses perizinan dan investasi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperkenalkan inovasi dalam produksi komoditi ekspor. Pelayanan yang cepat, efisien, dan terpadu akan membantu perusahaan untuk segera memulai atau memperluas usahanya tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
3. Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas komoditi pertanian yang diekspor. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang teknik bertani yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Pemilihan varietas tanaman yang unggul dan adaptif serta pemantauan secara berkala terhadap kualitas hasil panen juga menjadi tanggung jawab dinas ini.

Rasio net ekspor terhadap PDRB didukung oleh Dinas Terkait antara lain Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pertanian dalam hal peningkatan kualitas komoditi ekspor. Program-program pada dinas ini memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian indikator kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya Berikut adalah analisis mengenai kontribusi masing-masing program:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini akan membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk-produk ekspor. Sarana distribusi yang baik akan memastikan produk-produk dapat mencapai pasar ekspor dengan cepat dan efisien, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Dengan

memberikan izin usaha industri secara efisien. program ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan industri akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan. dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Program ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro lokal. Dengan mendorong kemitraan dan kolaborasi antara usaha mikro dengan pihak lain seperti pemerintah. lembaga keuangan. dan perguruan tinggi. program ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro yang berorientasi ekspor.
4. Pembuatan Peta Potensi Investasi. Program ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang potensi investasi di Kabupaten Dharmasraya Dengan menarik investasi ke sektor-sektor yang mendukung ekspor. seperti industri manufaktur dan pertanian. program ini akan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.
5. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal. Melalui kegiatan promosi penanaman modal. program ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Dharmasraya. Investasi baru akan membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekspor dan meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB.
6. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Dengan menyediakan layanan perizinan yang cepat. mudah. dan terpadu. program ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses investasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor ekspor dengan menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor.

SASARAN STRATEGIS 3.1.2 MENGURANGI PENGANGGURAN

38. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

= PERSENTASE JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH ANGKATAN KERJA (DATA BPS)
= 6.02%

39. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.07	5.3	6.02	86.42%	Sangat Berhasil	4.9	77.14%

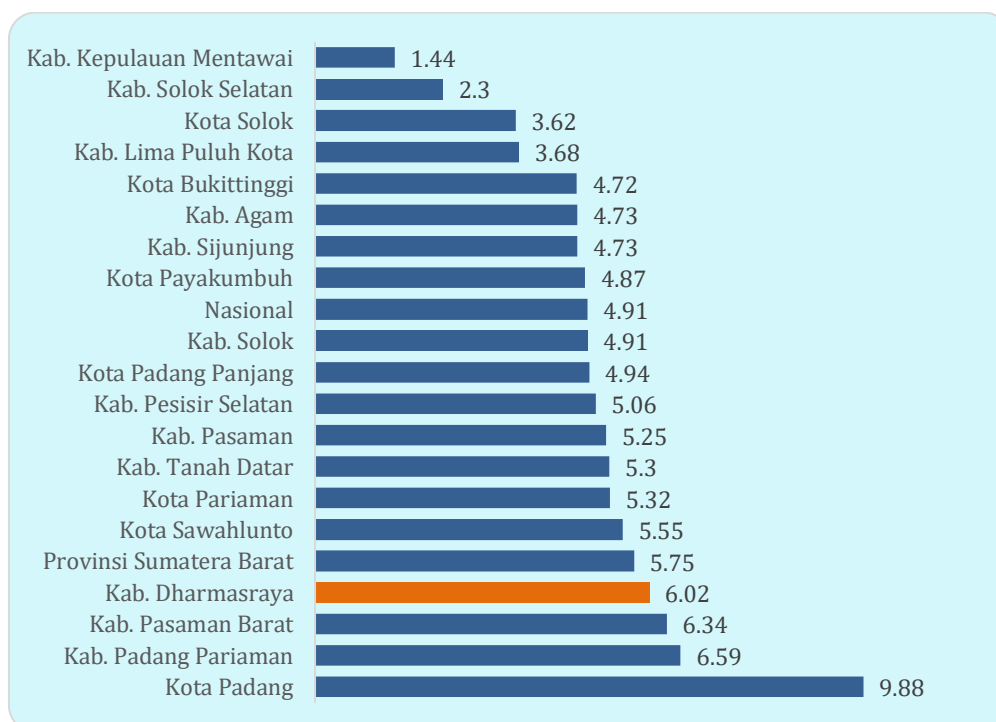
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2024

Tabel 2.48
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	6.07	5	117%	→	Memuaskan
2022	5.68	6.23	90.30%	↓	Sangat Berhasil
2023	5.49	6.22	86.70%	↓	Sangat Berhasil
2024	5.3	6.02	86.42%	↓	Sangat Berhasil

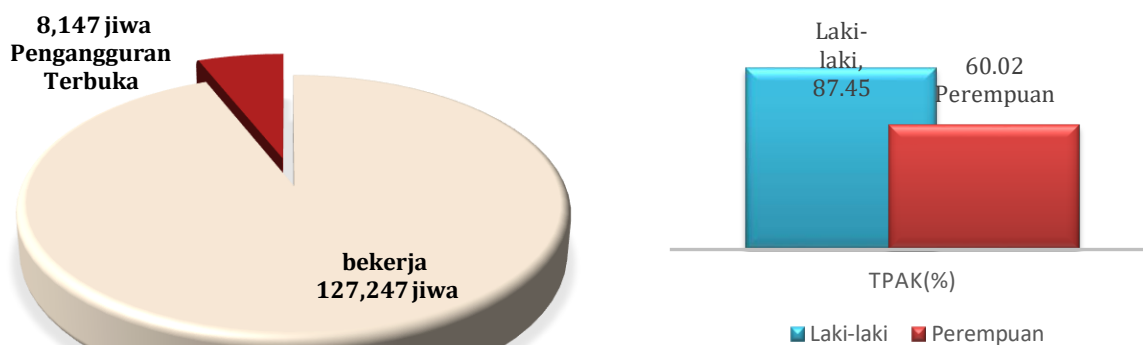
Sumber : BPS diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2024

Grafik 0.8 Perbandingan Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2024

Grafik 0.9 Penduduk Dharmasraya Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2025

40. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Walau hasil kinerja belum mencapai 100%, namun, beberapa kiat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Mengadakan kegiatan Skill Development Center (SDC) yaitu lembaga rujukan untuk keterpaduan dan sinegritas kebijakan dan program pengembangan SDM kompetensi. cipta kerja dan potensi tenaga kerja di daerah. dalam rangka penanggulangan pengangguran peningkatan produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi daerah. SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak. promotor dan fasilitator peningkatan kerjasama.koordinasi. keterpaduan dan sinegritas program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase angkatan kerja dan pencari kerja dalam mengasah keterampilan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing. Untuk pelatihan BLK pada Tahun 2023 mendapat 18 Paket Pelatihan dengan sumber dana dari APBN dan 4 Paket Pelatihan sumber dana APBD.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. dengan indikator jumlah pencari kerja yang terdaftar di SISNAKER ada sebanyak 726 orang

Namun, meskipun telah melaksanakan berapapun kiat, terdapat beberapa penyebab tidak tercapainya indikator ini termasuk faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Penyebab Kegagalan yaitu Dampak Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar
2. Terbatasnya Lowongan Kerja dan Tingginya kebutuhan kerja, salah satu penyebab utama Tingkat Pengangguran yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Persaingan yang ketat antara para fresh graduate dan tenaga kerja yang berpengalaman juga semakin kuat.
3. Rendahnya kualitas dan ketidakesesuaian kualitas pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif

Dari permasalahan yang ditemui, dapat disusun beberapa alternatif Solusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan industri lokal dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Maksimalisasi pelatihan pada Balai Latihan Kerja di kabupaten Dharmasraya sehingga meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dapat meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan teknis, akses ke pasar, dan sumber daya finansial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi dan teknologi informasi, dapat membuka akses ke wilayah yang terpencil dan meningkatkan konektivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.
5. Pemerintah setempat perlu merancang kebijakan yang mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja, serta memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Melalui implementasi solusi-solusi ini, diharapkan tingkat pengangguran di Dharmasraya dapat dikurangi secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 3.1.3 MENGURANGI KEMISKINAN

41. TINGKAT KEMISKINAN

TINGKAT KEMISKINAN = JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
BADAN PUSAT STATISTIK
= 5.32 %

Tingkat kemiskinan menjadi indikator kinerja yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini karena kemiskinan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memantau tingkat kemiskinan, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga menjadi indikator kinerja yang penting karena mencerminkan tingkat keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, tetapi juga mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

42. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
6.21	5.4	5.32	101.4%	Memuaskan	5.87	94.52%

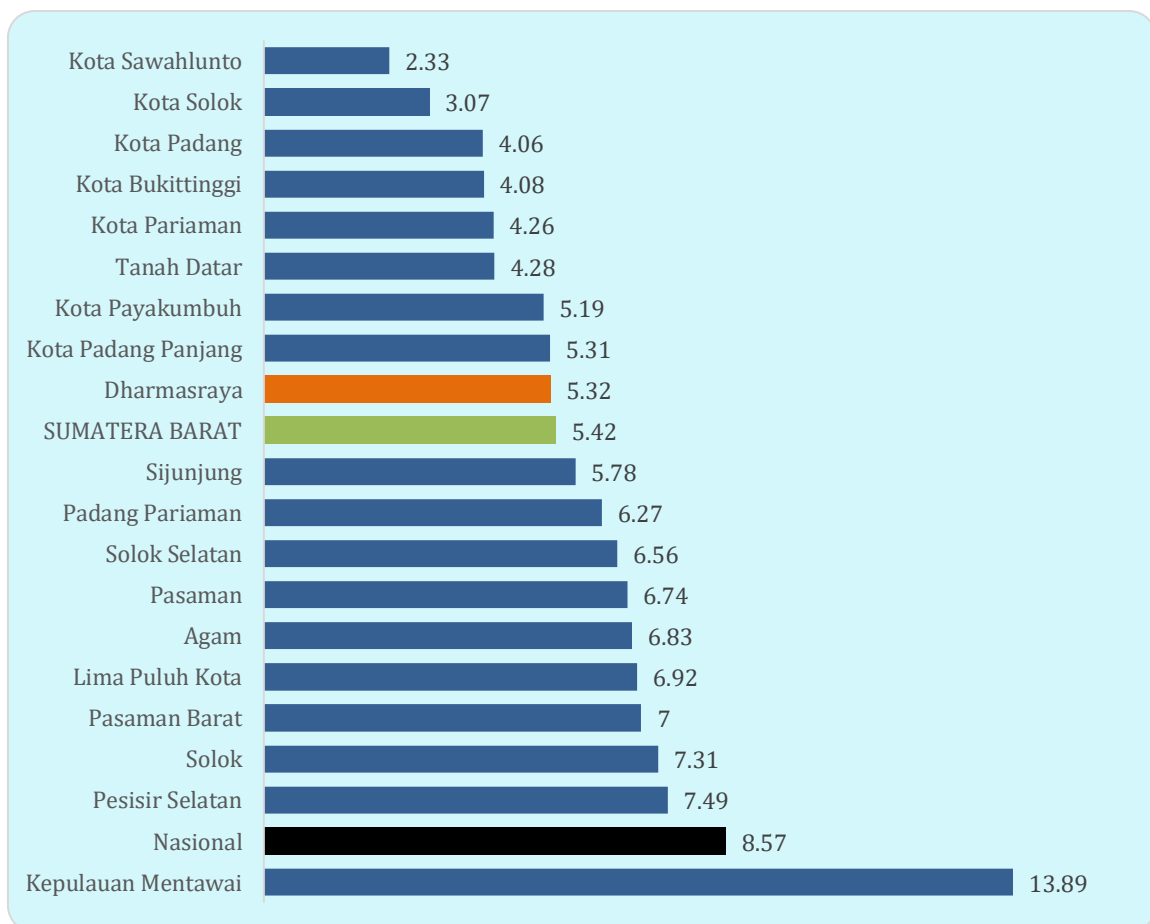
Sumber Data : BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB, 2024

Tabel 2.50
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dengan
Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	6.14	6.57	92.99%	→	Sangat Berhasil
2022	6.08	5.56	108.60%	↑	Memuaskan
2023	6.02	5.56	107.60%	↓	Memuaskan
2024	5.4	5.32	101.40%	↓	Memuaskan

Sumber Data :BPS diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2024

Grafik 0.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024

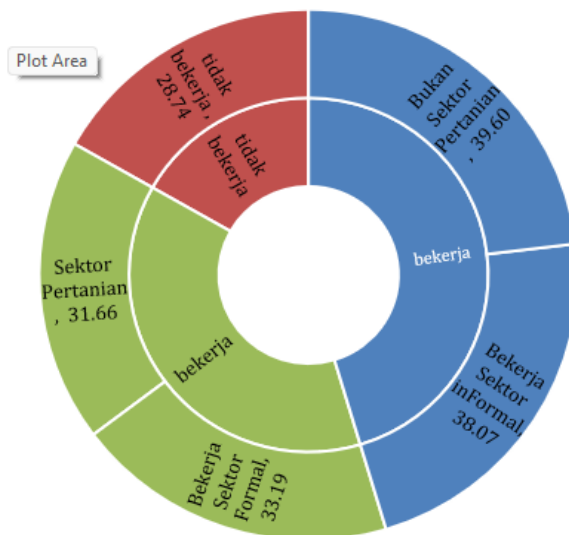


Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Grafik 0.11 Persentase Penduduk Miskin Dharmasraya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja, 2024

- Bukan Sektor Pertanian 39.60%
- Bekerja Sektor informal 38.07%
- Bekerja Sektor Formal 33.19%
- Sektor Pertanian 31.66%

Sumber :Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Indonesia tahun 2024 oleh BPS ,2025



Tabel 2.51
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Σ Penduduk Miskin (000)	%Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
1	Kota Sawahlunto	1.52	2.33	524,196
2	Kota Solok	2.40	3.07	569,869
3	Kota Padang	41.40	4.06	736,786
4	Kota Bukittinggi	5.82	4.08	658,640
5	Kota Pariaman	4.01	4.26	609,286
6	Tanah Datar	15.00	4.28	554,665
7	Kota Payakumbuh	7.62	5.19	648,230
8	Kota Padang Panjang	3.06	5.31	634,303
9	Dharmasraya	15.25	5.32	622,190

10	Sijunjung	14.99	5.78	565,067
11	Padang Pariaman	26.76	6.27	580,392
12	Solok Selatan	12.33	6.56	551,340
13	Pasaman	20.01	6.74	515,608
14	Agam	34.82	6.83	558,963
15	Lima Puluh Kota	27.72	6.92	582,794
16	Pasaman Barat	34.60	7	657,354
17	Solok	28.18	7.31	569,605
18	Pesisir Selatan	36.05	7.49	589,787
19	Kepulauan Mentawai	14.19	13.89	461,088
	SUMATERA BARAT	315.43	5.42	714,991
	Nasional	24.054,72	8.57	595,242

Sumber Data: laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS Sumatera Barat. 2024

43. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati Dharmasraya. Dengan adanya Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ada beberapa Hal yang telah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data;
2. Saling berkoordinasi melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Tim;
3. Melakukan advokasi dan kerja sama dengan perusahaan serta lembaga dan perbankan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penanganan kemiskinan melalui CSR.

Semakin rendah angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya membuktikan semakin baik penanganan yang sudah dilakukan.

MISI 4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien

Tujuan 4.1 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS 4.1.1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

44. INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI

INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI = PENILAIAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK)
= 3.83

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk

mengevaluasi tingkat perilaku dan kebijakan anti-korupsi di suatu negara atau wilayah tertentu. IPAK mengukur sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi.

Penggunaan IPAK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anti-korupsi suatu daerah, memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

45. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.9	3.92	3.83	97.70%	Memuaskan	3.6	106.39%

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Peningkatan signifikan dalam Indeks Perilaku Antikorupsi juga bisa dianggap sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang tepat, pemantauan yang ketat, serta pendidikan dan pelatihan yang terus menerus terkait dengan etika dan integritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran juga berperan dalam mencapai capaian yang memuaskan ini.

Tabel 2.53
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2024
dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	3.066	3.38	92.99%	→	Sangat Berhasil
2022	3.02	3.9	129.14%	↑	Memuaskan
2023	3.322	3.92	118.00%	↓	Memuaskan
2024	3.92	3.83	97.70%	↓	Sangat Berhasil

Sumber :Badan Pusat Statistik. 2025

Tingginya capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi selama tiga tahun terakhir ini mencerminkan efektivitas dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Upaya-upaya seperti peningkatan pemahaman akan hukum dan regulasi terkait korupsi, pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan dana publik, serta promosi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

46. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Dharmasraya telah membawa kesuksesan dalam meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Berikut adalah analisis beberapa penyebab keberhasilan:

1. Pelaporan LHKPN secara menyeluruh oleh seluruh pejabat tinggi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan integritas individu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Publikasi data melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah). data publik di Kabupaten Dharmasraya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Transparansi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana publik, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi.
3. Pengawasan oleh inspektorat. Peran aktif inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pemerintahan menjadi penopang penting dalam mencegah dan menindak potensi tindak korupsi. Pengawasan yang efektif dapat memberikan sinyal jelas bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.
4. Tingkatkan level Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Dharmasraya sudah mencapai level 3. hal ini menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. Ini memastikan bahwa penegakan aturan dan standar integritas tinggi dijalankan secara konsisten.
5. Penanganan laporan temuan secara efektif. Penanganan laporan temuan dengan cepat dan tepat menunjukkan responsifnya pemerintah terhadap masalah korupsi. Tindakan yang transparan dan tegas memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi.
6. Pengawasan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring pelaksanaan kinerja. Pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, potensi kecurangan dan korupsi dapat diminimalkan.

Dengan implementasi berbagai langkah ini secara komprehensif, Kabupaten Dharmasraya telah berhasil membangun lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, selain itu, Penggunaan

Sumber Daya di Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan indeks perilaku anti-korupsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang tepat. Berikut adalah analisisnya:

1. Peningkatan Transparansi melalui Website PPID. Ketersediaan website PPID Dharmasraya (<https://ppid.dharmasrayakab.go.id>) memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada publik untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan, anggaran, dan program pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan sumber daya publik, yang dapat mengurangi peluang praktik korupsi.
2. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3. Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3 menandakan adanya sistem pengawasan yang matang dan berkualitas di Kabupaten Dharmasraya. Dengan memiliki jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap setiap aktivitas pemerintah, termasuk penggunaan sumber daya, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi.
3. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di pemerintahan. Dengan mengelola website PPID, informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Dengan adanya implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang efisien, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya. Dengan demikian, indeks perilaku anti-korupsi dapat terus meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

47. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disebutkan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisisnya:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini memberikan fokus pada pengawasan terhadap area-area yang dianggap memiliki risiko tinggi

terkait dengan praktik korupsi. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan area-area tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencegah dan menanggulangi potensi praktik korupsi. Langkah ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Program ini menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pengawasan internal dan eksternal di Kabupaten Dharmasraya. Dengan merumuskan kebijakan teknis yang jelas dan terarah, pemerintah dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi para pelaksana pengawasan. Langkah ini membantu memastikan konsistensi dan standar yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Melalui program ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Dharmasraya memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Pengawasan internal yang kuat dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Langkah ini memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.

Dengan menggabungkan program-program ini dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah ini membantu membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya.

48. *OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN*

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

= HASIL EVALUASI/OPINI BPK RI PADA TAHUN -N TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN -1N

= WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah daerah menandakan bahwa entitas tersebut telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan dan transparansi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, serta menunjukkan

bahwa entitas tersebut telah mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. Opini WTP menjadi prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. karena menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi. serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik.

Prestasi ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. serta membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Opini WTP juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan. seperti investor, kreditor, dan masyarakat umum. terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan opini WTP sebagai landasan untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang baik. serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

49. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
WTP	WTP	WTP	100%	Memuaskan	WTP	100%

Sumber Data :Badan Keuangan Dharmasraya (BPK).2024

Dari tabel yang disajikan. dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangannya. Capaian 100% opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dianggap memadai, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keputusan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya yang diberikan melalui oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menegaskan bahwa tidak ditemukan ketidakpatuhan atau kekurangan yang signifikan dalam laporan keuangan tersebut. Opini WTP dari BPK mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai tingkat memuaskan dalam mempertahankan kualitas dan transparansi laporan keuangannya. yang tercermin dari opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini menjadi pencapaian yang penting dan membanggakan bagi Kabupaten Dharmasraya. serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan public.

Tabel 2.55
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%
2024	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Dharmasraya. 2025

Dari Tabel 2.55. terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021-2024, Capaian kinerja ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

Dengan mencapai opini WTP sebanyak 100% setiap tahunnya. Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi. akuntabilitas. dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Capaian ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik. serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dengan demikian. kesimpulan dari tabel tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya telah mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. yang tercermin dari capaian opini WTP yang mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan publik.

50. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian karena Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan keuangan yang disebut di atas. menyajikan secara wajar. dalam semua hal yang material. posisi keuangan Pememerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2024. dan realisasi anggaran. perubahan saldo anggaran lebih. operasional. arus kas. serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, beberapa penyebab keberhasilan Kabupaten Dharmasraya yang lainnya antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Proses ini melibatkan penyiapan data. analisis. dan dokumentasi yang cermat. serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Internal dalam rangka pengawasan internal yang efektif dan peningkatan kapasitas staf keuangan telah membantu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan memiliki tim yang terlatih dan kompeten. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan produktivitas dalam proses persiapan laporan keuangan.
3. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menerima dan menerapkan rekomendasi BPK secara tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminimalkan risiko penundaan atau ketidaksempurnaan dalam proses audit. sehingga menghemat sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian laporan keuangan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan telah membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi sistem yang terintegrasi dan otomatis. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengolahan data. serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses tersebut.

Program-program yang dialokasikan seperti Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah memberikan landasan yang kuat untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data keuangan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diajukan kepada BPK.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah membantu dalam menjamin bahwa anggaran pemerintah daerah dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan yang baik juga memastikan kelancaran dalam pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menjalankan proses akuntansi yang tepat dan tepat waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik. Dengan mengatur pengelolaan aset dan keuangan dengan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko penyelewengan, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

51. HASIL EVALUASI AKIP

HASIL EVALUASI AKIP	=	NILAI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PAN RB
		BERDASARKAN HASIL PENILAIAN EVALUASI SISTEM
		AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
	=	B (67.24)

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses yang dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi AKIP pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, pemerintah daerah dapat meraih hasil yang memuaskan jika terbukti berhasil mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika terdapat kekurangan atau hambatan dalam mencapai target kinerja, evaluasi AKIP juga dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

52. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.56
Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
B 63.44	70	67.24	96.06%	Sangat Baik	A	84.04%

Sumber data : Kemenpan diolah oleh Bagian Organisasi. 2025

Tabel 2.57
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.28	22.75
2	Pengukuran Kinerja	30	18.19	18.64	19.54
3	Pelaporan Kinerja	15	10.78	10.81	11.52
4	Evaluasi Internal	25	12.90	12.92	13.43
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.07	64.65	67.24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Sumber Data : Kementerian PAN-RB. 2024

Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk perbaikan kinerja di Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan cascading (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan critical success factor (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya
4. Mereview kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi- yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut
5. Melakukan monitoring terhadap rencana aksi PD untuk memastikan kualitas pencapaian kinerjanya secara berkala
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kabupaten Dharmasraya diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD, serta memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari untuk media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara real time
7. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan efisiensi anggaran telah mengukur seluruh biaya capaian kinerja

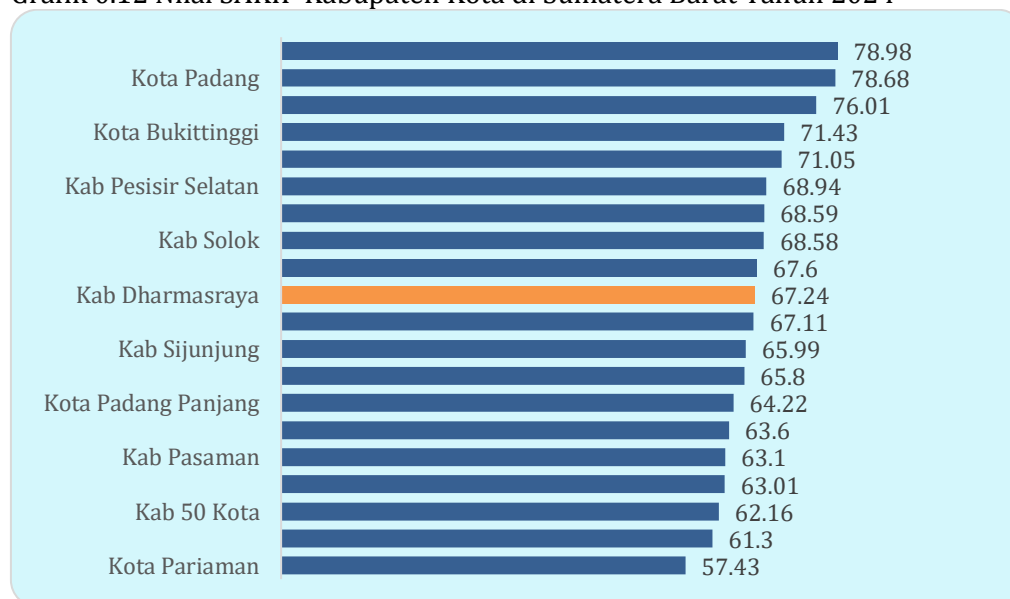
9. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi
10. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan PD dan melaporkan nya kepala pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
11. Mendorong implementasi kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD
12. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD

Tabel 2.58
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan
Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	70	63.98	91.40%	→	Sangat Berhasil
2022	70	64.07	91.53%	↑	Sangat Berhasil
2023	70	64.65	92.35%	↑	Sangat Berhasil
2024	70	67.24	96.06%	↑	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2024

Grafik 0.12 Nilai SAKIP Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.59
Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	KOMPONEN SAKIP				TOTAL NILAI
		PERENCA NAAN	PENGUKUR AN	PELAPO RAN	EVALUASI AKUNTABILITAS	
1	KOTA PAYAKUMBUH	25,04	19,93	12,86	18,18	76,01
2	KOTA PADANG	25,4	22,01	12,62	18,65	78,68
3	KAB DHARMASRAYA	22,75	19,54	11,52	13,43	67,24
4	KAB PESISIR SELATAN	24,19	18,05	11,4	15,3	68,94
5	KAB PADANG PARIAMAN	22,84	22,27	11,11	14,83	71,05
6	KOTA SOLOK	22,83	21,21	10,89	13,66	68,59
7	KAB SOLOK	23,65	18,11	10,55	16,27	68,58
8	KAB AGAM	21,89	18,69	10,55	15,98	67,11
9	KAB TANAH DATAR	22,49	19,92	10,45	14,74	67,6
10	KAB SIJUNJUNG	22,36	19,73	10,4	13,5	65,99
11	KOTA BUKITTINGGI	22,57	21,9	10,35	16,61	71,43
12	KAB 50 KOTA	22,37	17,29	10,26	12,24	62,16
13	KAB SOLOK SELATAN	19,93	15,73	10,25	15,39	61,3
14	KOTA SAWAHLUNTO	22,49	15,03	10,21	15,87	63,6
15	KAB PASAMAN	22,55	19,46	10,18	10,91	63,1
16	KAB PASAMAN BARAT	23,44	13,75	9,98	15,84	63,01
17	KOTA PADANG PANJANG	22,93	16,39	9,92	14,98	64,22
18	KOTA PARIAMAN	18,38	16,98	9,66	12,41	57,43
19	KAB KEP MENTAWAI	24,27	17,55	9,35	14,63	65,8

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, 2025

53. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel 2.60
Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B

No	Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	86.96	A
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.95	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.51	A
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.32	A
5	Dinas Pertanian	80.29	A
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.24	BB
7	Dinas Lingkungan Hidup	79.19	BB
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.09	BB
9	Dinas Kesehatan	78.98	BB
10	Kecamatan Koto Baru	78.15	BB
11	Kecamatan Sungai Rumbai	78.12	BB
12	Inspektorat	77.14	BB
13	Dinas Pendidikan	76.55	BB
14	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	76.29	BB
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	75.95	BB
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	75.85	BB
17	Kecamatan Asam Jujuhan	74.62	BB
18	Kecamatan Koto Besar	73.81	BB
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	73.37	BB
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.03	BB
21	Dinas Perhubungan	72.84	BB
22	Badan Keuangan Daerah	72.21	BB
23	Kecamatan Pulau Punjung	72.09	BB
24	Kecamatan Padang Laweh	71.94	BB
25	Dinas Pangan dan Perikanan	71.75	BB
26	RSUD Sungai Dareh	70.97	BB
27	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	70.77	BB
28	Kecamatan Tiumang	69.89	B
29	Kecamatan Timpeh	69.89	B
30	Kecamatan Koto Salak	69.33	B
31	Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya	68.66	B
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.25	B
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66.34	B

No	Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
34	Kecamatan Sitiung	66.08	B
35	Kecamatan Sembilan Koto	62.62	B
36	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	62.31	B
37	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya	61.51	B

Sumber : Inspektorat Dharmasraya. 2024

Dari 38 OPD masing-masing sudah seluruh OPD memiliki tim evaluasi kinerja internal. tim penyusun laporan kinerja. dan tim implementasi SAKIP perangkat daerah. dan dari tim yang telah dibentuk. seluruh OPD sudah memiliki Rencana Strategis tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Rencana Aksi Kinerja tahun 2024. pohon kinerja. cascading dan dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas kinerja lainnya. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Dari Analisa terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan antara lain:

1. *Basic dimension* dalam penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan. dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan serta meningkatkan rasa kepemilikan pimpinan OPD terhadap kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun. maka dilaksanakan Penandatanganan komitmen kinerja yang telah ditandatangani oleh seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk komitmen kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan strategi berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya.
2. Integrasi dari Sekretariat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam penggunaan e-SAKIP Dharmasraya. pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan hak guna pakai aplikasi e-Sakip Dharmasraya guna meningkatkan nilai publikasi serta pendokumentasian dokumen kinerja.
3. Pembentukan dua tim inti dalam percepatan pelaksanaan SAKIP antara lain Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dalam SK Bupati Dharmasraya No 188.45/ /KPTS-BUP/2024 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024. dimana anggota nya terdiri dari SEKRETARIAT DAERAH BAPPERIDA. INSPEKTORAT, BKPSDM, BKD, KOMINFO.

Dalam memastikan implementasi SAKIP di Kabupaten Dharmasraya. salah satu Upaya yang dilakukan adalah Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan melalui SK Bupati Dharmasraya No 188.45/69/KPTS-BUP/2024. Dengan melibatkan kolaborasi dari BAPPERIDA, INSPEKTORAT, dan SEKRETARIAT DAERAH, tim ini memiliki cakupan yang luas dalam memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan baik dan efektif.

Melalui kerja tim yang terkoordinasi, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, BAPPERIDA dapat memberikan masukan terkait perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, sementara INSPEKTORAT dapat melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, SEKRETARIAT DAERAH dapat memberikan dukungan administratif dan koordinasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim.

Dengan adanya sinergi antara berbagai instansi yang terlibat, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, sementara sistem akuntabilitas kinerja dapat diperkuat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan penunjang yang difokuskan pada pengembangan kinerja reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan daerah, dan peningkatan pengawasan di Kabupaten Dharmasraya memiliki peran yang krusial dalam mencapai indikator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertama, pengembangan kinerja reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi, responsiveness, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan memperkenalkan inovasi dan perbaikan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan sistem manajemen, pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan daerah juga merupakan faktor kunci dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melakukan perencanaan yang matang, berbasis data, dan partisipatif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang jelas, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, dan mengukur kinerja secara lebih akurat. Selain itu, perencanaan yang baik juga membantu dalam meminimalkan risiko ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Terakhir, peningkatan pengawasan merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan secara dini, serta mengambil tindakan korektif yang tepat. Pengawasan yang efektif juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, program/kegiatan penunjang yang difokuskan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Dharmasraya adalah langkah-langkah strategis dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melaksanakan program-program ini dengan efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

54. NILAI LPPD

NILAI LPPD	= SKOR EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH = 3.5036
------------	---

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan laporan yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya dan keuangan daerah. Nilai LPPD pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Secara umum, semakin tinggi nilai LPPD suatu pemerintah daerah, semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, nilai LPPD merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

55. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.61
Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
3.5138	3.75	3.5036	93.43%	Sangat Baik	3.9000	89.83

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2024

Untuk menganalisis target kinerja LPPD tahun 2023. sudah adanya peningkatan evaluasi data dari OPD yang sudah mulai tertata rapi dan juga sudah mulai relevan dengan kebutuhan dan tujuan pemerintah daerah dari tahun sebelumnya. Selain itu target tersebut juga harus realistis dengan data yang ada.

Pada tahun 2024. target untuk nilai LPPD adalah 3.7. sedangkan realisasinya adalah 3.50 sehingga capaian untuk nilai LPPD ini pada tahun 2024 adalah 94.7%. capaian ini masuk dalam kategori sangat baik. Nilai LPPD merupakan salah satu nilai yang membentuk Pemerintahan lebih maju dan tertata dengan baik. Nilai LPPD Kabupaten pada tahun 2024 menduduki peringkat 1 di Tingkat Provinsi dan Peringkat 9 di Tingkat Nasional.

Tabel 2.62
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	3.6	3.51	97.20%	→	Sangat Berhasil
2023	3.65	3.51	96.20%	↓	Sangat Berhasil
2024	3.7	3.5036	94.69%	↓	Sangat Berhasil
2024	3.75	3.5036	93.43%	↓	Sangat Berhasil

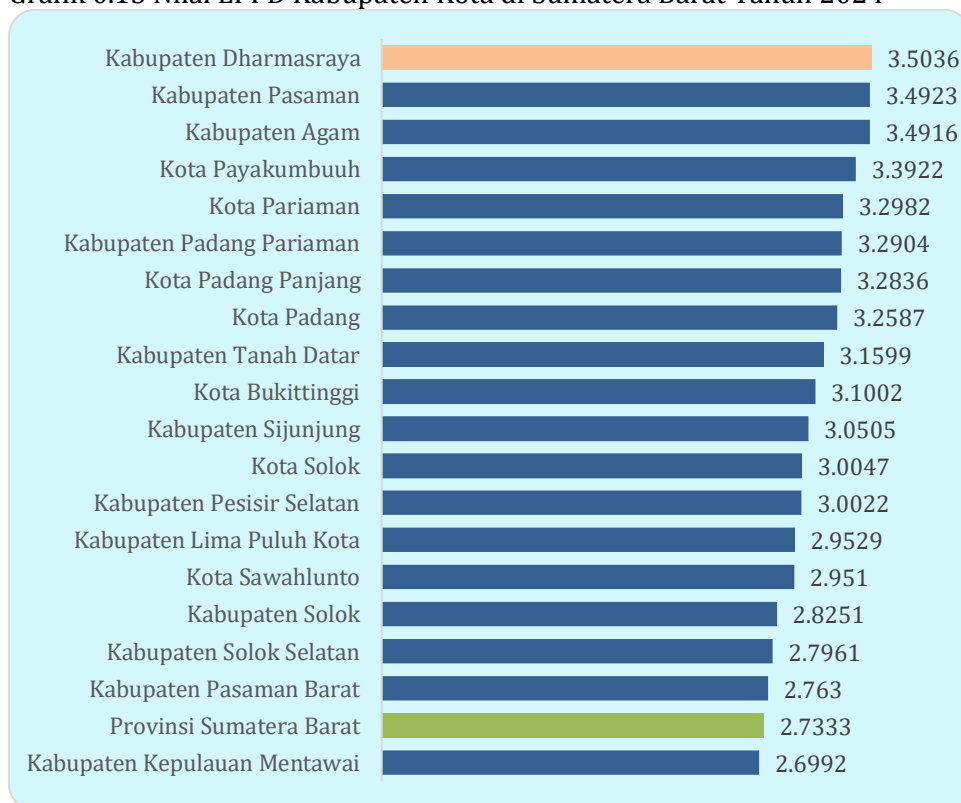
Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2024

Tabel 2.63
Perbandingan capaian kinerja LPPD Dharmasraya dengan Kabupaten Kota Lain dan Provinsi Sumatera Barat

No	Pemerintah Daerah	LPPD	
		NILAI	PERINGKAT NASIONAL
1	Kabupaten Banyuwangi	3.8118	1/414
2	Kabupaten Dharmasraya	3.5036	9/414
4	Provinsi Sumatera Barat	2.7333	25/34

Sumber :Kepmendagri No.100.2.1.7.6646 tahun 2024

Grafik 0.13 Nilai LPPD Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber :Kepmendagri No.100.2.1.7.6646 tahun 2024

Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat ke-9 dari total 414 pemerintah daerah yang dievaluasi. Dengan nilai LPPD sebesar 3.5036. Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Peringkat ini mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terus ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam upaya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peringkat ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat terus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi mereka.

56. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai nilai LPPD yang tinggi di Kabupaten Dharmasraya dapat diatribusikan kepada dukungan dan kerjasama yang solid antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Kerjasama yang kuat antar-OPD memungkinkan

terciptanya sinergi dalam pengumpulan data, analisis informasi, dan penyusunan laporan. Dengan demikian, setiap OPD dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan dalam LPPD, sehingga menciptakan capaian kinerja yang memuaskan.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam pencapaian nilai LPPD, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, yaitu seringnya terlambatnya pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan sebagai penyusun LPPD di tingkat kabupaten. Keterlambatan ini dapat menghambat proses penyusunan laporan dan mengganggu ketepatan waktu dalam penyampaian informasi kepada publik. Penyebab keterlambatan pengiriman data dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kesibukan, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya koordinasi antar-OPD.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bagian Pemerintahan dan OPD-OPD terkait dalam hal pengumpulan dan pengiriman data. Langkah-langkah ini dapat meliputi penyelenggaraan rapat rutin, pelatihan tentang pentingnya keteraturan pengiriman data, dan pembentukan tim kerja lintas-OPD untuk memantau dan memastikan kelancaran prosesnya.
2. Menerapkan sistem informasi atau aplikasi yang memungkinkan OPD untuk secara langsung mengirimkan data secara real-time kepada Bagian Pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dipercepat, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam penyusunan laporan.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keteraturan pengiriman data. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada staf OPD tentang pentingnya keteraturan dan kecepatan dalam pengiriman data untuk penyusunan LPPD. Menekankan pada konsekuensi dari keterlambatan pengiriman data dan manfaat dari keteraturan pengiriman data dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen dari setiap OPD.

Dengan menerapkan alternatif solusi di atas, diharapkan dapat mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan serta meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan LPPD di tingkat kabupaten. Dengan demikian, Kabupaten Dharmasraya dapat terus mempertahankan capaian kinerja yang baik dalam hal LPPD serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai LPPD yaitu update data melalui aplikasi SI ELPPD oleh Operator SI ELPPD di Bagian Pemerintahan, melalui kegiatan

update data melalui aplikasi SI ELPPD. pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam LPPD adalah akurat, terkini, dan relevan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memiliki data yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat memperkuat pertanggungjawaban mereka terhadap penggunaan sumber daya publik, serta memfasilitasi proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dengan demikian, program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja LPPD. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 4.1.2 BIROKRASI YANG BERKUALITAS

57. INDEKS KELEMBAGAAN

TIDAK ADA PENILAIAN INDEKS KELEMBAGAAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKUKAN ANALISA LEBIH LANJUT

58. INDEKS SPBE

INDEKS SPBE = NILAI INDEKS YANG MEREPRESENTASIKAN TINGKAT PELAKSANAAN SPBE SECARA KESELURUHAN. = 3.61

59. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
1.09	2.83	3.61	127.56%	Memuaskan	3	120.3%

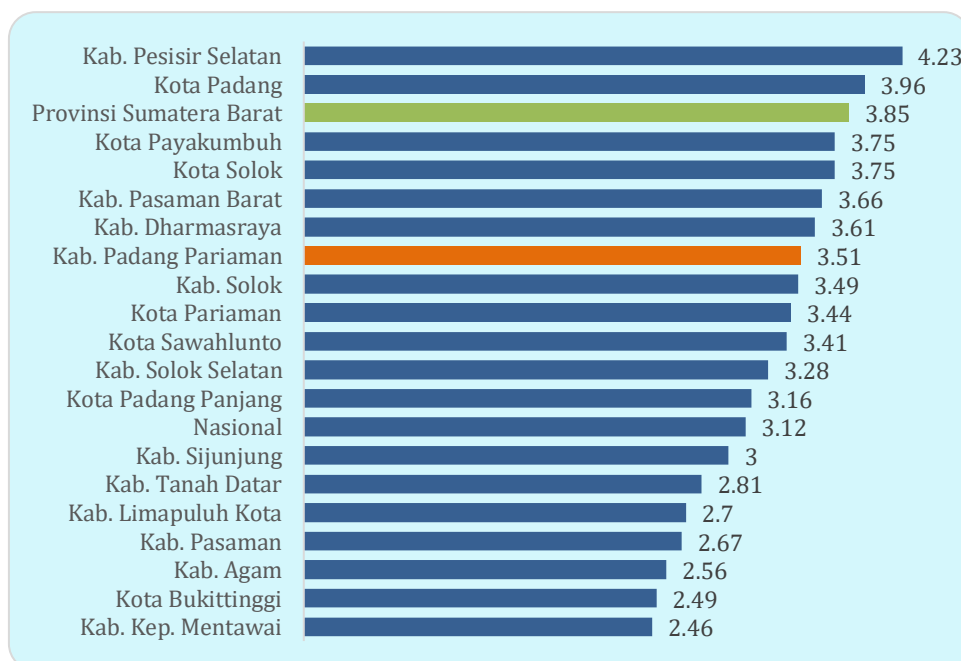
Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2024

Tabel 2.65
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	1.625	1.09	67.08%	→	Cukup Berhasil
2022	1.9	2.41	127.89%	↑	Memuaskan
2023	2.41	2.83	117.43	↑	Memuaskan
2024	2.83	3.61	127.56%	↓	Memuaskan

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2024

Tabel 2.66
Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat tahun 2024



Sumber Data : Kepmenpan RB No.633/2024

60. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari tahun 2021. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya berada di angka 1.09 (kurang) dan menduduki peringkat kedua terendah di Propinsi Sumatera Barat. pada

tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan berada pada indeks 2.41 (kurang). dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup significant yaitu di angka 3.61 (Sangat baik). Adapun usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan angka indeks SPBE yang telah dilakukan adalah dengan melengkapi Data dan Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. seperti Dokumen Regulasi SPBE. Kebijakan yang telah dimiliki. sistem Manajemen SPBE serta Layanan SPBE yang telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mendukung kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk tim yang berperan penting dalam penilaian indeks SPBE. pada tahun 2022. belum ada Peraturan Daerah terkait SPBE. namun di tahun 2023 telah terbit peraturan Daerah terkait SPBE. tim terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sekretariat Daerah. Inspektorat. serta OPD lainnya yang terkait dalam mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya. selain itu Perlu keseriusan serta kerjasama seluruh Perangkat Daerah yang terkait dalam Evaluasi SPBE untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks SPBE di Kabupaten Dharmasraya adalah adopsi aplikasi dan layanan berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah. Melalui penerapan teknologi informasi. Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan efisiensi. transparansi. dan kualitas layanan publik. Beberapa program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini meliputi:

1. Implementasi Aplikasi Administrasi Publik: Penggunaan aplikasi administrasi publik memungkinkan perangkat daerah untuk mengelola data. proses administrasi. dan layanan publik secara lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kepegawaian. keuangan. perizinan. dan layanan publik lainnya.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik. Melalui pelatihan yang tepat. pegawai di berbagai perangkat daerah dapat memahami dan menggunakan aplikasi tersebut secara efektif.
3. Penyediaan Infrastruktur TIK: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mendukung penggunaan aplikasi dan layanan berbasis elektronik. Ini termasuk penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.

4. Monitoring dan Evaluasi: Pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi dan layanan berbasis elektronik tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan evaluasi, Kabupaten Dharmasraya dapat mengidentifikasi kendala, masalah, dan area yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut.

61. INDEKS PROFESIONALISME ASN

INDEKS PROFESIONALISME ASN

= PENILAIAN KUALITAS ASN BERDASARKAN KESESUAIAN KUALIFIKASI, KOMPETENSI, KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

= 82.77

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi, integritas, etika kerja, kedisiplinan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan kerja.

Tingkat profesionalisme ASN pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memiliki ASN yang profesional, pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap Indeks Profesionalisme ASN merupakan bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

62. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
58.04	71.7	82.77	115.44%	Memuaskan	77	107.49

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2025

Tabel 2.68
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	62	62.86	101.40%	→	Memuaskan
2022	65	71.7	110.30%	↑	Memuaskan
2023	71.7	71.7	100%	↓	Sangat Berhasil
2024	71.7	82.77	115.44%	↑	Memuaskan

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2025

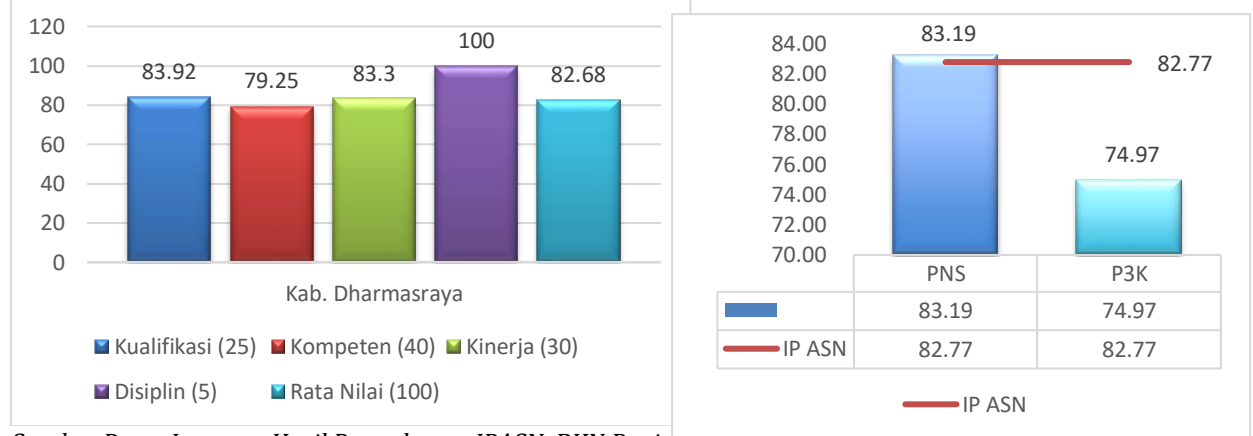
Tabel 2.69
Indeks Profesionalisme ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2024

No	Nama Instansi	Σ ASN	Kualifikasi (25)	Kompeten (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Kota Padang Panjang	1.822	21.59	33.3	25.03	5	84.92	tinggi
2	Kab. Tanah Datar	4.566	21.95	32.1	25	5	84.05	tinggi
3	Kab. Sijunjung	3.399	20.85	32.3	25	5	83.15	tinggi
4	Kab. Dharmasraya	3.188	20.98	31.7	25	5	82.68	tinggi
5	Kota Solok	1.942	22.23	29.89	24.98	5	82.1	tinggi
6	Kota Padang	7.678	21.63	27.77	25	5	79.4	sedang
7	Kab. Pasaman Barat	5.441	21.72	27.83	24.65	5	79.2	sedang
8	Kab. Pesisir Selatan	7.279	21.78	27.69	24.53	5	79	sedang
9	Kab. Agam	5.996	20.87	27.95	25	5	78.82	sedang
10	Kab. Pasaman	6.14	21.48	27.7	24.5	5	78.68	sedang
11	Kota Sawahlunto	1.983	21.72	26.89	24.98	5	78.59	sedang
12	Kota Payakumbuh	2.638	21.46	26.95	25.1	5	78.51	sedang
13	Kab. Solok	4.931	21.76	27.24	24.5	5	78.5	sedang
14	Kab. Solok Selatan	3.169	21.05	27.6	24.55	5	78.2	sedang

15	Kab. Padang Pariaman	5.301	21.46	25.19	25.1	5	76.75	sedang
16	Kab. Kep. Mentawai	2.583	21.37	21.96	21.63	5	69.97	sedang
Provinsi Sumatera Barat		16.67	21.49	28.91	24.98	5	80.38	Sedang

Sumber Data: Laporan Hasil Pengukuran IPASN, BKN Regional XII .2024

Grafik 0.14 Komponen Penilaian IP ASN dan Kabupaten Dharmasraya Tahun Tahun 2024



Sumber Data: Laporan Hasil Pengukuran IPASN, BKN Regional XII .2024

63. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai indikator kinerja indeks profesionalitas ASN. dapat di simpulkan penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator antara lain

1. Kualifikasi ASN sudah bertambah
2. Kompetensi ASN sudah meningkat
3. Kinerja ASN sudah Profesional
4. Kedisiplinan ASN sudah patuh dan taat

Selain keberhasilan pencapaian. terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain keterbatasan Anggaran untuk meningkatkan Kualitas. Kompetensi. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN. Dari masalah yang teridentifikasi. dapat disusun solusi antara lain Meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menambah Alokasi Anggaran untuk meningkatkan Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN.

Pencapaian ini didukung oleh profesionalisme ASN baik PNS maupun P3K di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara umum serta pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia, kegiatan tersebut antara lain Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional.

Kepemimpinan dan Pra jabatan. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dan Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

SASARAN STRATEGIS 4.1.3 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

64. PUBLIK SERVICE INDEKS

PUBLIK SERVICE INDEKS
= PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA
=3.21

Indeks Publik Service Indeks merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan seberapa baik pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indeks ini dapat diukur melalui berbagai parameter. seperti ketersediaan layanan. waktu respons. kepuasan pelanggan. dan efisiensi biaya.

Dengan mengamati dan menganalisis Indeks Publik Service Indeks. pemerintah dan lembaga publik dapat mengidentifikasi area-area di mana layanan publik dapat ditingkatkan. serta membuat kebijakan dan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu. Indeks Publik Service Indeks merupakan alat penting dalam pengukuran dan peningkatan kualitas layanan publik yang memainkan peran krusial dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

65. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.70
Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2.85	3.21	3.21	100%	Memuaskan	3.4	94.41

Sumber Data : Kepmenpan RB No.659/2024 diolah oleh Bagian Organisasi.2024

Tabel 2.71
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2024 dengan
Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

2022	2.94	2.94	100%	→	Sangat Berhasil
2023	3.02	3.93	129.70%	↑	Memuaskan
2024	3.12	3.86	123.70%	↓	Memuaskan
2024	3.21	3.21	100%	↓	Sangat Berhasil

Sumber Data : Bagian Organisasi. 2024

66. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel 2.72
Hasil IPP 2024 Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	IPP DINSOS	IPP RSUD	IPP DUKCAPIL	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1	Kota Payakumbuh	4.51	4.48	4.48	4.5	A-
2	Kab. PESISIR SELATAN	4.53	4.39	4.47	4.46	A-
3	Kab. SOLOK	4.51	4.32	4.55	4.46	A-
4	Kab. SIJUNJUNG	4.41	4.42	4.25	4.36	A-
5	Kota Pariaman	4.22	4.21	4.21	4.32	A-
6	Kab. PADANG PARIAMAN	4.23	4.47	4.17	4.29	A-
7	Kab. LIMA PULUH KOTA	4.52	4.32	3.96	4.27	A-
8	Kab. TANAH DATAR	3.86	4.4	4.53	4.26	A-
9	Kota Padang Panjang	3.51	4.45	4.45	4.17	A-
10	Kab. PASAMAN	3.68	4.16	4.54	4.13	A-
11	Kota Bukittinggi	3.62	4.44	4.44	4.13	A-
12	Kota Solok	3.9	NA	4.26	4.08	A-
13	Kab. SOLOK SELATAN	3.52	4.22	3.77	3.84	B
14	Kab. PASAMAN BARAT	3.57	3.16	3.77	3.5	B-
15	Kota Padang	2.98	3.52	3.68	3.44	B-
16	Kab. Kepulauan Mentawai	3.41	3.49	2.9	3.27	B-
17	Kab. Agam	3.26	3.82	2.66	3.25	B-
18	Kab. Dharmasraya	4.2	2.41	3.03	3.21	B-
19	Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	NA
Provinsi Sumatera Barat		2,83	4,49	3,59	3,64	B

67. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT = Hasil dari Survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya
IKM Konversi = IKM Unit Pelayanan x 21 = 84.65

68. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai Indeks Kinerja terkait Kepuasan Masyarakat. Data ini mencerminkan evaluasi kinerja suatu pemerintahan atau organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
79	84.35	84.65	100.35	Memuaskan	85	99.59

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2024 oleh BAPPERIDA

Tabel 2.74
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	80	81	101.25	→	Memuaskan
2023	81	83.7	103.33	↑	Memuaskan
2024	83.7	84.35	102.77	↓	Memuaskan
2024	84.35	84.65	100.35	↓	Memuaskan

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2024 oleh BAPPERIDA

69. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipengaruhi oleh kinerja sembilan unsur pelayanan, yaitu: (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) spesifikasi jenis produk pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta (9) sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya tiga unsur pelayanan yang memperoleh respons

dengan kategori sangat baik atau baik, yaitu unsur persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, serta biaya/tarif.

Sementara itu, unsur yang dominan terhadap belum optimal nya pencapaian IKM adalah:

(1) sarana dan prasarana, yang dikeluhkan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Camat Koto Baru, Kantor Camat Sitiung, Puskesmas Koto Baru, dan RSUD Sei Dareh; (2) kompetensi pelaksana, yang menjadi keluhan pada empat unit pelayanan publik, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, Dinas Sosial P3PPKB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) perilaku pelaksana, yang dikeluhkan pada Dinas Sosial P3PPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung; dan (4) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yang dikeluhkan pada Kantor Wali Nagari Koto Baru, Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, serta Puskesmas Koto Baru.

Sebagai upaya perbaikan, unit pelayanan publik yang masih mendapat nilai rendah dalam aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan diharapkan dapat melakukan pembenahan dengan membuka kanal pengaduan yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, diperlukan penguatan kontrak kinerja antara unit pelayanan publik dengan masyarakat melalui penerapan *citizen charter* sebagai bentuk konkret komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya lainnya mencakup peningkatan alokasi anggaran pada tiga unsur utama, yakni: (1) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (2) peningkatan kompetensi pelaksana, serta (3) perbaikan sarana dan prasarana.

Penilaian Survey Kepuasan Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan akademisi agar survey lebih reliabel, untuk pelaksanaan survey ini menggunakan anggaran pada program penelitian dan pengembangan daerah yang berfokus pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan serta pengkajian peraturan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data serta pengkajian peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp333.505.100. Realisasi anggaran yang telah dicapai adalah sebesar Rp331.361.686 atau 99,36% dari total anggaran yang dialokasikan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat adalah :

1. Transformasi pelayanan publik menuju SPBE
2. Pemanfaatan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP dalam sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik
3. Pembentukan Tim Satsus (Satuan Khusus) yang bertugas menjawab dan dan menjelaskan pengaduan. saran dan masukan yang diberikan dan dipublikasikan kembali di media sosial UPP atau media pajang luar ruang yang ada di UPP sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan pengaduan. saran dan masukan yang mereka sampaikan ke UPP
4. Kebijakan pengaturan angkutan umum dalam menjangkau UPP
5. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2019 yang menjadi panduan bagi BAPPERIDA dalam membangun kinerja maupun kualitas pelayanan publik. sekaligus menjadi pedoman publik untuk melakukan pemantauan. evaluasi. serta penilaian.
6. Reviu secara periodik dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang berkinerja rendah dan hasil reviu dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan layanan oleh UPP telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan

Hambatan yang mempengaruhi capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 :

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik. terutama pelayanan publik yang banyak dikunjungi masyarakat seperti Dinas Pendidikan. Dinas Dukcapil. Dinas PMPTSP dan layanan di Puskesmas
2. Informasi pelayanan publik yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Kualitas sarana dan prasarana di UPP belum memadai
4. Kualitas SDM UPP publik masih ada yang kurang responsif. kurang kompeten. kurang ramah serta terlalu lambat dalam melakukan pelayanan.
5. Umpan balik atau penanganan pengaduan. saran. masukan Masyarakat penggunaan layanan belum terkelola sebagaimana mestinya
6. Akses lokasi UPP susah dijangkau kendaraan umum

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja antara lain:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik dengan memanfaatkan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP seperti pemberitahuan informasi layanan melalui web UPP, facebook, dan WA pada layanan RSUD Sei. Dareh
2. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan pengadaan sarana parasana, serta optimalisasi pemeliharaan secara berkala.
3. Peningkatan kompetensi pegawai (SDM) UPP secara periodik melalui pendidikan ataupun pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPP.
4. Melengkapi seluruh kegiatan UPP dengan Standar Operation Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan
5. Melakukan perbaikan layanan sesuai hasil evaluasi dari hasil capaian IKM tahun sebelumnya

Tujuan 4.2 Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari

SASARAN STRATEGIS 4.2.1 MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI

70. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

= NILAI KETAHANAN SOSIAL YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

=0.8651

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL), yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

71. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0.8108	0.8464	0.8651	102.21%	Memuaskan	0.8607	100.51

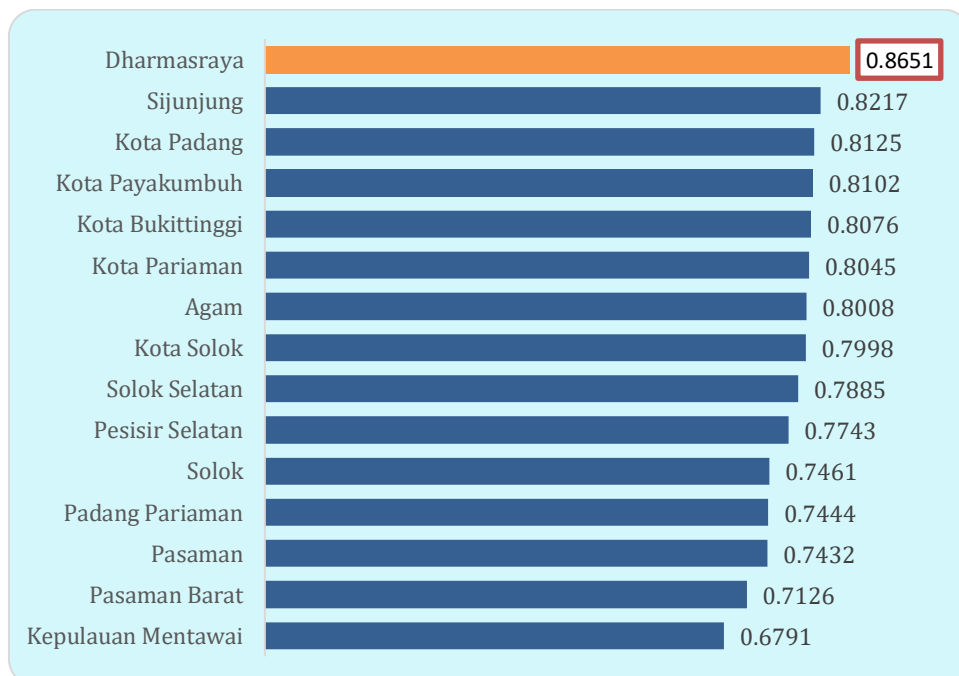
Sumber : KEMENDES DPTT diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Tabel 2.76
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.8189	0.828	101%	→	Memuaskan
2022	0.8195	0.8474	103%	↑	Memuaskan
2023	0.8354	0.8464	101.32%	↓	Memuaskan
2024	0.8464	0.8651	102.21%	↑	Memuaskan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Grafik 0.15 Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PDTT No 400/2024

72. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan penting, di antaranya :

1. Ketersediaan sarana kesehatan yang telah terpenuhi.
2. Akses pendidikan bagi jenjang PAUD dan pendidikan dasar (SD) yang sudah memadai.
3. Adanya budaya gotong royong, sikap toleransi, serta ketersediaan layanan keamanan warga seperti pos ronda dan sistem keamanan lingkungan.

4. Fasilitas MCK yang telah memenuhi standar kesehatan.
5. Ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi yang baik.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, masih terdapat kendala yang menghambat pencapaian indikator, antara lain:

1. Sebaran tenaga kesehatan (bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya) yang belum merata.
2. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.
3. Beberapa nagari masih belum memiliki akses pendidikan jenjang SMP, SMA, serta program pendidikan nonformal seperti Paket A, B, C, dan kegiatan kursus.
4. Kurangnya kelompok olahraga yang dapat mendukung kesehatan masyarakat.
5. Beberapa nagari masih memiliki akses internet yang kurang optimal di kantor wali nagari, sehingga menghambat proses entri data.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi faktor penghambat di atas. Salah satunya adalah dengan menyediakan data perkembangan Indeks Ketahanan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi bersama OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Selain itu, Dinas PMD bersama tenaga ahli juga memberikan rekomendasi mengenai aspek yang perlu ditingkatkan kepada OPD yang berwenang agar nilai Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada aspek Indeks Ketahanan Sosial, dapat meningkat. Dengan demikian, nilai IDM Kabupaten Dharmasraya dapat bertambah dan statusnya dapat naik dari Kabupaten Maju menjadi Kabupaten Mandiri.

Untuk mencapai target kinerja ini, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Nagari (PN) dan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP). Bidang PN menugaskan personel ke nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sedangkan Bidang PKP melakukan koordinasi lintas OPD dengan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, tim dari kedua bidang ini telah bekerja secara efektif dan efisien, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Bidang Pemerintahan Nagari telah melaksanakan sosialisasi serta pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa dan tata cara penyaluran Dana Desa sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar Dana Desa dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Prioritas penggunaan

Dana Desa tahun 2024 meliputi:

1. Program Padat Karya Tunai
2. Penanganan stunting
3. Ketahanan pangan
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
5. Peningkatan ekonomi melalui BUMDes/BUMNag

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melaksanakan beberapa kegiatan strategis, seperti:

1. Rapat koordinasi lintas OPD untuk percepatan pengumpulan data IDM.
2. Monitoring dan evaluasi ke kecamatan terkait entry data IDM.
3. Pendampingan kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa bersama TAPD dalam proses entry data IDM.

73. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

= NILAI INDEKS KETAHANAN EKONOMI YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA

= 0.7798

Indeks Ketahanan Ekonomi merupakan indeks kedua yang diukur untuk membentuk Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

74. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0.6917	0.7436	0.7798	104.87%	Memuaskan	0.7343	106.2

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Tabel 2.78

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

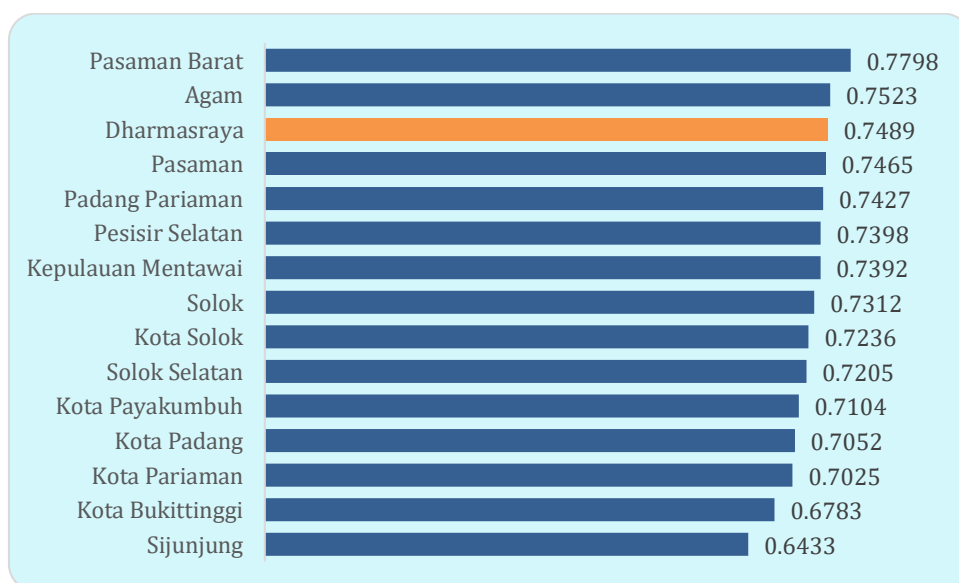
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.6986	0.7087	101%	→	Memuaskan
2022	0.7056	0.7221	102%	↑	Memuaskan
2023	0.7127	0.7436	104%	↑	Memuaskan
2024	0.7436	0.7798	104.87%	↑	Memuaskan

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

kenaikan itu terjadi pada dimensi Akses Distribusi (Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik), Akses Kredit (Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan BPR, Akses Penduduk ke Kredit).

Pada Dimensi Akses Distribusi (Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik), pada tahun 2022 baru bisa terpenuhi di 7 Nagari, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 9 nagari, kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 18. Pada Dimensi Akses Kredit, untuk item Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan BPR baru bisa terpenuhi sebanyak 16 Nagari pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 17 Nagari di tahun 2023 dan menjadi 18 Nagari pada tahun 2024. Untuk item Akses Penduduk ke Kredit pada tahun 2022 sudah terpenuhi di 20 Nagari, meningkat menjadi 21 Nagari pada Tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 28 Nagari.

Grafik 0.16 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PDTT No 400/2024

75. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator didukung faktor internal maupun eksternal yang saling berpengaruh, berbagai aspek yang berperan secara signifikan, antara lain:

1. Akses penduduk ke pusat perdagangan yang sudah memadai.
2. Tersedianya lembaga ekonomi rakyat, seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Keterbukaan akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Meskipun terdapat faktor pendukung, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian indikator, yaitu:

1. Belum tersedianya angkutan umum yang memadai.
2. Kondisi usaha kedai makan, restoran, dan perhotelan yang masih kurang berkembang.
3. Terbatasnya ketersediaan lembaga perbankan dan perkreditan.
4. Minimnya akses distribusi logistik, seperti kantor pos dan layanan jasa logistik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan menyajikan data perkembangan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan (Kumperdag) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, Dinas PMD beserta tenaga ahli juga memberikan rekomendasi terkait aspek yang perlu ditingkatkan kepada OPD yang memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya Indeks Ketahanan Ekonomi, Dinas PMD telah melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). BUMDes/BUMNag diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi serta IDM Kabupaten Dharmasraya, sehingga status Kabupaten Dharmasraya dapat meningkat dari Kabupaten Maju menjadi Kabupaten Mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai indikator ini antara lain:

1. Sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa serta tata cara penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaannya dapat lebih tepat sasaran.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yang mencakup:
 - a. Program Padat Karya Tunai
 - b. Penanganan stunting
 - c. Ketahanan pangan
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - e. Peningkatan ekonomi melalui BUMDes/BUMNag

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan menjalankan berbagai kegiatan untuk mempercepat pengumpulan dan entry data IDM, antara lain:

1. Rapat koordinasi lintas OPD guna mempercepat pengumpulan data IDM.
2. Monitoring dan evaluasi ke kecamatan, khususnya dalam proses entry data IDM.
3. Pendampingan oleh TAPD terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses entry data IDM.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pencapaian indikator kinerja dapat terus meningkat, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat mencapai status Kabupaten Mandiri dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

76. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN
 = NILAI INDEKS KETAHANAN EKOLOGI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA
 =0.7154

77. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0,5833	0.6667	0.7154	107.3	Memuaskan	0.6192	115.54

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

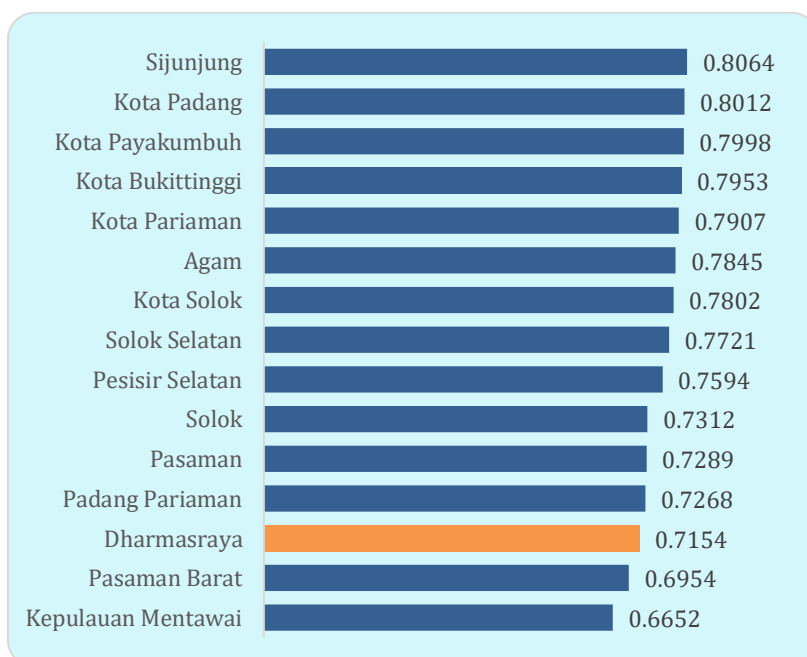
Tabel 2.80
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi /
Lingkungan Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	0.5891	0.6039	103%	→	Memuaskan
2022	0.595	0.6282	106%	↑	Memuaskan
2023	0.601	0.6667	111%	↑	Memuaskan
2024	0.6667	0.7154	107.30%	↓	Memuaskan

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2024

Peningkatan ini terjadi pada Dimensi Potensi tanggap bencana khususnya pada item penilaian Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam. Pada tahun 2022 baru 3 nagari yang memenuhi item ini, masih ada 42 nagari yang masuk dalam skala Super Prioritas dan 7 Nagari yang masuk dalam kategori Prioritas. Di tahun 2023 sudah terdapat 9 Nagari yang sudah memenuhi item ini, 35 Nagari masuk skala Super Prioritas dan 8 Nagari masuk skala Prioritas. Selanjutnya pada tahun 2024, sudah ada 13 Nagari yang memenuhi unsur item ini, dengan 24 Nagari masuk skala Super Prioritas dan 15 Nagari di skala Prioritas.

Grafik 0.17 Indeks Ketahanan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Kepmendesa PD TT No 400/2024

78. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Salah satu faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator adalah telah adanya beberapa nagari yang memiliki fasilitas mitigasi bencana, baik berupa alat keselamatan maupun jalur evakuasi bencana. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator, antara lain:

1. Masih banyak nagari yang belum memiliki fasilitas mitigasi bencana, baik berupa alat keselamatan maupun jalur evakuasi bencana.
2. Masih terdapat masyarakat yang membuka lahan baru dengan cara pembakaran, yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah menyampaikan data perkembangan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selain itu, Dinas PMD bersama Tenaga Ahli memberikan rekomendasi kepada OPD yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut mengenai item-item yang perlu ditingkatkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, sehingga nilai IDM Kabupaten Dharmasraya dapat meningkat. Dengan demikian, status Kabupaten Dharmasraya yang saat ini berstatus sebagai Kabupaten Maju dapat naik menjadi Kabupaten Mandiri.

Upaya pencapaian kinerja ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Nagari (PN) dan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP). Bidang Pemerintahan Nagari menugaskan personel ke nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sementara Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melakukan kerja sama lintas OPD dengan dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.

Di Bidang Pemerintahan Nagari, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa serta tata cara penyaluran Dana Desa sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup beberapa program utama, yaitu:

- Program Padat Karya Tunai
- Penanganan Stunting
- Ketahanan Pangan
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- Peningkatan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Sementara itu, Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya rapat koordinasi lintas OPD dalam percepatan pengumpulan data IDM, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan terkait entry data IDM, serta pendampingan terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses entry data IDM.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, diharapkan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus berlanjut, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

MISI 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)

SASARAN STRATEGIS 5.1.1 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

79. KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan (ha)}}{\text{Jumlah sisa ruang yang dapat dimanfaatkan}} * 100\%$$

$$= \frac{21.110 \text{ Ha}}{194.219 \text{ Ha}} * 100\% = 10.89\%$$

80. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat diukur melalui perbandingan antara luas rekomendasi perizinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan dan sisa ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Berdasarkan data yang tersedia, luas rekomendasi perizinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan mencapai 21.110 hektare.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023–2043, luas wilayah budidaya tercatat sebesar 270.754 hektare. Dari total tersebut, terdapat 68.633 hektare kawasan hutan produksi serta 7.905 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga sisa ruang yang masih dapat dimanfaatkan mencapai 194.219 hektare, capaian Kesesuain

pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
0	10	10.89%	108.9%	Memuaskan	35 %	31.11%

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Tabel 2.82
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2022	5%	6.40%	128%	→	Memuaskan
2023	10%	7.45%	74.50%	↓	Cukup Berhasil
2024	10%	7.74%	77.41%	↑	Cukup Berhasil
2024	10%	10.89%	108.90%	↑	Memuaskan

Sumber :Dinas PUPR Dharmasraya. 2024

Grafik 0.18 Jumlah Lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya, 2024

81. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dengan melakukan langkah seperti Ketersediaan anggaran yang mendukung. Rekomendasi tata ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

Tujuannya untuk menjamin setiap tujuan. sasaran. kebijakan dan strategi yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang (yang telah diperdakan) dapat tercapai. Setiap kegiatan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. sehingga setiap kegiatan alih fungsi

lahan harus dibarengi dengan rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Berdasarkan Permendagri 116 tahun 2007 tentang koordinasi penyelenggaraan ruang. Tugas pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya adalah :

1. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

3. Hal diatas merupakan dasar dalam setiap penerbitan rekomendasi penataan ruang.

masalah atau kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang adalah :

1. Bangunan yang belum berizin dan tidak mengajukan izin. serta tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
2. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB

Dari masalah yang ditemui, solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

Untuk mewujudkan indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan program penyelenggaraan penataan ruang dengan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang. pemberian insentif dan disinsentif. serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak

memiliki izin. dikenai sanksi administratif. sanksi pidana. dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang Perda RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031. sejalan dengan rencana tata ruang. baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut. antara lain.

1. berupa keringanan pajak.
2. pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur).
3. pemberian kompensasi. kemudahan prosedur perizinan. dan pemberian penghargaan.
4. Disinsentif dimaksudkan kepada perangkat untuk mencegah. membatasi pertumbuhan. dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. serta pengenaan kompensasi dan penalti.
5. Pengenaan sanksi. yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi. pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang. tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut. maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal. serasi. seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas. tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan. melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya. Rekomendasi Tata Ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

SASARAN STRATEGIS 5.1.2 MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

82. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait kualitas lingkungan di suatu daerah

$$IKLH = (0.376 \times 51,11) \quad (0.405 \times 91,97) \quad (0.219 \times 42.55)$$

$$IKLH = 19.22 + 37,25 + 9,32$$

$$IKLH = 65,79$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah daerah. IKLH ini mencakup berbagai aspek lingkungan hidup. seperti kualitas udara. air. tanah. keberlanjutan sumber daya alam. biodiversitas. serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

83. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
67.94	66	65.79	99.68	Sangat Baik	66.55	98.86

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2024

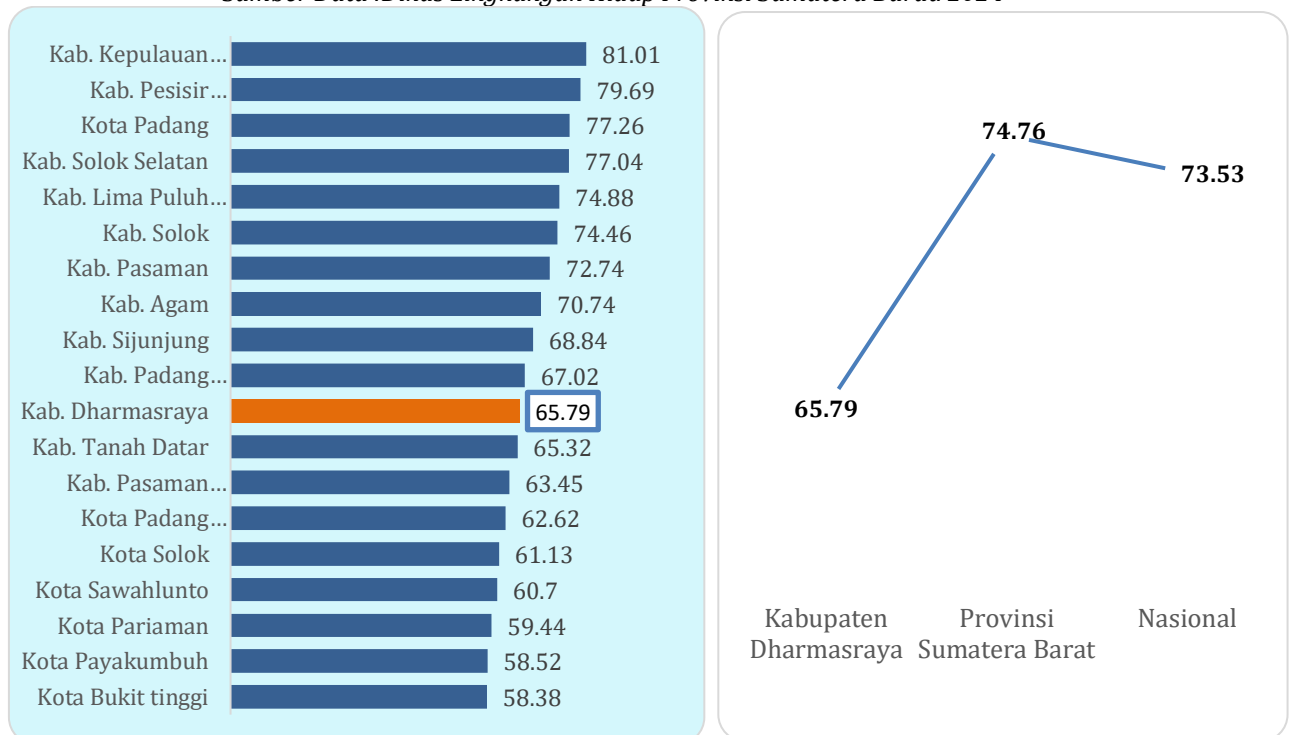
Tabel 2.84
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	64.45	61.12	94.83	→	Memuaskan
2022	64.93	63.23	97.38	↑	Memuaskan
2023	65.47	63.48	96.96	↓	Memuaskan
2024	66	65.79	99.68	↑	Memuaskan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2024

Grafik 0.19 Perbandingan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2024



Sumber :

MASUKKAN TABEL INDEKS KUALITAS AIR, UDARA DAN LAHAN

84. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Dharmasraya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Keberhasilan dalam menjaga kualitas udara yang baik di wilayah ini didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Efektivitas pengawasan terhadap industri yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
2. Keberadaan vegetasi hijau yang cukup melimpah di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, yang berperan dalam menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara.
3. Program penghijauan yang telah dilaksanakan di lingkungan perkantoran, sehingga menciptakan ruang terbuka hijau yang berkontribusi terhadap kualitas udara yang lebih baik.
4. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga vegetasi hijau di lingkungan perumahan, yang turut membantu mengurangi emisi gas pencemar udara.

Meskipun terdapat berbagai capaian positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai, seperti penambangan pasir, batu, dan emas yang dilakukan tanpa izin, yang berpotensi menyebabkan pencemaran air serta degradasi lingkungan.
2. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan sebagai penyerap karbon dan penyangga ekosistem.
3. Kurangnya sistem pengelolaan limbah domestik, di mana masih ditemukan praktik pembuangan limbah langsung ke sungai, baik berupa buang air besar sembarangan, limbah kotoran ternak (sapi dan kerbau), maupun limbah rumah tangga yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai strategi dan solusi telah dirancang guna meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta dampak negatif pencemaran.
2. Edukasi berkelanjutan terkait pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga terkait.
3. Penguatan program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah guna meningkatkan tutupan vegetasi serta memperbaiki kualitas udara dan ekosistem.

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Akreditasi laboratorium daerah, sehingga biaya pemeriksaan sampel dapat dikembalikan ke daerah sebagai sumber PAD. Dengan demikian, layanan pengujian kualitas lingkungan dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
2. Penguatan pengawasan terhadap perusahaan, terutama yang berpotensi menghasilkan limbah, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta menekan tingkat pencemaran.

Untuk memastikan implementasi strategi yang efektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, beberapa langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun pencemar udara, guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
2. Memperluas program penghijauan, dengan memberikan penyuluhan serta distribusi bibit gratis kepada masyarakat, instansi, dan sekolah, guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
3. Penerbitan surat edaran larangan penebangan pohon di sepanjang Jalan Lintas Sumatra, kawasan sekolah, serta lingkungan perumahan, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.
4. Penataan lahan tambang masyarakat, agar dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih optimal dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan implementasi strategi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, diharapkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor lingkungan dapat lebih dioptimalkan.

SASARAN STRATEGIS 5.1.3 OPTIMALISASI	PENYELENGGARAAN	PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH		

85. INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH

INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH = INDEKS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGGAMBARAKAN TENTANG TINGKAT RESIKO KEJADIAN BENCANA DI SUATU DAERAH =130.03*
--

Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD) adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang memengaruhi potensi terjadinya bencana serta dampak yang mungkin timbul.

86. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
143.2	130	130.03*	99.98	Sangat Baik	110	81.79

Ket: * Data Sementara

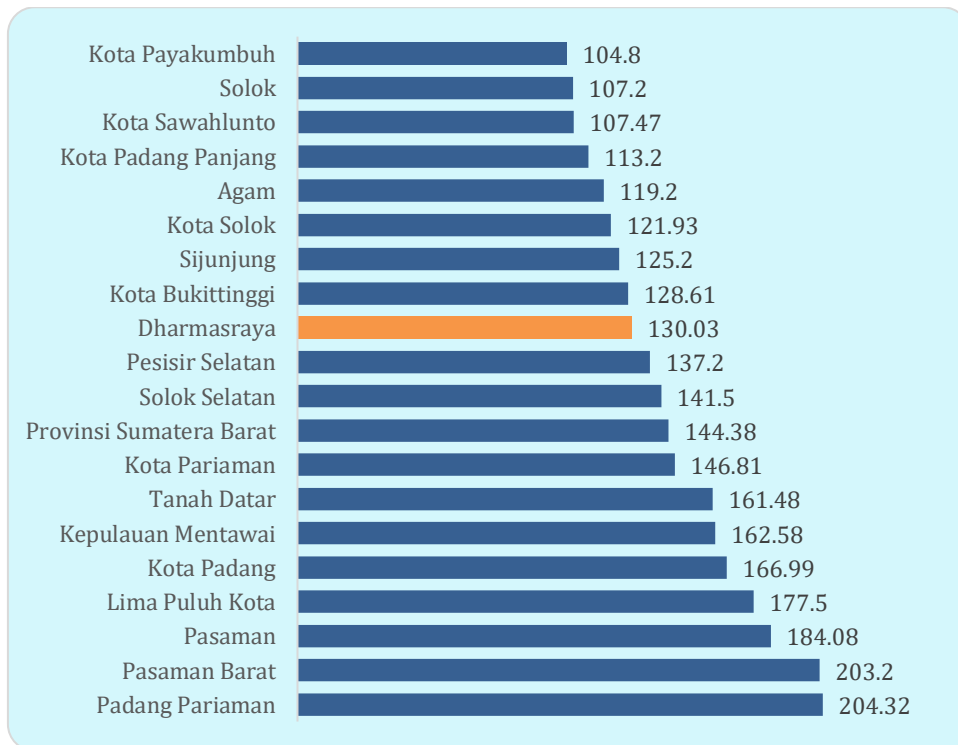
Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2024

Tabel 2.86
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2024
dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tren	Prediket
2021	135	137.2	98.37%	→	Sangat Berhasil
2022	130	137.69	94.09%	↓	Sangat Berhasil
2023	125	130.02	95.84%	↑	Sangat Berhasil
2024	130	130.03*	99.98%	↑	Sangat Berhasil

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya, 2024

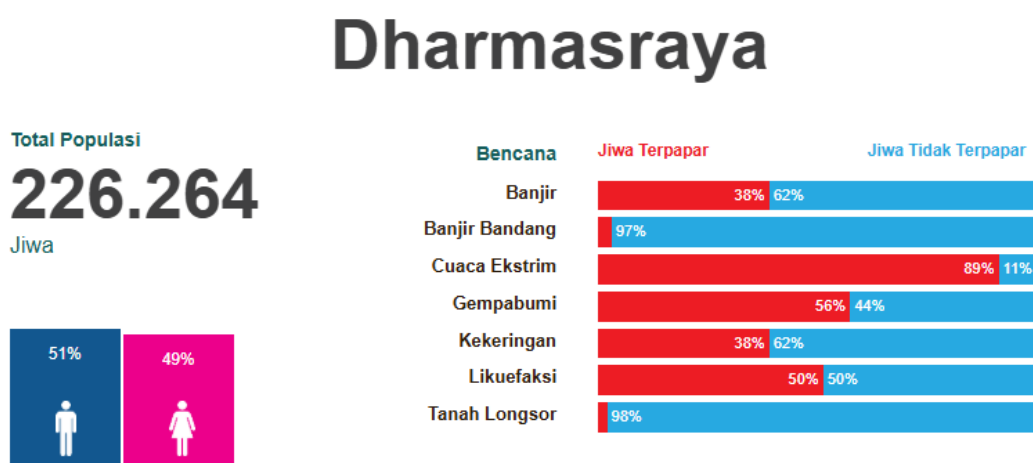
Grafik 0.20 Indeks Kualitas Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

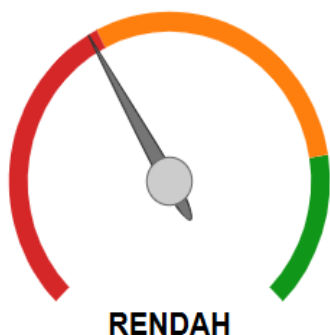
87. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Grafik 0.21 Tingkat Paparan Penduduk Dharmasraya terhadap Berbagai Bencana

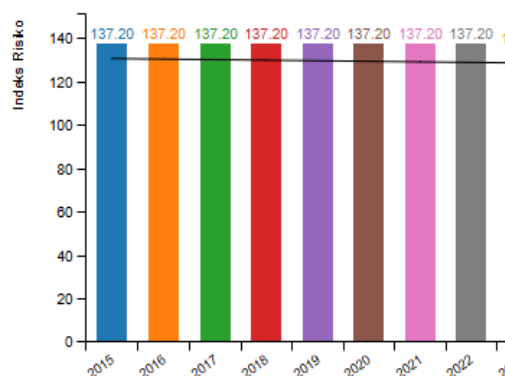


Grafik 0.22 Trend Indeks Risiko Bencana Kabupaten Dharma

Tingkat Kapasitas Daerah



Trend Indeks Risiko Bencana



Penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharma melibatkan berbagai sumber daya yang dapat berperan dalam proses pencapaian kinerja. Berikut ini beberapa sumber daya yang penting dalam pencapaian penurunan indeks risiko bencana daerah:

1. Keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana sangat penting. Pelatihan kesiapsiagaan, edukasi tentang tindakan mitigasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dapat memainkan peran kunci dalam menurunkan risiko bencana.

2. Alokasi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan program-program pengurangan risiko bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana. pengembangan sistem peringatan dini. dan rehabilitasi pasca-bencana sangat penting. Dana ini dapat berasal dari pemerintah. lembaga internasional. sektor swasta. dan sumbangan masyarakat.
3. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini. pemetaan risiko bencana. dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memprediksi. memantau. dan mengurangi dampak bencana. Teknologi juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan bencana. seperti bangunan yang dirancang untuk menahan gempa atau banjir.
4. Kerjasama antar lembaga pemerintah. organisasi non-pemerintah. lembaga riset. masyarakat sipil. dan sektor swasta sangat penting dalam mengurangi risiko bencana. Jaringan ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi. sumber daya. dan pengalaman terkait pengurangan risiko bencana.
5. Kebijakan yang kuat dan peraturan yang diterapkan secara efektif dapat mempromosikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. manajemen lahan. penggunaan sumber daya alam. dan pembangunan infrastruktur.

Kombinasi yang efektif dari sumber daya-sumber daya ini dapat membantu dalam mencapai penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya. serta meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain

1. Langkah-langkah untuk menegakkan peraturan daerah terkait pengurangan risiko bencana bisa mencakup pengawasan terhadap pembangunan yang sesuai dengan standar tahan bencana. pelaksanaan zonasi risiko bencana. dan penegakan aturan terkait penggunaan lahan yang aman dari risiko bencana.
2. Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bisa mencakup pembentukan tim pemadam kebakaran. pelatihan untuk masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran. peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran. dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.
3. Inspeksi berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran seperti hydrant. alat pemadam api. dan alarm kebakaran untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan.

4. Melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
5. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran. cara menggunakan peralatan pemadam kebakaran. serta mengorganisir komunitas untuk saling membantu dalam situasi kebakaran.
6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum di daerah. termasuk pencegahan terhadap tindak kriminal yang dapat menyebabkan kebakaran atau situasi bencana lainnya.
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Menyediakan informasi tentang potensi risiko bencana di daerah. tanda-tanda peringatan dini. dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil oleh masyarakat.
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Menyelenggarakan program pencegahan bencana seperti pelatihan evakuasi. simulasi tanggap darurat. dan kampanye kesadaran bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Memiliki rencana dan tim yang siap untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cepat dan efisien saat terjadi bencana.

88. Rekomendasi Perbaikan yang dapat dilaksanakan

Berdasarkan analisa data capaian kinerja indeks resiko bencana daerah, dapat disusun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Prioritas	Uraian
Prioritas 1	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan 5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana

	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana 7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Penguatan Forum PRB 9. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
Prioritas 2	1. Penyusunan Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan 2. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 3. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah 4. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB 5. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang, dan Berlanjut 6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 7. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik 8. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana 9. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
Prioritas 3	1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah 2. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat 3. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga 4. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana 5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana
Prioritas 4	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana 2. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah 3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 4. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana 5. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan 6. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang 7. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota di daerah berisiko banjir
Prioritas 5	1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori 2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air

	3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai 4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng 5. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Konservasi Vegetatif DAS
Prioritas 6	1. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi 2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah 3. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi 4. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah 5. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi 6. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi 7. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah 8. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi 9. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
Prioritas 7	1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana 2. Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana 3. Perencanaan Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana 4. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana 5. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana 6. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana 7. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana 8. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 9. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana 10. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan Bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat terdampak Bencana 11. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana

MISI 6. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Daerah

Tujuan 6.1 Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya

SASARAN STRATEGIS 6.1.1 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

89. PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

$$\frac{(\text{Jumlah Zakat Tahun } n - \text{jumlah zakat tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah Zakat tahun sebelumnya}} * 100\%$$

$$\text{PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT} = \frac{(5.904.401.542 - 4.945.654.119.00)}{4.945.654.119.00} * 100\% = 19.39\%$$

90. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
2	6	19.39	323.09	Memuaskan	2	969.5%

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2024

Terdapat beberapa faktor yang mungkin mendukung pencapaian ini. Pertama. upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua. adanya program-program edukasi dan promosi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga terkait. yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

Meskipun capaian ini sangat memuaskan. tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di masa mendatang. Ini termasuk upaya untuk terus meningkatkan kesadaran. pendidikan. dan kepercayaan masyarakat. serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat untuk manfaat yang maksimal bagi kaum duafa dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.88
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 2 (Dua) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2023	2	6.31	315.5%
2024	6	19.39	323.09%

Sumber Data :Baznas diolah oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2024

Tren peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. efektivitas program-program edukasi. dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Dharmasraya.

Tabel 2.89
Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya

No	PROGRAM	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	DHARMASRAYA CERDAS	1,610,278,565.00	1,732,651,500.00
2	DHARMASRAYA SEHAT	633,778,000.00	498,178,800.00
3	DHARMASRAYA MAKMUR	283,075,000.00	507,937,000.00
4	DHARMASRAYA PEDULI	1,317,834,053.00	2,074,860,255.00
5	DHARMASRAYA TAQWA	1,100,688,501.00	1,090,773,987.00
	Total	4,945,654,119.00	5,904,401,542.00

91. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan 5 Program penyaluran bantuan amil zakat yang dihimpun oleh Baznas, antara lain Dharmasraya Cerdas, Dharmasraya Sehat, Dharmasraya Makmur, Dharmasraya Peduli, Dharmasraya Taqwa, selain itu, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Mereka dapat mengkoordinasikan program-program edukasi dan promosi zakat. serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat untuk memperluas cakupan program tersebut.
2. Baznas Dharmasraya memiliki peran kunci dalam mengumpulkan. mengelola. dan mendistribusikan dana zakat. Mereka dapat mengoptimalkan upaya pengumpulan

zakat melalui program-program promosi dan edukasi. serta memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dalam agama Islam. Mereka dapat memberikan ceramah. khutbah. dan nasehat kepada jamaah untuk mendorong mereka membayar zakat secara rutin.
4. Media massa. baik cetak maupun online. dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat luas. Liputan. artikel. dan iklan yang mengangkat tema zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
5. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran tentang zakat. Mereka dapat menyelenggarakan program-program pendidikan agama yang mencakup materi tentang zakat. serta mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan membayar zakat secara konsisten.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase peningkatan zakat pada tahun 2024. serta alternatif solusi yang telah dilakukan. dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan
 - a. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi.
 - b. Efektivitas Program Promosi dan Edukasi: Program-program promosi dan edukasi yang efektif telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi.
2. Penyebab Kegagalan
 - a. Target Kinerja yang Tidak Realistis. Target kinerja awal yang ditetapkan terlalu rendah. tidak mencerminkan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
 - b. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program promosi dan edukasi tentang zakat serta dalam memastikan efisiensi pengelolaan dana zakat.
3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:
 - a. Dilakukan perubahan target kinerja agar lebih sesuai dengan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Hal ini

dilakukan untuk mencapai konsistensi antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual serta memotivasi kinerja yang lebih tinggi.

- b. Meningkatkan intensitas dan efektivitas program-program promosi dan edukasi tentang zakat untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat zakat serta meningkatkan partisipasi dalam pembayarannya.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan program promosi dan edukasi, serta memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan melakukan perubahan target kinerja yang lebih realistis dan mengoptimalkan program promosi dan edukasi serta pengelolaan dana zakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan mencapai pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Program dan kegiatan penunjang yang efektif merupakan faktor kunci dalam pencapaian indikator kinerja persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisis beberapa program dan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam mencapai target tersebut:

1. Program Edukasi Zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam dan manfaatnya bagi kaum duafa serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui seminar, ceramah, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat serta dampak positifnya bagi kesejahteraan sosial.
2. Promosi zakat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye publik lainnya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat serta memberikan informasi tentang cara pembayaran zakat yang mudah dan transparan.
3. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas Dharmasraya dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui sinergi ini, dana zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta digunakan untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang memungkinkan penghimpunan zakat langsung dari gaji ASN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ASN

dalam membayar zakat. tetapi juga menciptakan budaya dan kesadaran zakat di kalangan pegawai negeri.

5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan program-program zakat untuk memastikan efektivitas nya. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi guna meningkatkan pencapaian indikator kinerja persentase zakat di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disebutkan di atas secara terencana dan berkelanjutan. diharapkan persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat. sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

92. PERSENTASE MDA/TPA/TPSA YANG AKTIF

Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif $= \frac{\text{Jumlah MDA/TPA/TPSA yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh MDA/TPA/TPSA}} * 100\%$ $= \frac{38}{42} * 100\% = 90.48 \%$

93. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
75	90.47	90.48	100.01	Memuaskan	100	90.48%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2024

Capaian yang sangat baik ini menandakan adanya kesuksesan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA. Dengan demikian. program-program yang dilaksanakan telah efektif dalam menarik minat dan keterlibatan masyarakat. yang mungkin mencerminkan kualitas implementasi yang baik dan strategi komunikasi yang efektif. Ini adalah indikasi positif untuk keberlanjutan program-program tersebut dan menunjukkan adanya potensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.91
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase MDA/TPA/TPSA Yang Aktif
Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	77	70	90 %
2022	80	80	100 %
2023	85	90.48	106.4 %
2024	90.47	90.48	100.01%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2024

94. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai indikator persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif dapat memberikan wawasan penting dalam mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keberhasilan dalam meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sering kali tergantung pada sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam kegiatan tersebut dan seberapa aktif mereka berpartisipasi. Kegagalan dapat terjadi jika kesadaran masyarakat rendah atau jika ada hambatan yang menghalangi partisipasi aktif.
2. Kegagalan juga dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Ini bisa termasuk kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya sumber daya yang memadai, atau kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut juga tergantung pada keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kegagalan bisa terjadi jika tidak ada komitmen yang cukup dari pihak-pihak terkait atau jika tidak ada koordinasi yang baik antara mereka.
4. Faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit atau perubahan budaya di masyarakat dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif antara lain:

1. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran yang menyasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran mereka dalam MDA/TPA/TPSA dan mendorong partisipasi aktif.
2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan program-program yang ada dengan memperbaiki koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan MDA/TPA/TPSA.
4. Merancang program-program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik partisipasi masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif mencerminkan sejauh mana sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi ini meliputi:

1. Alokasi Anggaran yang Efektif untuk program-program yang bertujuan meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan yang direncanakan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, termasuk personel yang terlibat dalam pelaksanaan program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Hal ini mencakup penempatan yang tepat, pelatihan yang diperlukan, dan manajemen kinerja yang efisien.
3. Penggunaan Infrastruktur dan Teknologi yang Tepat dalam mendukung kegiatan MDA/TPA/TPSA. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang tersedia digunakan secara optimal untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.
4. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk terus memantau kinerja program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual

masyarakat.

Melalui program ini, berbagai kegiatan seperti pelatihan, ceramah, dan kegiatan sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama. Misalnya, pembentukan MDA/TPA/TPSA dilakukan dengan memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan, serta memfasilitasi kegiatan sosial yang menggalang partisipasi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkaya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Melalui pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara spiritual, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA secara keseluruhan.

Dengan demikian, program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat telah terbukti menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sambil memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 6.1.2 MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

95. JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA

JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA	=	JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA YANG DITETAPKAN OLEH SURAT KEPUTUSAN BUPATI
	=	2 Nagari

96. Analisis perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya
berdasarkan target tahun 2024

Kondisi Awal (2020)	Tahun 2024			Predikat	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian			
-	3	2	66.67	Cukup Berhasil	17	11.76%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2024

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab dari ketidaksesuaian ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.93
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya
Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1	-	0 %
2022	3	2	66.66 %
2023	4	2	50 %
2024	3	2	66.67%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2024

97. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tahun 2024 telah direncanakan untuk pembetulan Percontohan Nagari Beradat dan Berbudaya yaitu Nagari Padang Laweh dan Nagari IV Koto Pulau Punjung, namun dalam pelaksanaannya belum tercapat karena beberapa faktor yang mempengaruhi :

1. belum terdapat kesepakatan antara pemerintah daerah dan wali Nagari beserta pemangku adat yang ada di Nagari Padang Laweh dan Nagari IV Koto Pulau Punjung,
2. Indikator untuk pelaksanaan Nagari Baradat dan Berbudaya perlu disempurnakan lagi,
3. Belum terdatanya Indikator – indikator tentang yang di butuhkan dalam pembentukan Nagari Beradat dan Berbuaya.
4. Belum tersedianya anggaran Pada tahun 2024 untuk pelaksanaan Nagari Beradat dan Berbudaya

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat memberikan wawasan penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa mendatang. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

5. Salah satu penyebab utama kegagalan bisa saja terletak pada keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan nagari beradat dan berbudaya. Keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur pendukung lainnya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan upaya revitalisasi atau pemeliharaan terhadap nagari tersebut.
6. Kegagalan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya

nagari beradat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat lokal, upaya untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya akan sulit untuk berhasil.

7. Kendala administratif seperti peraturan atau regulasi yang membatasi pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya juga dapat menjadi hambatan. Proses birokrasi yang rumit atau kurangnya koordinasi antara lembaga terkait juga bisa memperlambat progres dalam mencapai target.
8. Faktor-faktor alam atau lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam menjaga dan mempertahankan nagari beradat dan berbudaya.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target jumlah nagari beradat dan berbudaya, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk program revitalisasi dan pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya.
2. Melakukan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya lokal.
3. Merevisi atau memperbarui regulasi yang menghambat pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya, serta membuat kebijakan yang mendukung pengembangan dan pelestariannya.

Analisis penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana upaya pemeliharaan dan pengembangan nagari berjalan secara optimal. Berikut adalah beberapa poin analisis yang relevan:

1. Efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari beradat dan berbudaya perlu dievaluasi.
2. Ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari harus dievaluasi.
3. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dan metode kerja dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari perlu dilakukan.
4. Analisis terhadap kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, atau institusi pendidikan juga penting.
5. Sistem monitoring dan evaluasi perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa progress dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat terukur dengan jelas.

Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran yang cukup besar. menunjukkan realisasi anggaran yang sedikit di bawah target. mengindikasikan potensi penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran yang signifikan. namun realisasi anggaran yang lebih rendah menunjukkan adanya perluasan penggunaan sumber daya yang belum optimal.

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran lebih rendah. menunjukkan realisasi anggaran yang mendekati target. menandakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu. Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan realisasi anggaran yang relatif baik. mendekati target yang telah ditetapkan. Kesimpulan nya. sementara beberapa program menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya yang diharapkan.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi program dan identifikasi potensi perbaikan akan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

A. REALISASI ANGGARAN

i. ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Tabel 2.94
LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED ANGGARAN TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		Progr am	Keg.
		PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	53,855,410,513	53,347,564,251	3	5
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	8,297,639,237	8,225,165,998	6	10
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	5,253,325,104	4,789,472,775	3	4
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	64,818,817,582	61,801,639,549	15	34
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	96,562,020,504	56,434,245,241	7	13

NO	Sasaran Strategis	Anggaran		Progr am	Keg.
		PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	659,020,650	621,556,542	2	3
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	10,680,003,271	7,845,039,187	15	22
8	Mengurangi pengangguran	1,241,310,300	1,051,284,656	6	8
9	Mengurangi kemiskinan	1,227,220,950	1,217,501,865	5	7
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	158,913,067,560	101,207,696,777	7	21
11	Birokrasi yang berkualitas	2,441,528,350	2,266,087,527	5	10
12	Pelayanan publik yang prima	2,379,253,700	2,343,754,232	7	16
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	6,101,021,552	1,296,931,320	7	27
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	10,181,473,175	4,451,313,410	6	11
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	406,896,515	364,022,266	7	8
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	7,556,080,950	7,496,945,858	7	27
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	2,231,712,300	1,114,907,441	2	2
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	10,415,553,324	10,103,011,593	5	6
	Belanja Operasional	610,119,586,442	501,436,557,432		
	TOTAL ANGGARAN	1,053,340,941,979	827,414,697,920		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2024

ii. ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN PROGRAM

Tingkat Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat dihitung menggunakan formula berikut, sebagaimana digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \left(\frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \right) \times 100$$

- **PA (Pagu Anggaran)** merupakan total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- **CK (Capaian Kinerja)** dinyatakan dalam persentase, dengan batas maksimal perhitungan sebesar 120%.
- **RA (Realisasi Anggaran)** adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan, tingkat efisiensi memiliki rentang nilai antara **-20% hingga 20%**, di mana:

- Nilai **positif** menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, yaitu capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi.
- Nilai **negatif** mengindikasikan adanya ketidakefisienan, yakni penggunaan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Tabel 2.95
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	99.06	94.21	-4.85	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	99.13	97.07	-2.06	Tidak Efisien
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	91.17	91.11	-0.06	Tidak Efisien
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95.35	102.78	7.44	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	58.44	102.38	20.00	Efisien
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	94.32	100.27	5.95	Efisien
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	73.46	107.32	33.86	Efisien
8	Mengurangi pengangguran	84.69	86.42	1.72	Efisien
9	Mengurangi kemiskinan	99.21	101.48	2.27	Efisien
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	63.69	96.80	33.11	Efisien
11	Birokrasi yang berkualitas	92.81	121.50	28.69	Efisien
12	Pelayanan publik yang prima	98.51	100.18	1.67	Efisien
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	21.26	104.79	83.54	Efisien
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka	43.72	108.69	64.97	Efisien

NO	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
	mewujudkan pembangunan berkelanjutan				
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	89.46	99.68	10.22	Efisien
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	99.22	99.98	0.76	Efisien
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	49.96	211.55	161.59	Efisien
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	97.00	66.67	-30.33	Tidak Efisien
	Total	80.58	105.16	22.97	Efisien

Sumber : Badan Keuangan Daerah Dharmasraya diolah oleh Bagian Organisasi

iii. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Tabel 2.96
Laporan Keuangan Unaudited Anggaran Tahun 2024

URAIAN		Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	26,432,781,411.00	25,087,546,325.58	94.91
	Pendapatan Retribusi Daerah	78,258,242,617.00	65,934,612,330.00	84.25
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,347,929,006.00	5,347,929,006.00	100.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,199,230,000.00	12,007,270,531.21	98.43
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	122,238,183,034.00	108,377,358,192.79	88.66
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	11,920,351,000.00	14,676,153,000.00	123.12
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18,103,314,000.00	22,402,073,000.00	123.75
	Dana Alokasi Umum (DAU)	519,999,606,000.00	512,944,707,932.00	98.64

URAIAN		Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	170,139,551,644.00	166,360,138,484.00	97.78
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	720,162,822,644.00	716,383,072,416.00	99.48
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
	Dana Insentif Daerah	20,744,862,000.00	20,745,042,000.00	100.00
	Dana Desa	55,320,687,000.00	55,320,687,000.00	100.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	76,065,549,000.00	76,065,729,000.00	100.00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	796,228,371,644.00	792,448,801,416.00	99.53
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84,698,208,159.00	58,241,057,201.00	68.76
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	84,698,208,159.00	58,241,057,201.00	68.76
	Total Pendapatan Transfer	880,926,579,803.00	850,689,858,617.00	96.57
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	100,000,000.00	71,350,441.00	71.35
	Pendapatan Dana Darurat			
	Pendapatan Lainnya	11,764,153,215.00	11,690,998,858.00	99.38
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	11,864,153,215.00	11,762,349,299.00	99.14
	JUMLAH PENDAPATAN	1,015,028,916,052.00	970,829,566,108.79	95.65
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	469,211,518,709.00	454,925,701,972.94	96.96
	Belanja Barang dan Jasa	324,625,008,037.00	304,013,952,063.19	93.65
	Bunga	-		
	Subsidi	-		
	Hibah	34,593,015,000.00	34,253,926,757.00	99.02
	Bantuan Sosial	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	828,429,541,746.00	793,193,580,793.13	95.75

URAIAN		Tahun 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
	BELANJA MODAL			
	Tanah			
	Peralatan dan mesin	27,871,180,864.00	24,238,374,788.00	86.97
	Gedung dan Bangunan	35,814,155,477.00	28,954,072,575.16	80.85
	Jalan, irigasi dan jaringan	45,373,640,452.00	45,054,989,838.00	99.30
	Aset Tetap lainnya	3,812,797,200.00	3,810,397,200.00	99.94
	Aset lainnya	131,674,000.00	131,000,000.00	99.49
	Jumlah Belanja Modal	113,003,447,993.00	102,188,834,401.16	90.43
	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	2,485,520,287.00	82.85
	Jumlah Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	2,485,520,287.00	82.85
	JUMLAH BELANJA	944,432,989,739.00	897,867,935,481.29	95.07
	TRANSFER			
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA			
	Bagi Hasil Pajak	2,651,291,150.00	1,809,666,373.00	68.26
	Bagi Hasil Retribusi	269,402,000.00	174,703,451.00	64.85
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	113,330,772,640.00	113,330,772,640.00	100.00
	Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	116,251,465,790.00	115,315,142,464.00	99.19
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,060,684,455,529.00	1,013,183,077,945.29	95.52

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Unaudited Kabupaten Dharmasraya tahun



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan dilaksanakan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat menugaskan daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan.
2. Pemerintah provinsi menugaskan kabupaten, kota, dan/atau desa.
3. Pemerintah kabupaten atau kota menugaskan desa.
4. Daerah yang ditugaskan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Tugas pembantuan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Tugas pembantuan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kualitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas.
7. Tugas pembantuan dilaksanakan dengan memperhatikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.
8. Tugas pembantuan dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien.

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, juga diselenggarakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2025 Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian, sebagai berikut:

1. Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja, dari Direktorat Pelatihan dan Produktivitas UPTP Balai Latihan Kerja Padang yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Sungai Dareh pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan anggaran Rp1.473.200.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*);
2. Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja (Padat Karya) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan anggaran Rp520.000.000,00 (*lima ratus dua puluh juta rupiah*);
3. Tugas Pembantuan Bidang Pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dengan total anggaran Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);

4. Tugas Pembantuan Bidang Pertanian yang berasal dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Satker Distanhorbun (08) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dengan total anggaran Rp1.308.800.000,00 (*satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya

A. Target Kinerja

Target Kinerja adalah target program kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya melaksanakan tugas pembantuan yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tugas pembantuan yang dilaksanakan pada bidang urusan Direktorat Jenderal Bina Perluasan Kesempatan Kerja dan Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Tugas pembantuan pada bidang urusan Direktorat Jenderal Bina Perluasan Kesempatan Kerja meliputi kegiatan Penerimaan Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahap Kedua Tahun 2023.

Tugas pembantuan Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja meliputi kegiatan Penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Tenaga Kerja Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Dengan jumlah penerima sebanyak 24 orang pada tahun 2024. Kegiatan tugas pembantuan pada bidang Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dilakukan dalam bentuk transfer uang ke kelompok TKMP penerima.

Adapun yang menjadi target program/kegiatan dan anggaran pada tugas pembantuan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

No	Bidang	Program,Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran
1	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Padat Karya Infrastruktur	Nagari Sitiung (Jorong Piruko Timur)	30 Pekerja	100.000.000
		2. Padat Karya Infrastruktur	Nagari Sitiung (Jorong Piruko Utara)	30 Pekerja	100.000.000
		3. Padat Karya Infrastruktur	Nagari Sungai Kambut	30 Pekerja	100.000.000
		4. Padat Karya Infrastruktur	Nagari Gunung Selasih	30 Pekerja	100.000.000
2	Kementerian Ketenagakerjaan	5. Penciptaan Wirausaha TKMP	Dharmasraya		120.000.000
Jumlah					520.000.000

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan adalah perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai dalam satu tahun anggaran . Untuk capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan ini dapat dilihat dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk capaian kinerja Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja (Padat Karya) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan alokasi anggaran Rp520.000,000,00 (*lima ratus dua puluh juta rupiah*) telah terealisasi 100 persen, ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi / Penerima	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
.	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Peluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/539/PK.03.00/IX/2024 Tentang Penerima Bntuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahap Pertama Tahun 2024	Padat Karya Infrastruktur Output : 1 Paket	Nagari Sungai Kambut	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	100.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100 %	100	
		1. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Peluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/628/PK.03.00/X/2024 Tentang Penerima Bntuan	Padat Karya Infrastruktur Output : 1 Paket	Nagari Gunung Selasih	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	100.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
			Padat Karya Infrastruktur Output : 1 Paket	Nagari Sitiung (Jorong Piruko Timur)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	100.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
			Padat Karya Infrastruktur Output : 1 Paket	Nagari Sitiung (Jorong Piruko Utara)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	100.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi / Penerima	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahap Kedua Tahun 2024									
		1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerj aNomor 3/433/PK.03.03 /VIII/2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah Program Ketenaga Kerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun2024. Output : 15 kelompok TKMP	Efrizal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Rudi Jenutra	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Edo Mire	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Afdhal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Mala Afriani	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Netti Herawati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Aprah Fadilah Agustina	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Indra Yeni	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Yeni Marlina	Dinas Tenaga	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi / Penerima	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tahap 1 Tahun 2024	Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun2024. Output : 9 kelompok TKMP		Kerja dan Transmigrasi				Dilaksanakan 100%		
		2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerj aNomor 3/538/PK.03.03 /IX/2024 Tentang Penerima Bantuan Pemerintah		Endang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Yelsi Nofrita	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Bryan Djodi Prasatya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Tri Pujiyanto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Ika Ratih Gusniawati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Roza Marnida	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Rizki Linansyah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Mimi Ardila	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Miriya Wati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Riza Andriani	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Metri Ronaldi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Silvia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
			Sari Cahaya Murni	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100		

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi / Penerima	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Program Ketenaga Kerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahap II Tahun 2024		Erdawati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
				Mery Liana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.000.000	5.000.000	100	Kegiatan Sudah Dilaksanakan 100%	100	
	Jumlah					520.000.000	520.000.000	100			

3.3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

A. Target Kinerja

Target Kinerja adalah target program kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melaksanakan tugas pembantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan yang dilaksanakan bersumber dari bidang urusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas pembantuan pada bidang urusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. Tugas pembantuan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian meliputi Rehabilitasi jaringan irigasi.

Tugas pembantuan yang dilaksanakan bersumber dari tugas pembantuan pusat dan tugas pembantuan provinsi.

Penyaluran tugas pembantuan urusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa bantuan alsin pasca panen dilakukan dalam bentuk transfer barang ke kelompok penerima, penyaluran Tugas pembantuan pada bidang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dilakukan dalam bentuk transfer uang ke kelompok tani penerima dan penyaluran Tugas Pembantuan pada bidang Direktorat Jenderal Hortikultura dalam bentuk transfer uang ke kelompok tani. Adapun yang menjadi target program/kegiatan dan anggaran pada tugas pembantuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Bidang	Program/Kegiatan	Target	Anggaran
1	Satker Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	3 Unit	225,000,000
2	Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	2. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan - Benih Padi - Benih Padi (kegiatan pompanisasi) - Pestisida (Kegiatan Pompanisasi)	1084 ha (27.100 Kg) 429 ha (10.725 Kg) 1.287 Liter	-
		3. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	2 Unit	
		4. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Insektisia - Pupuk NPK	1000 L 50.000 Kg	
Jumlah				225,000,000

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan adalah perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai dalam satu tahun anggaran . Untuk capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan ini dapat dilihat dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Tugas Pembantuan Bidang Pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dengan total anggaran Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) telah terealisasi 100 persen, ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementrian Pertanian										
	A. Satker Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian	1. Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.4/KPTS/SR.120/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Desember 2023	A. Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1. Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Output : 3 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang terlaksana Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Dharmasraya	Dinas Pertanian						
						225.000.000	225.000.000	100	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier (3 unit)	100	Kelompok Penerima : 1. Kelompok Tani Ikrar Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh 2. Kelompok Tani Sido Lancar Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											3. Kelompok Tani Adil Makmur Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak
	B. Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 169/HK.310/C/12/2023 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2024 2. Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 45/HK.310/C/3/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 169/HK.310/C/12/2	A. Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dharmasraya	Dinas Pertanian						
			Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Pangan Berkualitas								
			Output : Tersalurnya bantuan benih padi								
			Rincian Kegiatan : Penyaluran bantuan benih pada kepada kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya seluas 1.084 ha (27.100 Kg)			-	-	100	Penyaluran bantuan benih padi kepada kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya seluas 1084 Ha (27.100Kg)	100	Rincian Penerima bantuan benih padi sebagai berikut: a. Pulau Punjung sebanyak 6 Kelompok Tani dengan Luas 132 Ha (3.300 Kg) b. Koto Besar sebanyak 2 Kelompok Tani dengan Luas 4 Ha (100 Kg) c. Tiumang sebanyak 24 Kelompok Tani



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		023 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2024 3. Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 163/HK.310/C/12/2 023 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Tahun Anggaran 2024									dengan Luas 446 Ha (11.150 Kg) d. Koto Salak sebanyak 13 Kelompok Tani dengan Luas 240 Ha (6.000 Kg) e. Sitiung sebanyak 1 Kelompok Tani dengan Luas 20 Ha (500 Kg) f. Sembilan Koto sebanyak 8 Kelompok Tani dengan Luas 83 Ha (2.075 Kg) g. Padang Laweh sebanyak 9 Kelompok Tani dengan Luas 159 Ha (3.975 Kg)
			Output : Tersalurnya bantuan benih padi dan pestisida (kegiatan pompanisasi)								
			Rincian Kegiatan : Penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya seluas 429 Ha (			-	-	100	Tersalurnya bantuan benih padi dan pestisida (kegiatan pompanisasi)	100	Rincian Penerima bantuan benih padi sebagai berikut: a. Koto Salak sebanyak 1 Kelompok Tani dengan Luas 24 Ha



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			10.725 Kg dan Pestisida 1287 Liter)								(600Kg benih; 72 liter pestisida) b. Sitiung sebanyak 4 Kelompok Tani dengan Luas 44 Ha (1.100 Kg; 132 liter pestisida) c. Sembilan Koto sebanyak 6 Kelompok Tani dengan Luas 55 Ha (1.375 Kg;165 liter pestisida) d. Timpeh sebanyak 6 Kelompok Tani dengan Luas 138 Ha (3.450 Kg; 414 liter pestisida) e. Pulau Punjung sebanyak 11 Kelompok Tani dengan Luas 156 Ha (3900Kg; 468 liter pestisida) f. Koto Besar sebanyak 1 Kelompok Tani dengan Luas 12 Ha (300 Kg;36 liter pestisida)
			B. Program : Nilai Tambah Daya Saing Industri	Dharmasraya	Dinas Pertanian						



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan								
			Output : Jumlah Bantuan Alsin Pasca Panen sebanyak 2 Unit								
			Rincian Kegiatan : Penyaluran 2 unit Alsin Pasca Penen Combine Harvester Besar di kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya			-	-	100	Jumlah Bantuan Alsin Pasca Panen sebanyak 2 Unit	-	Kelompok Penerima : 1. Keltan Makmur Nagari Batu Rijal Kec. Padang Laweh 2. Keltan Cermat Nagari Tiumang Kec. Tiumang
			C. Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dharmasraya	Dinas Pertanian			-	Terselurnya bantuan Alsin Pasca Panen sebanyak 2 unit Power Tresher Multi Guna Mobile	100	Kelompok Penerima : 1. Kelompok Tani Subur Jaya Nagri Sitiung Kec. Sitiung 2. Kelompok Tani Ranah Makmur Saiyo Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia								
			Output : Peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman								
			Rincian Kegiatan : Penyaluran bantuan pemerintah kegiatan Biofortifikasi (Pestisida 1000 Liter, Pupuk NPK 50.000 Kg)			-	-	100	Peningkatan kapasitas produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman	100	Rincian Penerima bantuan benih padi sebagai berikut: a. Koto Baru sebanyak 8 Kelompok Tani dengan Luas 110 Ha (220 Liter pestisida; 11.000 Kg pupuk) b. Koto Salak sebanyak 24 Kelompok Tani dengan Luas 390 Ha (780 Liter pestisida; 39.000 Kg pupuk)
Jumlah						225.000.000	225.000.000				





3.3.3 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Dharmasraya

A. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya pada bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi. Tugas pembantuan pada bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi meliputi kegiatan Pemberian Pelatihan dari Berbagai Kejuruan yang ada di UPT BLK Sungai Dareh dibawah naungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Provinsi dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memberikan pelatihan kepada pencari kerja.

Adapun yang menjadi target program/kegiatan dan anggaran pada tugas pembantuan ini berupa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Sub Kejuruan	Jumlah Paket	Jumlah Peserta	Ket
1.	Asisten Pembuatan Pakaian	5	80	
2.	Practical Office Advance	5	80	
3.	Pembuatan Roti dan Kue	4	64	
4.	Pengoperasian Mesin Bubut	1	16	
5.	Fillet Welder	2	32	
6.	Service Sepeda Motor Injeksi	3	48	
7.	Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras	1	16	
Total		21	336	

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan adalah perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai dalam satu tahun anggaran . Untuk



capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan ini dapat dilihat dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja, dari Direktorat Pelatihan dan Produktivitas UPTP Balai Latihan Kerja Padang yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Sungai Dareh pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya dengan anggaran Rp1.473.200.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) telah terealisasi 100 persen, ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang Tenaga Kerja Direktorat Pelatihan dan Produktivitas UPTP Balai Latihan Kerja Padang	Surat Pengesahan Datar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor SP-DIPA 026.13.2.089378/2022 Tanggal dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tanggal	Program peningkatan produktivitas pencari kerja	Dharmasraya	Dinas	1.473.200.000,00	1.473.200.000,00	100	Terlaksananya	100	
					Transmigrasi dan Tenaga Kerja (UPT BLK Sungai Dareh)				Kegiatan Pelatihan Sebanyak 21 Paket		

3.3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

A. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya pada bidang urusan tanaman pangan dan urusan prasarana dan sarana pertanian. Tugas pembantuan pada bidang urusan tanaman pangan meliputi kegiatan kegiatan Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan dan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan.

Tugas pembantuan pada bidang urusan prasarana dan sarana pertanian meliputi kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, Fasilitas Pupuk Bersubsidi, Fasilitas Pembiayaan Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan Tugas pembantuan pada bidang urusan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk kegiatan fisik dilakukan dalam bentuk transfer uang ke kelompok tani penerima.

Tabel 3.7
Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Bidang	Kegiatan	Target	Anggaran
1	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian		
		- Pembangunan irigasi perpompaan besar	3 Unit	338.400.000
		- Pembangunan irigasi perpipaan	10 Unit	940.000,000
		2. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	1 pkt	10,000,000
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1 pkt	20,400,000
2	Bidang Tanaman Pangan	1. Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan	200 Ha (3.000 Kg)	-
		2. Mandiri Benih Tanaman Pangan	25 ha	-
Jumlah				1,308,800,000

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan adalah perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan ini dapat dilihat dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan total anggaran Rp1.308.800.000,00 (*satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), telah terealisasi 99,99 persen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
Yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Panga dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08) Nomor 500.6.5/16/BMSPP/DPTP H/X-2024 Tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Perpipaan Mendukung Penambahan Areal Tanam Provinsi	A. Program : Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dharmasraya	Dinas Pertanian						
			1. Kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian								
			Output : Terlaksananya irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit dan irigasi perpipaan sebanyak 10 unit								
			Rincian Kegiatan :								
			a. Pembangunan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (3 Unit)			338.400.000	338.400.000	100	Terlaksananya irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 3 unit	100	Kelompok Penerima : 1. Sawah Padang Nagari Gunung Selasih

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor : 902/2523/Satker Disbuntanhort(08)/2024									2. Malalo Indah Nagari Gunung Selasih 3. Danau Indah Nagari Taratak Tinggi
		2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Panga dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08) Nomor 500.6.5/15/BMSPP/DPTP H/X-2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat Dana ABT Mendukung Penambahan Areal Tanam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024	b. Pembangunan Irigasi Perpipaan (10 Unit)			940.000.000	940.000.000	100	Terlaksananya Pembangunan Irigasi Perpipaan (10 Unit)	100	Kelompok Penerima : 1. Sungai Kalamboi Nagari Gunung Selasih 2. Balik Parit Setia Nagari Gunung Selasih 3. Durian Takuk Rajo Nagari Pulau Mainan 4. Margo Mulyo Nagari Sialang Gaung 5. Pulau Durian Nagari Sitiung 6. Rengas Jaya Nagari Sitiung 7. Tabek Sijawi Nagari Siguntur 8. Pugoan Tani Nagari Sikabau 9. Usaha Karya Nagari Banai 10. Tunas Harapan Nagari Koto Nan Empat Dibawuh
		3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Panga dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08) Nomor 902/3737/SATKER DISBUNTANHOR (08)/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman	2. Kegiatan : Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian								

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengesahan Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat Mendukung Penambahan Areal Tanam (PAT) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 Nomor : 902/1469/SATKER DISTANHORTBUN (08) 2024 4. Petunjuk Operasional Kerja (POK) 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (08) Tahun Anggaran 2024	Output : Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian (1 paket)								
			Rincian Kegiatan : Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian			10.000.000	9.880.000	98.80	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian	100	
			3. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian								
			Output : Terpenuhinya operasional pengelolaan Kegiatan (1 Paket)								
			Rincian Kegiatan : operasional pengelolaan kegiatan			20.400.000	20.400.000	100	terpenuhinya operasional pengelolaan kegiatan	100	
2.	Bidang Tanaman Pangan	1. Petunjuk Operasional Kerja (POK) 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana	1. Program : Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Dharmasraya	Dinas Pertanian						

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pertanian Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (03) Tahun Anggaran 2024	Kegiatan : Pengelolaan Sistem perbenihan tanaman pangan								
			Output : Tersalurnya bantuan benih jagung								
			Rincian Kegiatan : Penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani di kabupaten Dharmasraya seluas 200 Ha (3.000 Kg)			-	-	100	Tersalurnya bantuan benih jagung sebanyak 200 Ha (3.000 Kg)	100	Rincian Penerima Bantuan benih padi sebagai berikut : a. Sungai Rumbai sebanyak 1 kelompok tani dengan luas 30 Ha (450 Kg) b. Asam Jujuhan sebanyak 4 Kelompok tani dengan luas 30 Ha (450 Kg) c. Padang Laweh sebanyak 2 kelompok tani dengan Luas 25 Ha (3.75 Kg) d. Tiumbang sebanyak 1 Kelompok Tani dengan Luas 30 Ha (450 Kg) e. Sitiung sebanyak 2 Kelompok Tani dengan luas 23 Ha (345 Kg)

No	Bidang URS	Dasar Pelak- naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa- na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											f. Koto Baru sebanyak 2 kelompok tani dengan luas 32 (480 Kg) g. Pulau Punjung sebanyak 2 kelompok tani dengan luas 30 Ha (450 Kg)
			2. Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dharmasraya	Dinas Pertanian						
			Kegiatan : Mandiri Benih Tanaman Pangan								
			Output : Tumbuh dan berkembangnya petani produsen benih dalam rangka penyediaan benih tanaman pangan secara insitu								
			Rincian Kegiatan : Terlaksananya kegiatan mandiri benih tanaman pangan 25 ha			-	-	100	Tumbuh dan berkembangnya petani produsen benih dalam rangka penyediaan benih tanaman pangan secara insitu	100	Kelompok Penerima : 1. Candi Karya Nagari Sungai Daerah Kec. Pulau Punjung (7 Ha) 2. Candi Lubuk Biti Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung (12 Ha)

No	Bidang URS	Dasar Pelaksa naan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksa na TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											3. Karya Nagari Siguntur Kec. Sitiung (6 Ha)
Jumlah						1.308.800.000	1.308.680.000	99,99			



3.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut

3.4.1 Permasalahan

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik yang diterima dari pusat maupun dari provinsi sebagai berikut:

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Sulitnya meminta Laporan Pertanggungjawaban ke Nagari-Nagari atau ke peserta kelompok Tenaga Kerja Mandiri TKM.
2. Dibutuhkan asrama yang ada belum memadai maka diharapkan pada tahun berikutnya ada paket kelas boarding/asrama serta perbaikan dan rehab.

B. Dinas Pertanian

1. Keterlambatan pekerjaan konstruksi karena kondisi di lapangan
2. Masih kurangnya kemampuan administrasi kelompok tani dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan
3. Porsi upah 30% dan bahan 70% dari alokasi dana yang diberikan memberatkan kelompok tani dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan. Mengacu pada standar upah Kabupaten Dharmasraya, porsi 30% sangat jomplang dan berat sehingga kelompok tani harus berswadaya maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan
4. Masih kurangnya tenaga professional dalam perencanaan kegiatan menyebabkan adanya desain yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan lapangan serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengawasan kegiatan sehingga dalam pengawasan kurang maksimal
5. Keterlambatan dalam pelaksanaan/penerimaan benih bantuan
6. Ketidaksesuain datangnya bantuan pemerintah dengan jadwal tanam
7. Kekhawatiran petani terhadap hama seperti kerbau dan sapi, serta pengaruh musim kering (sumber air tidak memadai) sehingga petani tidak mampu untuk menanam bantuan pemerintah tersebut.

3.4.2 Saran dan Tindak Lanjut

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Dinas memberikan bimbingan yang lebih intensif lagi dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke Nagari-Nagari/ Peserta TKM
2. Pada pelatihan berbasis kompetensi (PBK) terdapat peserta yang berdomisili jauh dari lokasi pelatihan seperti Kecamatan Sungai Rumbai, Kec. Koto Salak, Kec. Asam Jujuhan dan lain-lain.
3. Dibutuhkan sarana karena yang sudah ada belum memadai. Untuk itu diharapkan pada tahun berikutnya ada paket kelas boarding/asrama.
4. Dinas menyiapkan asrama untuk peserta pelatihan yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelatihan

B. Dinas Pertanian

1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi lapangan
2. Sosialisasi dilakukan kembali jika ada laporan atau permintaan dari kelompok tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam rangka menyatukan persepsi dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemui
3. Kelompok Tani/Gapoktan/P3A diharapkan berkoordinasi dengan tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama mengenai teknis dilapangan yang harus segera diselesaikan. Dengan adanya informasi kepada tim teknis tersebut sehingga tim teknis dapat memberikan sedikit banyaknya jalan keluar permasalahan
4. Diharapkan perencanaan agar melaksanakan pekerjaan desain benar-benar sesuai kondisi lapangan serta Pelaksana diharapkan berkoordinasi dengan PPK, PPTK maupun tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, supaya pekerjaan berjalan lancar dan tidak mengganggu jalannya pekerjaan.
5. Perlunya koordinasi intens Bersama pihak provinsi/pusat dan pihak pengadaan benih
6. Merubah jadwal tanam menyesuaikan dengan kondisi di lapangan
7. Realokasi bantuan kepada kelompok tani yang membutuhkan, sehingga bantuan yang ada tetap terlaksana dan tertanam sebelum masa expired benih.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7(tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 terkait dengan Standar Teknis Pelayanan Minimal, target capaian dalam pemenuhan mutu pelayanan setuap jenis pelayanan. Pelayanan SPM Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang meliputi:

Tabel 4. 1
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target (Orang)	Target (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.684	100
2	Pelayanan pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	36.896	100
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	782	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Dapodik

4.1.3. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lainnya. Komponen kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
SPM Bidang Pendidikan		17,164,118,190	16,325,595,544
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		17,109,531,690	16,277,242,735
1	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10,530,825,540	9,970,967,527
	Sub Kegiatan :		
	1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2,550,142,000	2,224,889,328
	2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	175,000,000	173,395,000
	3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20,229,500	16,445,900
	4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	603,325,000	600,354,276
	5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5,000,000	5,000,000
	6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7,437,600	0
	7 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5,000,000	5,000,000
	8 Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,522,803,750	3,429,791,659
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,641,887,690	3,516,091,364
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,749,679,100	4,580,773,635

2	Sub Kegiatan :			
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,462,825,700	2,429,829,247
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,648,500,000	1,523,580,000
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	129,176,000	126,824,000
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17,136,500	16,388,488
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	201,612,900	199,740,400
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10,000,000	10,000,000
	7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8,104,000	2,220,600
	8	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	11,524,000	11,524,000
	9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	260,800,000	260,666,900
3	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1,686,696,850	1,583,713,099
	Sub Kegiatan :			
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	89,618,400	89,235,166
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	48,600,000	48,323,980
	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	494,863,400	400,534,831
	4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	550,000,000	542,638,000
	5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	28,127,000	28,104,500

	6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178,249,000	178,099,000
	7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	99,971,650	99,954,507
	8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	197,267,400	196,823,115
4		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	142,330,200	141,788,474
		Sub Kegiatan :		
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	142,330,200	141,788,474
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			54,586,500	48,352,809
		Sub Kegiatan :		
1	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19,586,500	13,352,809
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35,000,000	35,000,000

Sumber : SIPd Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Catatan :

Sub Kegiatan dalam SPM Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nominklatur perencanaan pembangunan sesuai / tersedia. Pada program pendidik dan tenaga kependidikan tetap dilaporkan pada kolom kegiatan lainnya karena kegiatan ini merupakan kegiatan SPM sebagai hasil Evaluasi Gubernur pada penetapan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024.

4.1.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk penerepan SPM Bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	20 Orang
2	S1/DIV	2.424 Orang
3	DII	3 Orang
4	SLTA	6 Orang
5	SMP	0 Orang
	Jumlah	2.453 Orang

Tabel 4. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	334
2	III	1119
3	II	18
4	I	2
5	IX (PPPK)	980
	Jumlah	2.453 Orang

4.1.5. Hasil Capaian

a. Realisasi

Hasil capaian merupakan realisasi dari target capaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya selama satu tahun anggaran maupun penerima layanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil table Capaian Mutu Pelayanan SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 :

Tabel 4. 5
Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target (orang)	Realisasi (orang)	Realisasi (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.684	5.684	100
2	Pelayanan pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	36.896	36.896	100
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	782	782	100

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar disini meliputi jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan dan yang tersedia serta capaian mutu yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4. 6
Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang di peroleh
I.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5684	5684	0	100%
1	Angka partisipasi sekolah	Persentase angka partisipasi sekolah	100	79.52	20.48	79.52%
2	Angka partisipasi murni	Persentase angka partisipasi murni	56.61	69.68	-13.07	100 %
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	43.46	46.95	-3.49	100%
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Persentase Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	80.54	74.36	6.18	92.33%
5	Rasio Pengawas Sekolah PAUD	Persebtase Rasio Pengawas Sekolah PAUD	0.25	0.25	0	100%

6	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase kecukupan formasi guru ASN	100	48.57	51.43	48.57%
7	Indeks distribusi guru	Persentase indeks distribusi guru	0.38	0.46	-0.08	100%
8	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase proporsi PTK bersertifikat	28.5	37.06	-8.56	100%
9	Proporsi PTK penggerak	Persentase proporsi PTK penggerak	0.06	1.58	-1.25	100%

***Catatan**

Pada Capaian SPM yang diperoleh pada jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang tidak tercapai 100 % karena:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan capaian 79.52% dipengaruhi oleh kondisi siswa yang ditarik dari data Dapodik Dinas Pendidikan dan Emis Kemenag yang terintegrasi pada capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Tahun 2023 dan target mutu barang/ jasa yang dibutuhkan diambil dari target nasional pada Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Urusan Kabupaten dan Kota.
- 2) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan capaian 92.33% dan belum memenuhi target nasional dikarenakan ada tenaga pendidikan PAUD yang masih berkualifikasi ijazah D II dan DIII.
- 3) Kecukupan formasi ASN dengan capaian 48.57% pada hasil Rapor Pendidikan tahun 2024 tidak sesuai dengan kondisi real dilapangan. Pada data kebutuhan ASN bidang PTK, rasio pemenuhan ASN pada jenjang PAUD sudah terpenuhi/cukup. Capaian terkendala karena input data pada SIMPKB yang terintergrasi dengan Rapor Pendidikan.

2. Pendidikan Dasar

Tabel 4. 7
Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
II.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	36.896	36.896	0	100 %
	SD					
1	Angka partisipasi kasar	Persentase angka partisipasi kasar	104,49	104,47	0,019	99.98 %
2	Angka partisipasi sekolah	Persentase angka partisipasi sekolah	100	99,98	96	99.98 %
3	Kemampuan literasi	Nilai kemampuan literasi	72,29	77.54	-5.25	100 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai kemampuan numerasi	49.57	61.92	-12.35	100 %
5	Perbedaan Skor Literasi	Nilai perbedaan Skor Literasi	61.26	60.75	0.15	99.17 %
6	Perbedaan Skor numerasi	Nilai perbedaan Skor numerasi	43.04	45.11	-2.072	100 %
7	Indeks iklim keamanan	Nilai indeks iklim keamanan	74.07	70.48	3.59	95.15 %

8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai indeks iklim kebinekaan	73.46	71.93	1.53	97.92 %
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai indeks iklim kebinekaan	62.47	53.42	9.05	85.51 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase kecukupan formasi guru ASN	49,50	48,57	0.93	98.12 %
11	Indeks distribusi guru	Persentase indeks distribusi guru	0,40	0,45	-0.05	100 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase proporsi PTK bersertifikat	87,95	30.17	57.78	34.30%
13	Proporsi PTK penggerak	Persentase proporsi PTK penggerak	0	0	0	100 %
	SMP					
1	Angka partisipasi kasar	Persentase angka partisipasi kasar	106,30	107,32	-1.02	100 %
2	Angka partisipasi sekolah	Persentase angka partisipasi sekolah	100	98.72	1.28	98.72 %
3	Kemampuan literasi	Nilai kemampuan literasi	73,04	76.75	- 3.71	100 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai kemampuan numerasi	45,93	68.32	- 22.3	100 %
5	Perbedaan Skor Literasi	Nilai perbedaan Skor Literasi	72.64	69.45	3.19	95.61 %
6	Perbedaan Skor numerasi	Nilai perbedaan Skor numerasi	68.68	60.82	7.86	88.56 %
7	Indeks iklim keamanan	Nilai indeks iklim keamanan	73.94	69.4	4.54	93.86 %

8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai indeks iklim kebinekaan	70.83	71.82	0.89	100 %
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai indeks iklim inklusivitas	61.74	55.77	5.97	90.33%
10	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase kecukupan formasi guru ASN	50	43.7	6.3	87.40 %
11	Indeks distribusi guru	Persentase indeks distribusi guru	0,35	0.4	-0.05	100 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase proporsi PTK bersertifikat	84,80	28,9	55.9	34.08 %
13	Proporsi PTK penggerak	Persentase proporsi PTK penggerak	0	0	-	100 %

*Catatan : Pada Capaian SPM yang diperoleh pada jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar, yang tidak tercapai 100 % karena:

- 1) Angka partisipasi kasar (APK) Angka partisipasi murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dengan capaian kurang dari 100% yakni 99,98 % dan SMP pada APM dengan capaian 98,72 % dipengaruhi oleh kondisi siswa yang ditarik dari data Dapodik (Dinas Pendidikan) dan Emis (Kemeng) yang terintegrasi pada capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Tahun 2024 dan terget mutu barang/ jasa yang dibutuhkan diambil dari target nasional indikator kinerja urusan kabupaten /kota.
- 2) Perbedaan skor literasi pada pendidika dasar SD dan SMP dengan capaian masing masing 99,17% dan 95,61% ditarik dari data rapor pendidikan triwulan 4 yang disandingkan dengan target indikator untuk kabupaten/kota tahun 2024. Pada jenjang SMP, perbedaan skor numerasi juga belum mencapai 100%. Hal ini mempengaruhi rendahnya indikator perbedaan skor literasi dan numerasi pada masing measing jenjang.
- 3) Iklim keamanan dan iklim inklusivitas pada platform e SPM tahun 2023 dilaporkan dalam satu indikator, namun pada tahun 2024, masing masing iklim dipisah dan capaian mutu yang terlayani masih belum melampaui target pada Rapor pendidikan kabupaten

- 4) Kecukupan formasi ASN pada pendidikan dasar masih belum 100%. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya rasio guru pada masing masing jenjang pendidikan. Namun pada tahun 2024, jumlah penerimaan PPPK pada tenaga pendidik akan mampu meningkatkan naiknya angka kecukupan formasi ASN ditahun berikutnya.
- 5) Proposi PTK bersertifikat pendidikan dasar pada rapor pendidikan masih sangat rendah, capaian masih dibawah 50%. Hal ini terkait dengan jumlah guru yang belum sertifikasi dan penambahn guru PPPK yang beum memiliki sertifikat pendidik sampai pada tahun 2024 pada data SimPKB sebagai pusat data pada rapor pendidikan.
3. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4. 8
Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan
Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
III.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang BerpartisipasiDalam Pendidikan Kesetaraan	782	782	0	100 %

1	Angka partisipasi kasar	Persentase angka partisipasi kasar	100	106.5	-6.5	100 %
2	Angka partisipasi sekolah	Persentase angka partisipasi sekolah	100	16.07	83.93	16.07 %
3	Kemampuan literasi	Nilai kemampuan literasi	26,85	34.37	-7.52	100 %
4	Kemampuan numerasi	Nilai kemampuan numerasi	20.92	33.85	-12.93	100 %
5	Perbedaan skor literasi	Nilai perbedaan skor literasi	37,16	39.9	-2.74	100 %
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai perbedaan skor numerasi	33,33	36.35	-3.02	100 %
7	Indeks iklim keamanan	Nilai indeks iklim keamanan	42,81	43.05	0.239	100 %
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai indeks iklim kebinekaan	62.26	39,67	22.58	63.73 %
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai indeks iklim inklusivitas	55.56	35.39	20.17	63.70%
10	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase kecukupan formasi guru ASN	0	0	-	100 %
11	Indeks distribusi guru	Persentase indeks distribusi guru	0	0	-	100 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase proporsi PTK bersertifikat	0	0	-	100 %
13	Proporsi PTK penggerak	Persentase proporsi PTK penggerak	0	0	-	100 %

*Catatan: Pada Capaian SPM yang diperoleh pada jenis Pelayanan Pendidikan Dasar , yang tidak tercapai 100 % karena:

1. Secara keseluruhan Angka partisipasi sekolah (APS) 16.07% pada pendidikan kesetaraan masih jauh dari target nasional. Hal ini dipengaruhi pada data perhitungan jumlah penduduk yang ditarik sebagai subject yang harus dilayani.
2. Indeks iklim kebhinekaan dengan capaian 63.73% dan Indeks iklim inklusivitas dengan capaian 63.70 % sangat dipengaruhi oleh situasi lingkungan belajar (Sulingjar) yang diisi oleh warga belajar pada jenjang non formal. Pemenuhan sarana dan prasarana pada lembaga sangat erat kaitannya indikator ini.

4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala dan permasalahan pada setiap tahapan pemenuhan SPM tersebut selain itu juga ada beberapa solusi atau penyelesaian SPM diantara sebagai berikut :

a. Permasalahan :

- Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, data jumlah layanan yang harus dilayani pada tingkat kesetaraan masih belum tersedia.

- Penghitungan Kebutuhan

Pada perhitungan data, capaian jumlah layanan dihitung dari jumlah siswa di kabupaten pada umur tertentu dan disamakan dengan jumlah yang harus dilayani. Pada perhitungan mutu layanan, indikator yang menjadi target nasional capaiannya di ambil dari kondisi rapor pendidikan bulan Desember 2024 sebagai capaian TW 4, sedangkan untuk indikator selain nasional, terget diambil dari capaian rapor pendidikan tahun 2023.

- Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahap perencanaan dan peanggaran di TW4, pagu diambil dari pagu perubahan SKPD. pemenuhan anggran SPM telah dipenuhi dan telah disetujui sesuai dengan evaluasi gubernur dengan sumber dana DAU pendidikan.

- Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemenuhan SPM pendidikan masih minim pada tingkat kesetaraan, dimana data capaian masih belum tersedia di rapor pendidikan, sehingga pada pelaksanaan nya capaian belum tergambar dan indikator mutunya juga ditutup.

- Lain – lain

Pada pengisian form LK, sudah disikan sesuai dengan instrument yang di minta, pada form LK juga sudah diinput data Dukcapil sebagai jumlah layanan yang harus dipenuhi. Selain itu, pada sub kegiatan dan anggaran yang mendukung SPM , program pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum belum tersedia namun tetap dilaporkan pada kegiatan lainnya.

b. Solusi :

- Pengumpulan Data

Melakukan koordinasi lebih awal kepada dinas/instansi yang terkait.

- Penghitungan Kebutuhan

Perlu melakukan / mengarahkan pengisian instrument pada rapor pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi hasil capaian pada rapor pendidikan kabupaten yang dilaporkan pada e SPM

- Perencanaan dan Penganggaran

Perlu adanya penetapan / kesamaan persepsi pada penyusunan Renja PD dalam pemenuhan kegiatan dan anggaran SPM sebagaimana juknis penganggaran pemenuhan SPM pendidikan yang sebagian besar dialokasi dari dana DAU Pendidikan.

- Pelaksanaan

Perlu adanya perhatian yang lebih pada pelayanan Pendidikan kesetaraan baik dari penggaran, pelaksanaan dan evaluasi sehingga ketersediaan data pada rapor pendidikan yang menjadi indikator layanan dapat terisi penuh.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Target pencapaian SPM dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya bidang kesehatan dalam melakukan pelayanan dasar, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan, sedangkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya bidang kesehatan dalam melakukan pelayanan dasar, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk sesuai dengan sasaran.

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi :

Tabel 4. 9
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Target (%)
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.619	100
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.508	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3.487	100
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	18.542	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	38.555	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	141.562	100
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	17.837	100
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	22.190	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	2.442	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	447	100

11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	3.686	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.155	100

4.2.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- APBD/ DAU Peruntukan
- APBN, dan
- Sumber dana lain yang sah

Tabel 4. 10
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
SPM Bidang Kesehatan			
PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan :			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.733.000	204.220.342
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.520.800	113.336.500
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	312.183.850	201.951.198
4	Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Balita	245.416.000	231.256.225

5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000	44.657.100
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	78.001.000	75.639.600
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	33.401.000	29.875.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.197.140	220.726.129
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.125.000	131.359.260
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	48.390.300
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	348.509.900	343.921.805
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	50.000.000	47.473.800

4.2.4 Dukungan PersonilDukungan Personil untuk penerepan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Jumlah Personil Pendukung Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Jumlah	
	Jenis Tenaga / Keahlian	
1	Dokter spesialis kebidanan	3 orang
2	Dokter spesialis anak	2 orang
3	Dokter spesialis penyakit dalam	3 orang
4	Dokter spesialis paru	2 orang
5	Dokter spesialis kulit dan kelamin	1 orang
6	Dokter	79 orang
7	Dokter gigi	23 orang
8	Bidan	529 orang
9	Perawat	435 orang
10	Tenaga Kefarmasian	88 orang
11	Tenaga gizi	50 orang
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	31 orang
12	Tenaga kesehatan masyarakat	54 orang
13	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	50 orang
Jumlah		1.350 orang

Tabel 4. 12
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	65 orang
2	S1/DIV	355 orang
3	DIII	768 orang
4	DII	144 orang
5	SMA dan D1	16 orang
6	SMP	1 orang
7	SD	1 orang
Jumlah		1.350 Orang

Tabel 4. 13
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	PNS	
	IV	61 orang
	III	406 orang
	II	77 orang
2	PPPK	
	VII	244 orang
	VIII	1 orang
	IX	63 orang
	X	77 orang
3	NON ASN	421 orang
Jumlah		1.350 orang

4.2.5 Hasil Capaian

a. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4. 14
Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Sasaran (orang)	Realisasi (orang)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.619	3.186	88,04
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.508	3.206	91,39
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3.487	3.207	91,97
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	18.542	17.862	96,33
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	38.555	37.288	96,71
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	141.562	137.838	97,37

7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	17.837	17.056	95,62
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	22.190	22.039	99,32
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	2.442	2.419	99,06
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	447	447	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	3.686	3.686	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.155	4.155	100

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar disini meliputi jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan dan yang tersedia serta capaian mutu yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 15
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
I	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.619	3.186	433	88,04%
1	Vaksin Tetanus Difetri (TD)	Jumlah Vaksin Tetanus Difetri (TD)	452	398	54	88,05 %
2	Tablet Tambah Darah	Jumlah Tablet Tambah Darah	651.420	573.480	77.940	88,04 %
3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Test Kehamilan	Jumlah Paket	3.619	3.186	433	88,04%
4	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Hb	Jumlah Paket	3.619	3.186	433	88,04%
5	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Golongan Darah	Jumlah Paket	3.619	3.186	433	88,04%

6	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Jumlah Paket	543	478	65	88,03%
7	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Skrining Triple Eliminasi	Jumlah Paket	3.619	3.186	433	88,04%
8	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Jumlah Paket Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	3619	3186	433	88,04%
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jumlah Buku KIA	3619	3186	433	88,04%
10	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi	Jumlah Paket	15	15	0	100%
11	Gel USG	Jumlah Botol Gel USG	254	240	15	94,49%
12	Tenaga Kesehatan: Dokter/Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi	Jumlah Dokter/Dokter Obsteri dan Ginekologi	82	82	0	100%
13	Tenaga Kesehatan: Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
14	Tenaga Kesehatan: Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100%
15	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Jumlah Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	3.619	3.186	0	88,04%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target dimana dari 3.619 ibu hamil yang terlayani sesuai standar baru 3.186 atau 88,04%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil disebabkan :

- Masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah triwulan pertama kehamilan sehingga K4 dan K6 tidak tercapai.
- Masih ada akses masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan sehingga menyulitkan ibu hamil untuk ke fasyankes untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan memeriksakan kehamilan terutama pemeriksaan USG 2x selama kehamilan.
- Sarana pelayanan kesehatan (pustu) yang sudah tidak layak dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil (dari 43 pustu yang ada di Kabupaten Dharmasraya hanya 9 unit dalam kondisi baik).
- Kompetensi petugas kesehatan yang masih kurang dalam tatalaksana pelayanan pada ibu hamil sesuai standar.

Upaya solusi pemecahan masalah :

- Memberdayakan Kader Desa Wisma dan Kader Kesehatan dalam penjangkaran ibu hamil di awal kehamilan (trisemester pertama).
- Memberikan edukasi pada ibu hamil dan keluarga tentang manfaat pemeriksaan kehamilan secara teratur.
- Tenaga kesehatan di puskesmas harus memastikan semua ibu hamil memiliki buku KIA.
- Inovasi Bidadari Keluarga (Bidan Datang Memberikan Arahkan Mandiri Kepada Keluarga) dengan adanya inovasi ini diharapkan semua ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
- Pelatihan bagi tenaga kesehatan, khususnya bagi bidan yang ada di pustu, poskesri dan polindes tentang tata laksana pelayanan pada ibu hamil yang sesuai standar.

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan ibu meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

Tabel 4. 16
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	3.508	3.206	302	91,39%
1	Formulir Partograf	Jumlah Formulir Partograf	3.508	3.206	302	91,39%
2	Kartu Ibu/Rekam Medis ibu	Jumlah Paket Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	3.508	3.206	302	91,39%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak	3.508	3.206	302	91,39%
4	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi	Jumlah Paket	15	15	0	100%
5	Tenaga Kesehatan: Dokter/ Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Jumlah Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	82	82	0	100%
6	Tenaga Kesehatan: Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100%
7	Tenaga Kesehatan: Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
8	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian kesehatan ibu bersalin belum mencapai target dimana dari 3.206 ibu bersalin yang terlayani sesuai standar baru 3.508 atau 91,39%

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada ibu bersalin disebabkan :

- Belum updatenya pencatatan dan pelaporan ibu bersalin di puskesmas, sehingga ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan di luar kabupaten tidak semuanya tercatat.
- Sarana fasyankes pustu tidak sesuai standar, akses ibu bersalin ke puskesmas dan rumah sakit jauh sehingga masih ada ibu hamil melahirkan dengan tenaga kesehatan di rumah atau tidak di fasyankes.
- Masih ada nagari yang belum mempunyai tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kerja puskesmas terpencil, sehingga masih ada persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan 4 orang (dukun).
- Tenaga kesehatan terlatih di puskesmas poned saat ini sudah tidak ada, sehingga kondisi gawat daruratan ibu hamil dan bayi tidak dilaksanakan di puskesmas PONED.

Upaya mengatasi permasalahan :

- Mengadakan pelatihan PONED bagi petugas di puskesmas PONED sehingga adanya peningkatan kompetensi bagi petugas dan sarpras yang tersedia dapat dimanfaatkan penggunaannya. dan membentuk tim Audit dan melaksanakan pengkajian dan pembelajaran Audit Maternal dan Perinatal.dengan melibatkan tim ahli.
- Meningkatkan edukasi pada keluarga tentang bahaya melahirkan dengan tenaga non kesehatan.
- Mengusulkan rehap pustu ke kemenkes RI melalui aplikasi SOPHI dan melalui APBD Kabupaten.

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4.17
Mutu Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	3.487	3.207	280	91,97 %
1	Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Jumlah Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal	3.487	3.207	280	91,97%
2	Vitamin K1 Injeksi	Jumlah Ampul Vitamin K1 Injeksi	3.487	3.207	280	91,97%
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Jumlah Bayi Baru Lahir	3.487	3.207	280	91,97%
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Jumlah Formulir Bayi Baru Lahir	3.487	3.207	280	91,97%
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Jumlah Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	3.487	3.207	280	91,97%
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Jumlah Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	3.487	3.207	280	91,97%
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi	Jumlah Paket	15	15	0	100%
8	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Jumlah Dokter/Dokter Spesialis Anak	81	81	0	100%
9	Tenaga Kesehatan : Bidan	Jumlah Bidan	529	5295	0	100%
10	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
11	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%

12	Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	31	31	0	100%
13	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah: Tenaga Gizi	50	50	0	100%
14	Kader Kesehatan	Jumlah Kader Kesehatan	1.305	1.305	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian bayi baru lahir belum mencapai target dimana dari 3.487 bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar baru 3.207 atau 91,97%.

- Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir disebabkan :
- Masih ada bayi baru lahir yang tidak mendapatkan imunisasi yaitu vaksin hepatitis B dosis tunggal.
- Upaya Mengatasi Permasalahan :
 - Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang manfaat bayi mendapatkan imunisasi serta bahaya apabila bayi tidak mendapatkan imunisasi.

d) Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 18
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan
Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	18.542	17.862	680	96,33%
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang Berlaku	Jumlah Dokumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang Berlaku	18.542	17.862	680	96,33%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Jumlah formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	18.542	17.862	680	96,33%
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jumlah Balita	18.542	17.862	680	96,33%
4	Vitamin A Biru	Jumlah Kapsul Vitamin A Biru	1.785	1.295	490	72,55%
5	Vitamin A Merah	Jumlah Kapsul Vitamin A Merah	17.183	15.398	1.785	89,61%
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Jumlah Vaksin imunisasi dasar: BCG	872	802	70	91,97%
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Jumlah Pengguna Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	581	535	46	92,08%
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Jumlah Vaksin imunisasi dasar: IPV	436	401	35	91,97%

9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Jumlah Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	872	802	70	91.97 %
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Jumlah Vaksin imunisasi dasar: Campak	436	401	35	91.97 %
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	Jumlah Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	4.636	4.466	170	96.33 %
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Jumlah Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2.318	2.233	85	96.33 %
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Jumlah Unit Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	18.542	17.862	680	96.33 %
14	Peralatan Anafilaktik	Jumlah Paket Peralatan Anafilaktik	261	261	0	100.00 %
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket Formula Terapi Gizi Buruk	706	706	0	100.00%
16	Tenaga kesehatan : Dokter	Jumlah Dokter	79	79	0	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100.00 %
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100.00 %
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100.00 %
20	Guru PAUD	Jumlah Guru PAUD	746	746	0	100.00 %
21	Kader Kesehatan	Jumlah Kader Kesehatan	1.305	1.305	0	100.00 %

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan balita belum mencapai target dimana dari 18.542 balita yang terlayani sesuai standar baru 17.862 atau 96,33%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada balita disebabkan :

- Masih adanya ibu balita yang tidak mau membawa anaknya ke posyandu disebabkan keluarga tidak mau anaknya diimunisasi.

Upaya Mengatasi Permasalahan :

- Lebih mengoptimalkan pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK) secara berkala melalui kegiatan terintegrasi layanan primer (ILP) di posyandu.
- Edukasi kepada keluarga tentang manfaat pemantauan tumbuh kembang anak sehingga dapat mengetahui status gizi anak sesuai umur.

e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Tabel 4. 19
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
V	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	38.555	37.288	1.267	96,71%
1	Buku Rapor Kesehatanku	Jumlah Buku Rapor Kesehatanku	38.555	37.288	1.267	96,71%
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Jumlah Buku Pemantauan Kesehatan	38.555	37.288	1.267	96,71%
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	Jumlah Kuesioner Skrining Kesehatan	38.555	37.288	1.267	96,71%

4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Jumlah Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	230	230	0	100%
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Jumlah Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	15	15	0	100%
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Jumlah Tablet Tambah Darah	11.735	11.735	0	100%
7	Alat Pemeriksaan Hb	Jumlah Alat Pemeriksaan Hb	15	14	1	93,33%
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Jumlah strip Hb	2.062	2.062	0	100%
9	Media promosi kesehatan	Jumlah paket	15	15	0	100%
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Jumlah vaksin campak rubela, DT, Td	2.250	1.663	0	100%
11	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Jumlah Dokter/Dokter Gigi	102	102	0	100%
12	Tenaga Kesehatan :Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100%

13	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
14	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
17	Tenaga non kesehatan : guru	Jumlah Guru	1.230	1.230	0	100%
18	Tenaga Non Kesehatan : kader	Jumlah Kader	1.872	1.872	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target dimana dari 38.555 usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar baru 37.288 atau 96,71%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar disebabkan :

- Pada saat pelaksanaan skrining kesehatan ke sekolah masih banyak siswa yang tidak hadir dengan alasan ada yang sakit, izin dan lain-lain.

Upaya Mengatasi Permasalahan :

- Melakukan kunjungan ulang ke sekolah untuk menjaring peserta didik yang tidak hadir
- Melaksanakan pertemuan untuk penguatan stratifikasi UKS/M.

f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 20
Mutu Pelayanan Dasar Logistik
PelayananKesehatan pada
Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	141.562	137.838	3724	97,37%
1	Media, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Jumlah Paket	30	30	0	100%
2	Alat : Alat Ukur Lengan Lengan Atas (LILA)	Jumlah unit Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	30	30	0	100%
3	Alat : Tensimeter	Jumlah unit Tensimeter	70	70	0	100%
4	Alat : Glukometer	Jumlah unit Glukometer	30	30	0	100%
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb	Jumlah unit strip gula darah	30	30	0	100%
6	Alat : Tes strip gula darah, lancet, kapas, alkohol	Jumlah Unit strip gula darah, lancet, kapas, alkohol	141.562	137.838	3724	97,37%
7	Alat : KIT IVA Tes	Jumlah Unit KIT IVA Tes	15	15	0	100%
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Jumlah unit strip dan reagen pemeriksaan Hb	141.562	137.838	3724	97,37%
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Jumlah unit kit ophthalmologi komunitas	15	15	0	100%
10	Kuesioner PUMA	Jumlah kuesioner PUMA	24.333	24.333	0	100%
11	Alat pelayanan KB	Jumlah unit alat pelayanan KB	0	0	0	0
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Jumlah formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	15	15	0	100%

13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Jumlah ampul vaksin tetanus difteri	9.730	9.730	0	100%
14	Tenaga Kesehatan: Dokter	Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter	79	79	0	100%
15	Tenaga Kesehatan: Bidan	Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan	529	529	0	100%
16	Tenaga Kesehatan: Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
17	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Gizi	50	50	0	100%
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1.305	1.305	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif belum mencapai target dimana dari 141.562 usia produktif yang terlayani sesuai standar baru 137.838 atau 97,37%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif disebabkan :

- Belum semua pelayanan kesehatn usia produktif terlaporkan ke puskesmas oleh petugas kesehatan yang ada praktek swasta di wilayah kerjanya.
- Belum semua sasaran usia produktif mengunjungi Posbindu PTM Untuk memeriksakan kesehatan.
- Pencatatan pelaporan di register usia produktif puskesmas tidak update (double pencatatan).

Upaya Mengatasi Permasalahan :

- Membuat MOU/perjanjian kerjasama dengan, bidan dan dokter praktek swasta untuk pelaporan pelayanan kesehatan usia produktif ke puskesmas.
- Melakukan Mapping/pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan sesuai dengan sasaran
- Mengupayakan workshop dan evaluasi tentang CTU bagi tenaga kesehatan puskesmas.
- Melakukan update data usia produktif di buku register puskesmas.

g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 21
Mutu Pelayanan Dasar pada
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	17.837	17.056	0	95,62%
1	Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Jumlah paket alat pemeriksaan deteksi dini	17.837	17.056	0	95,62%
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Jumlah paket glukometer	17.837	17.056	0	95,62%
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Jumlah paket pemeriksaan kolesterol	17.837	17.056	0	95,62%
4	Bahan medis Habis Pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Jumlah paket bahan medis habis pakai	17.837	17.056	0	95,62%

5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrument Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)	Jumlah paket Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrument Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)	17.837	17.056	0	95,62%
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Jumlah buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	17.837	17.056	0	95,62%
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Paket	30	30	0	100%
8	Tenaga Kesehatan Dokter	Jumlah Dokter	79	79	0	100%
9	Tenaga Kesehatan : Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100%
10	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
11	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%
12	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Jumlah kader	1.305	1.305	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai target dimana dari 17.837 usia lanjut yang terlayani sesuai standar baru 17.056 atau 95,62%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut disebabkan :

- Lansia resiko tinggi (resti) tidak semuanya terskrining disebabkan tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Akses yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan serta keterbatasan fisik (seperti menggunakan kursi roda) sehingga lansia resti sulit untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Kurangnya alat ukur lansia, masing-masing puskesmas hanya mendapatkan satu alat ukur sehingga tidak cukup untuk kunjungan rumah pada lansia resti.

Upaya mengatasi permasalahan :

- Mengupayakan skrining lansia melalui kegiatan posyandu ILP sehingga terpantau kesehatan lansia secara berkala.
- Meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi pada keluarga tentang kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lansia.
- *Homecare* untuk lansia resti.

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 22
Mutu Pelayanan Dasar pada
Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	22.190	22.039	151	99,32%

1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Jumlah Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30	30	0	100%
2	Obat Hipertensi	Jumlah paket obat hipertensi	266.280	264.468	1812	99,32%
3	Tensimeter	Jumlah Unit Tensimeter	70	70	0	100%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Jumlah Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	15	15	0	100%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah paket	15	15	0	100%
6	Tenaga Kesehatan : Dokter	Jumlah Dokter	79	79	0	100%
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	Jumlah Bidan	529	529	0	100%
8	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Perawat	435	435	0	100%
9	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%
10	Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	31	31	0	100%
11	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%

12	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
----	---	------------------------------------	----	----	---	------

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target dimana dari 22.190 penderita hipertensi yang terlayani sesuai standar baru 22.039 atau 99,32%.

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi disebabkan :

- Belum semua praktek swasta melaporkan kunjungan penderita hipertensi ke puskesmas.
- Mengontrol pengobatan rutin dan pengawasan minum obat pada penderita hipertensi cukup sulit dilakukan karena penderita hipertensi tidak rutin cek kesehatan ke fasilitas kesehatan atau possbindu PTM.
- Pencatatan pelaporan di register penderita hipertensi puskesmas tidak update (double pencatatan).

Upaya mengatasi permasalahan :

- Membuat MOU/Perjanjian Kerjasama dengan dokter, bidan praktek swasta dan klinik swasta tentang laporan kunjungan penderita hipertensi.
- Melakukan Mapping/pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan PTM keseluruhan sasaran dan memberdayakan Kader Kesehatan PTM untuk menghimbau sasaran agar cek kesehatan secara berkala dan pemantauan minum obat.

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 23
Mutu Pelayanan Dasar pada
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Layanan Kesehatan	2.442	2.419	23	99,06%
1	Obat Diabetes Melitus	Jumlah paket obat diabetes mellitus	29.304	29.028	276	99,06%
2	Fotometer atau Glukometer	Jumlah unit fotometer atau glukometer	30	30	0	100%
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol,	Jumlah unit	2.442	2.419	23	99,06%
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Jumlah formulir	15	15	0	100%
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah paket Media KIE	30	30	0	100%
6	Tenaga Kesehatan : Dokter	Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter	79	79	0	100%
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan	529	529	0	100%
8	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat	435	435	0	100%
9	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah Tenaga Kefarmasian	88	88	0	100%

10	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
11	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Gizi	50	50	0	100%
12	Tenaga Kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Jumlah Tenaga ATLM	50	50	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes militus belum mencapai target dimana dari 2.442 penderita diabetes militus yang terlayani sesuai standar baru 2.419 atau 99,06%

Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi disebabkan :

- Belum semua pemeriksaan orang dengan Diabetes Melitus dilaporkan karena pasien yang diperiksa di DPM (Dokter Praktek Mandiri), BPM (Bidan Praktek Mandiri) dan Klinik belum dilaporkan ke Fasyankes
- Adanya tugas rangkap dari pengelola program PTM Puskesmas sehingga sulitnya membagi waktu untuk pelaksanaan program PTM.
- Pengobatan rutin pada penderita Diabetes Melitus cukup sulit dilakukan karena kurangnya pengawasan minum obat dan tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin ke Posbindu/Fasilitas Kesehatan.
- Pencatatan pelaporan di register hipertensi puskesmas tidak update (double pencatatan).

Upaya mengatasi permasalahan :

- Membuat MOU/Perjanjian Kerjasama dengan BPM, DPM dan klinik swasta dalam pelaporan dan pelayanan penderita Diabetes Melitus.
- Mengadakan pelatihan bagi pengelola program PTM dipuskesmas dan mengusulkan supaya ada yang membantu pengelola PTM.
- Melakukan Mapping/ pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan sasaran untuk menjangkau seluruh sasaran hipertensi.
- Memberdayakan Kader Kesehatan PTM untuk menjangkau sasaran dan pemantauan pengobatan.

j) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya.

Tabel 4. 24
Mutu Pelayanan Dasar Pada
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	447	447	0	100%
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III atau Buku PPDGJ terbaru	Jumlah buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku PPDGJ terbaru	15	15	0	100%
2	Penyediaan Psikofarmaka	Jumlah jenis psikofarmaka	2	2	0	100%
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Jumlah formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	15	15	0	100%
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan	Jumlah formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	15	15	0	100%

5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Media KIE	15	15	0	100%
6	Tenaga Kesehatan: Dokter	Jumlah Dokter	79	79	0	100%
7	Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	100	100	0	100%
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Jumlah tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	30	30	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sudah mencapai target dimana seluruh 447 ODGJ terlayani sesuai standar atau 100%.

Permasalahan/kendala pada pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat :

- Belum optimalnya koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang sudah dibentuk tingkat Kabupaten Dharmasraya dalam pengawasan dan pembinaan pada ODGJ.
- Belum terbentuknya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat Kecamatan.
- Masih adanya pasien ODGJ berat yang putus pengobatan dan pasien pasung sebanyak 7 orang.
- Masih adanya tenaga pengelola program yang belum dilatih karena adanya mutasi atau pergantuan pengelola program di puskesmas.

Upaya mengatasi permasalahan :

- Mengoptimalkan TPKJM tingkat kabupaten minimal melaksanakan rapat koordinasi satu kali dalam setahun.
- Membentuk TPKJM tingkat kecamatan dalam penanganan pasien ODGJ Berat.

- Meningkatkan skrining kesehatan jiwa untuk mengintervensi secara dini adanya gangguan jiwa dan melakukan pemantauan pada ODGJ berat yang putus obat dan pasien pasung, memberikan edukasi kepada keluarga agar secara rutin memberikan obat kepada pasien serta peningkatan pemahaman terkait di larang pasung pada ODGJ.
- Mengadakan pelatihan bagi pengelola program keswa di puskesmas terutama untuk Dokter, Perawat dalam melaksanakan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada ODGJ sesuai standar.

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar. Pemerintah Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 25
Mutu Pelayanan Dasar pada
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	3.686	3.686	0	100%
1	Media KIE (Leaflet, Lembar, Balik, Poster, Banner)	Jumlah Media KIE (Leaflet, Lembar, Balik, Poster, Banner)	15	15	0	100%
2	Reagen Zn TB	Jumlah Paket Reagen Zn TB	3.686	3.686	0	100%
3	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	Jumlah Paket Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	3.686	3.686	0	100%

4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Piring	Jumlah Paket Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Piring	11.058	11.058	0	100%
5	Katrid Tes Cepat Molekuler	Jumlah Paket Katrid Tes Cepat Molekuler	3.686	3.686	0	100%
6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Formulir Pencatatan dan Pelaporan	15	15	0	100%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen Pedoman/Standar Operasional Prosedur	15	15	0	100%
8	Tuberkulin	Jumlah vial tuberkulin	43	43	0	100%
9	Dokter/Dokter spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	Jumlah Dokter/Dokter spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	84	84	0	100%
10	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Tenaga Perawat	435	435	0	100%
11	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Jumlah tenaga kefarmasian	88	88	0	100%
12	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan masyarakat	54	54	0	100%
13	Tenaga Kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Jumlah Tenaga Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	50	50	0	100%
14	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Jumlah Tenaga Penata Rontgen	14	14	0	100%
15	Kader Kesehatan	Jumlah Tenaga Nono Kesehatan atau Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.305	1.305	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sudah mencapai target dimana seluruh 3.686 orang terduga tuberkulosis terlayani sesuai standar atau 100%.

Permasalahan/kendala pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis :

- Masih ada Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD) dan klinik yang belum terdaftar di SITB Online sehingga pencatatan masih secara manual dan belum optimal

Upaya mengatasi permasalahan :

- Meningkatkan kerjasama dengan jejaring (DPM, Klinik) melalui pengelola program Puskesmas
- Untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk TPMD dan Klinik yang akan memperpanjang SIP dan SIO harus melengkapi salah satu syarat yaitu adanya laporan Program Prioritas (TB, DM, Hipertensi).

l) Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 4. 26
Mutu Pelayanan Dasar pada
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus)

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
XII	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	4.155	4.155	0	100%
1	Media KIE (Leaflet, Lembar, Balik, Poster, Banner)	Jumlah Media KIE (Leaflet, Lembar, Balik, Poster, Banner)	15	15	0	100%
2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	Jumlah Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	4.155	4.155	0	100%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plaster, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Jumlah Paket Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plaster, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	12.465	12.465	0	100%

4	Alat Tulis, Rekam medis yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Jumlah Paket Alat Tulis, Rekam medis yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	4.155	4.155	0	100%
5	Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Jumlah Tenaga Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	87	87	0	100%
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	Jumlah Tenaga Bidan	529	529	0	100%
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	Jumlah Tenaga Perawat	435	435	0	100%
8	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Jumlah Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	50	50	0	100%
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	0	100%
10	Tenaga Non Kesahatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Jumlah Tenaga Non Kesahatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	1.305	1.305	0	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sudah mencapai target dimana seluruh 4.155 orang dengan risiko terinfeksi HIV terlayani sesuai standar atau 100%.

Permasalahan/kendala pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV:

- Capaian pemeriksaan HIV sudah 100 % tetapi belum mencakup seluruh populasi kunci (LSL, IMS, Waria) karena tidak adanya penjangkau di lapangan untuk membantu dalam menjaring orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS.
- Capaian pemeriksaan HIV belum mencakup 9 populasi kunci yang ada di Kabupaten Dharmasraya saat ini baru ada 7 populasi kunci (ibu hamil, penderita TB, lapas, WPS, pasien IMS, waria, partner notifikasi). Sedangkan 2 populasi kunci di Kabupaten Dharmasraya belum memiliki kelompok penjangkau yaitu lelaki seks lelaki dan pengguna narkoba suntik.

Upaya mengatasi permasalahan :

- Kerja sama dengan kelompok penjangkau untuk menjaring orang beresiko terinfeksi HIV
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penjangkauan orang beresiko terinfeksi HIV

4.2.6 Kendala Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

– Pengumpulan Data

Tidak updatenya data sasaran riil 12 indikator SPM di Puskesmas.

– Penghitungan Kebutuhan

- Puskesmas belum mendapatkan sosialisasi terkait cara perhitungan kebutuhan sesuai dengan SISCOBIKES Kementerian Kesehatan.

– Perencanaan dan Penganggaran

- Masih kurangnya kesediaan APBD untuk mendukung program SPM.
- Masih kurangnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas yang sudah tidak sesuai standar.

– Pelaksanaan

- Tahun 2024 dari 3508 sasaran ibu bersalin yang ada di kabupaten dharmasraya, masih ada 4 orang ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga non kesehatan disebabkan karena fasilitas pelayanan kesehatan tidak sesuai standar (pustu) sehingga akses ibu bersalin ke puskesmas dan RS jauh sehingga masih ada ibu hamil melahirkan dengan tenaga kesehatan di rumah atau tidak di fasilitas pelayanan kesehatan.

- Masih ada nagari yang belum mempunyai tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kerja puskesmas terpencil, sehingga masih ada persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan (dukun).

– Lain-lain

- Belum adanya persamaan persepsi terkait 4 tahapan penerapan SPM yang ada di Permendagri 59 tahun 2021
- Masih ada fasilitas kesehatan belum terstandar untuk peretolongan persalinan normal
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat di beberapa wilayah kerja puskesmas terhadap pelayanan kesehatan dasar
- Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil (K6) karena masih ada wilayah kerja yang aksesnya jauh dari puskesmas, sehingga menyulitkan untuk pemeriksaan USG 2 kali selama kehamilan
- Masih ada satu nagari, ibu bersalin persalinannya ditolong oleh dukun (4 orang ibu bersalin)
- Adanya persalinan dengan tenaga kesehatan yang tidak di fasilitas kesehatan misalnya persalinan di rumah penduduk
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan yang dilakukan serta kerjasama lintas program dan lintas sektor, termasuk dalam hal pencatatan pelaporan data terutama dari jejaring Puskesmas (BP/Klinik Swasta) di wilayah kerja.
- Masih adanya ibu hamil yang berpindah domisili/ tempat tinggal atau bersalin ditempat lain sehingga menyebabkan *dropout* dalam pencatatan pelaporan.
- Masih terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.

b. Solusi :

– Pengumpulan Data

Melakukan update data sasaran riil 12 indikator SPM di Puskesmas.

– Penghitungan Kebutuhan

Mensosialisasikan aplikasi SISCOBIKES Kementerian Kesehatan kepada puskesmas.

– Perencanaan dan Penganggaran

- Perlunya penambahan anggaran untuk SPM, terutama untuk pengadaan, reagent pemeriksaan asam urat dan kolesterol
- Perlunya penambahan anggaran untuk cetak kohort ibu, buku KIA, dan buku register.

– Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan serta melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan/pengembangan kapasitas petugas dalam tata laksana program/kegiatan.

– Lain-lain

- Perlu adanya pelatihan terkait Permendagri No.59 tahun 2021 tentang 4 Tahapan Penerapan SPM
- Penguatan Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Komplikasi (P4K) di setiap nagari dan jorong.
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor melalui koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan.
- Meningkatkan kesinambungan pelayanan integrasi sesuai standar, pencatatan dan pelaporan berkualitas berbasis wilayah serta penguatan kerjasama lintas batas/wilayah dalam upaya penjangkaran ibu hamil/ibu bersalin *dropout* pencacatan.
- Meningkatkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan untuk memenuhi standar barang/jasa penunjang baik kualitas maupun kuantitas yang menunjang pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat No 13 Tahun 2023 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, meliputi:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumahtangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Untuk target Tahun 2024

$$\text{Capaian SPM tahun 2024} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Tahun N}}{\text{Jumlah Sasaran Rumah Tangga di Kab./Kota Tahun N}} \times 100\%$$

Untuk Capaian SPM s . d Tahun 2024

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab./Kota}} \times 100\%$$

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten/Kota untuk target Tahun 2024 adalah:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Tahun N}}{\text{Jumlah Sasaran Rumah Tangga di Kab./Kota Tahun N}} \times 100\%$$

Untuk Capaian SPM s . d Tahun 2024 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab./Kota}} \times 100\%$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan
Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Sasaran (orang)	Target (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	58.526	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58.526	100

4.3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel 4. 28
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
SPM Bidang Pekerjaan Umum		1.432.283.104	1.000.969.937
Sub Bidang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		804.227.750	693.579.309
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		804.227.750	693.579.309
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		804.227.750	693.579.309
Sub Kegiatan :			
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	22.528.000	2.772.050
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.927.000	3.091.500
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	410.858.700	366.470.599

4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	365.914.050	321.245.160
Sub Bidang Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik		628.055.354	307.390.628
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		628.055.354	307.390.628
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota		628.055.354	307.390.628
Sub Kegiatan :			
1	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.927.000	3.441.500
2	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	159.842.600	95.872.728
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sstem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	37.470.750	26.537.950
4	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.927.000	0
5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Sitem Air Limbah Domestik	79.601.654	70.366.550
6	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	336.359.850	111.171.900
7	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem	4.926.500	0

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan personil untuk penerepan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 29
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	1 orang
2	S1/DIV	3 orang
3	DIII	-
4	DII	-
5	SMA dan D1	3 orang
	Jumlah	6 orang

Tabel 4. 30
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	2 orang
2	III	1 orang
3	II	0 orang
4	THL	3 orang
	Jumlah	6 Orang

4.3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya selama 1 (satu) tahun anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi

▪ Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Untuk capaian SPM air minum sehari-hari dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

Untuk target Tahun 2024 :

$$\text{Capaian SPM Tahun 2024} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Tahun N}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab./Kota Tahun N}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{1.900}{1.900} \times 100\% = 100 \%$$

Untuk Capaian SPM s.d Tahun 2024

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab./Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{52.465}{58.526} \times 100\% = 89,64 \%$$

▪ **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Untuk capaian SPM pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

Untuk target Tahun 2024

$$\text{Capaian SPM tahun 2024} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Tahun N}}{\text{Jumlah Sasaran Rumah Tangga di Kab./Kota Tahun N}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{350}{350} \times 100\% = 100 \%$$

Untuk Capaian SPM s.d Tahun 2024

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab./Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{54.110}{58.526} \times 100\% = 92,50 \%$$

Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

Tabel 4. 31
Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Sasaran (orang)	Realisasi (orang)	Realisasi (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	58.526	52.465	89,64 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58.526	54.110	92,50 %

b. Mutu Pelayanan Dasar

a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Tabel 4. 32
Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan
Kebutuhan Pokok Air Minum
Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
1	Ukuran kuantitas Air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	Rumah tangga	380	380	0	100 %
2	Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	380	380	0	100 %

3	Ukuran kuantitas Air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan Jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM.	Rumah Tangga				
4	Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meneyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				

b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Tabel 4. 33
Mutu Pelayanan Dasar pada Penyediaan Pelayanan
Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik					
1	Ukuran Kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	50	50	0	100 %
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa perhektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta di buang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	80	80	0	100 %

3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah tangga	10	0	0	100 %
---	---	--------------	----	---	---	-------

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala :

- Kurangnya Jumlah personil/pegawai di bidang penginput SPM
- Kesian data yang terbatas
- Masih kurangnya pemahaman permendagri yang terbaru

b. Permasalahan :

- Pengumpulan Data
keterbatasan SDM dan pendanaan dalam melakukan pengumpulan data, serta perlunya persamaan persepsi terhadap satuan data (jiwa, atau rumah, atau rumah tangga)
- Penghitungan Kebutuhan
masih terbatasnya pemahaman SDM pengampu SPM PU dalam cara penghitungan teknisnya
- Perencanaan dan Penganggaran
Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk SPM. Belum tersedianya dokumen yang baik untuk SPM
- Pelaksanaan
Ada Masyarakat yang belum mau menggunakan tangki septic dan jamban yang sudah ada

c. Solusi :

- Pengumpulan Data
Menambah personil untuk mendukung pelaksanaan SPM.
- Penghitungan Kebutuhan
Meningkatan kualitas SDM pengelola SDM melalui pelatiha, bimtek maupun workshop dan Menyamakan persepsi pemahaman terhadap DO capaian SPM.
- Perencanaan dan Penganggaran
Pemberian porsi dana anggaran APBD untuk SPM bidang Pekerjaan Umum serta memaksimal dana yang tersedia dengan menyelesaikan dan memprioritaskan penyelesaian masalah sanitasi dan air minum dikawasan yang rawan sanitasi dan air minum dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pelaksanaan
Meningkatkan kerja sama dengan OPD teknis terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Menggandeng Tim Penggerak PKK dalam memberikan sosialisasi pentingnya sanitasi aman dan layak bagi kesehatan dan lingkungan serta mengajak ibu-ibu untuk berperan aktif dalam kegiatan / program sanitasi dan air minum yang diadakan di daerahnya.

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) Jenis Pelayanan Dasar terdiri dari:

- a. Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat No 13 Tahun 2023 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi criteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana Yang Akan Ditangani Pada Tahun N}} \times 100\%$$

b. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. JDIH Kementerian PUPR Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Target Capaian SPM oleh Daerah Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target (%)	Target Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penerapandan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat		58.237.250	58.237.250
Program : Pengembangan Perumahan			
1	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.971.000	2.213.800
	Sub Kegiatan :		
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.971.000	2.213.800
2	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.117.250	52.850.900
	1Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	53.117.250	52.850.900
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya			
3	Kegiatan: Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1.264.500	1.045.800
	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.264.500	1.045.800
	Kegiatan : Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	884.500	580.000
4	1 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.500	580.000

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan Kabupaten Dharmasraya antara lain :

Tabel 4.36
Tabel Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	3 orang
2	S1/DIV	6 orang
3	DIII	1 orang
4	DII	0 orang
5	SMA dan D1	0 orang
Jumlah		10 orang

Tabel 4.37
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	1 orang
2	III	4 orang
3	II	1 orang
4	PPPK Gol IX	1 orang
5	THL	3 orang
Jumlah		10 orang

4.4.5 Hasil Capaian

a. Realisasi

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana Yang Akan Ditangani Pada Tahun N}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Perumahan Rakyat, diuraikan sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.38
Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Realisasi (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1	1	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0

*Catt: Pada capaian SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, target dan realisasi 0 karena pada tahun 2024 tidak ada rumah yang terdampak program relokasi pemerintah, namun pada tahun 2024 dilakukan pendataan rumah yang berada di daerah rawan bencana dan daerah relokasi program pemerintah.

b. Mutu Pelayanan Dasar

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Tabel 4.39
Mutu Pelayanan Dasar pada
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni
bagi Korban Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu yang diperoleh
I	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					100 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah	0	0	0	0
		2	Melakukan Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100%
		3	Pemukiman kembali bagi korban bencana Rumah	0	0	0	0
		4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0

- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Tabel 4.40
Mutu Pelayanan Dasar pada
Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Capaian Mutu yang diperoleh
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				100 %
1	Pendataan	1 identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %
		2 identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %
		3 pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %

		4	identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	1	1	0	100 %
		5	identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota	1	1	0	100 %
		6	identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)	1	1	0	100 %
		7	pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	1	0	100 %
	2	1	penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %
		2	penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota	1	1	0	100 %
		3	penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	1	1	0	100 %

		kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota				
		4 penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	1	0	100 %
3	Perencanaan	1 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota	1	1	0	100 %
		2 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1	1	0	100 %

4.4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Sub urusan Bencana di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 tidak ada terkendala dalam pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan anggaran dan pelaksanaannya. Namun untuk pelaksanaannya tidak seluruh yang terkena bencana yang ditangani, karena terkendala dengan anggaran.

b. Solusi :

Anggaran terhadap penanganan korban bencana pada tahun 2023 dituntaskan dan ditambah lagi dengan anggaran untuk penanganan masyarakat yang berada di daerah raan bencana.

4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar terdiri dari:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kabupaten Dharmasraya pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SatPolPP dan Damkar). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk Pelayanan SPM Bidang Bencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Pelayanan SPM Bidang Kebakaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi :

Tabel 4. 41
Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Target Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

4.5.3 Alokasi Anggaran

Komponen kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut:

Tabel 4. 42
Alokasi Anggaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1,481,877,600	1,451,965,773
	Sub Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		
	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		
	Program :Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	526.054.050,-	517.668.591,-
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.596.400,-	408.473.000,-
	Sub Kegiatan :		
1	1 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	44.996.400,-	44.876.600,-
	2 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	363.600.000,-	363.596.400,-
	3 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan	8.000.000,-	0,-
	Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	96.502.150,-	96.322.000,-
	Sub Kegiatan:		
2	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.233.500,-	24.131.000,-
	2 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72.268.650,-	72.191.060,-

3	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		12,955,500	12,873,591
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	0	0
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0	0
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	0
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	0	0
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	12,955,500	12,873,591
Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)				
Sub Bidang Kebencanaan			640,345,500	619,060,082
Program :Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)			640,345,500	619,060,082
1	Kegiatan :Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		5.120.000	3. 600.000,-
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	-	-
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis	5.120.000	3. 600.000,-
2	Kegiatan :Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		464.964.800	457.983.604
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900	5.999.600
	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	399.970.000	398.145.740
	3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.500.000	7.500.000

	4	Pengendalian operasi, penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	6.111.900	2.542.600
	5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	3.000.000	3.000.000
	6	Penyusunan Rencana Kontijensi	42.271.000	40.795.664
	Kegiatan :Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		134.856.700	122.601.200
	Sub Kegiatan :			
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	24.000.000	17.699.600
3	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	3.048.700	1.501.600
	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	41.008.000	39.952.400
	4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.500.000	1.647.600
	5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	61.800.000	61.800.000
	6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	2,500,000	0
	Kegiatan :Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		35,404,000	34,875,278
	Sub Kegiatan :			
4	1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35,404,000	34,875,278
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)				
	Sub Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		315.478.050,-	315.237.100,-
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan		315.478.050,-	315.237.100,-
1	Kegiatan :Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		270.394.800,-	270.387.100,-

	Sub Kegiatan :			
1.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		270.394.800,-	270.387.100,-
2	Kegiatan :Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		7.957.000,-	7.852.000,-
	Sub Kegiatan:			
1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		7.957.000,-	7.852.000,-
	Kegiatan :Investigasi Kejadian Kebakaran		6.426.250,-	6.330.000,-
3	Sub Kegiatan:			
1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		6.426.250,-	6.330.000,-
	Kegiatan :Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		25.200.000,-	25.168.000,-
4	Sub Kegiatan :			
1	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		25.200.000,-	25.168.000,-
	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		5.500.000,-	5.500.000,-
5	Sub Kegiatan :			
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan		5.500.000,-	5.500.000,-

4.5.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk penerepan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

4.6 Sub Urusan Bencana (BPBD)

Tabel 4. 43
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	2 orang
2	S1/DIV	16 orang
3	DIII	1 orang
4	DII	0 orang
5	SMA dan D1	25 orang
6	SMP	1 orang
	Jumlah	45 orang

Tabel 4. 44
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	1 orang
2	III	10 orang
3	II	2 orang
4	I	0 Orang
5	Non ASN	31 orang
	Jumlah	45 orang

4.7 Sub Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)

Tabel 4. 45
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	1 orang
2	S1/DIV	8 orang
3	DIII	0 orang
4	DII	0 orang
5	SMA dan D1	243 orang
	Jumlah	252 orang

Tabel 4. 46
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	3 orang
2	III	5 orang
3	II	14 orang
4	I	-
5	Non ASN	210 orang
6	PPPK Gol V	20 orang
	JUMLAH	252 Orang

4.5.5 Hasil Capaian

a . Realisasi

Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi tahun 2023}}{\text{Jumlah warga negara yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{Persentase Pelayanan} & 0 & & & & \\ \text{Ketentrman dan} & 1 & & \text{X 100\%} & = & 100\% \\ \text{Ketertiban Umum} = & & & & & \end{array}$$

Catatan: Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada ***"Tidak Ada"***, karena pada Tahun 2023 Operasi Penegakan Ketentrman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda ataupun Perkada tidak ada yang menyebabkan kerugian materil atau jiwa, dalam artian semua berjalan dengan lancar dan tertib.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Dharmasraya yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Data jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana ini berdasarkan dari dokumen Kajian Resiko Bencana/ Peta Rawan Bencana.

a) SubKegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran/ Indikator Kinerja Capaian SPM yaitu:

Sasaran: Tersedianya data/ informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun.

Target capaiannya yaitu tersusunnya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun =	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$
--	--

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
--	------------------------------------

b) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran / Indikator Capaian SPM:

Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun.

Target capaiannya yaitu seluruh warga yang berada dikawasan rawan bencana (2.267 jiwa), dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun=	$\frac{\text{Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh warga negara di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$
---	---

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

Jumlah warga negara
termasuk
kelompok rentan di
kawasan rawan
bencana bencana
Kabupaten/Kota
yang memperoleh
sosialisasi, $\frac{2.267}{2.267} \times 100\% = 100\%$
komunikasi,
informasi dan
edukasi
sesuai jenis ancaman
bencana yang
ada di kawasan
tempat tinggalnya
selama 1 (satu)
tahun=

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintahan daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana.

Penerima Layanan : Setiap Warga Negara di Kabupaten Dharmasraya yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya data / informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah dokumen RPB yang disusun}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah satu dokumen RPB Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun}}{1} \times 100\% = 100\%$$

b) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota yang disusun}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah satu dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun}}{1} \times 100\% = 100\%$$

c) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Indikator: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana}}{\text{Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan yang ikut pelatihan}} \times \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana}}{100\%}$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{2.267} \times 100\% = 4.02\%$$

d) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota, dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mengikuti gladi Kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
--	--

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	$\frac{200}{2.267} \times 100\% = 8.04\%$
--	---

e) Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.

Target capaiannya yaitu 2.267 orang, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya}}{\text{Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya}}{1} \times 100\% = 100\%$$

f) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya.

Target capaiannya yaitu 2.267 orang, dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya.	$\frac{\text{Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya yang disediakan}}{\text{Target penyediaan Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas dalam 1 tahun}} \times 100\%$
---	---

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya.	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
---	------------------------------------

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan : Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Dharmasraya.

Target capaiannya yaitu seluruh warga negara yang menjadi korban bencana pada tahun 2024 (1099 jiwa)

a) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas}}{\text{Jumlah Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas}}{1} \times 100\% = 100\%$$

Catatan:

Pada tahun 2024 tidak ada terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mengharuskan terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan status darurat KLB

b) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

Indikator: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat}}{\text{Jumlah kejadian bencana yang keluar SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB nya}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat}}{1} \times 100\% = 100\%$$

c) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas darurat bencana.

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Target capaiannya yaitu terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota. Dengan rumus sebagai berikut:

Untuk aktivasi sistem komando dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah keseluruhan Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota}}{1} \times 100\% = 100\%$$

d) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Indikator: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.

Target capaiannya yaitu seluruh warga negara yang menjadi korban bencana pada tahun 2024 (1099 orang).

dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana}}{\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana}}{\frac{1099}{1099}} \times 100\% = 100\%$$

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran yaitu paling lama 15 (lima belas) menit setelah kejadian, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak hanya melibatkan personil atau petugas pemadam kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetapi juga dari relawan-relawan dari pemadam kebakaran yang telah dibentuk per

Nagari dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2 orang per Nagari dikali 52 Nagari dengan total 104 orang.

Korban kebakaran adalah korban jiwa dari warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan penyelamatan, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang terdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*) dan lain-lain.

Untuk jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dapat digambarkan pada rumus dibawah ini:

$$\text{Persentase pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi oleh dinas pemadam kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase pelayanan} & & \\ \text{pemadaman penyelamatan} & 46 & \\ \text{dan evakuasi oleh dinas} & & \\ \text{pemadam kebakaran=} & \frac{\quad}{46} & \times 100\% = 100\% \end{array}$$

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dapat digambarkan pada rumus dibawah ini :

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase pelayanan} & \text{Jumlah Warga Negara yang meperoleh} & \\ \text{penyelamatan dan} & \text{layanan penyelamatan dan evakuasi} & \\ \text{evakuasi korban} & \text{korban kebakaran} & \\ \text{kebakaran=} & \frac{\quad}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi}} & \times 100\% \\ & \text{korban kebakaran} & \end{array}$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase pelayanan} & 230 & \\ \text{penyelamatan dan evakuasi} & & \\ \text{korban kebakaran =} & \frac{\quad}{230} & \times 100\% = 100\% \end{array}$$

Untuk layanan penunjang yakni layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran, dapat digambarkan pada rumus dibawah ini:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase jumlah dan jenis} & \text{Jumlah dan jenis layanan} & \\ \text{layanan penyelamatan dan} & \text{penyelamatan dan evakuasi pada} & \\ \text{evakuasi pada kondisi} & \text{kondisi membahayakan manusia} & \\ \text{membahayakan manusia} & \text{(operasi darurat non kebakaran)} & \\ \text{(operasi darurat non} & \text{oleh Dinas Pemadam Kebakaran} & \\ \text{kebakaran) oleh Dinas} & \text{dan Penyelamatan} & \\ \text{Pemadam Kebakaran dan} & \frac{\quad}{\quad} & \times 100\% \\ \text{Penyelamatan di} & \text{Jumlah kejadian operasi darurat} & \\ \text{kabupaten/kota =} & \text{non kebakaran di Kabupaten} & \end{array}$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Persentase jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota}}{189} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan uraian di atas terkait layanan dasar SPM Sub Urusan Trantibumlinmas, Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, untuk capaian SPMnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4. 47
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	1	0	0
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2267	2267	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	2486	300	12.06
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1099	1099	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	230	230	100

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar disini meliputi jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan dan yang tersedia serta capaian mutu yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut :

a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4. 48
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

N o	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100%
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional	14	14	0	100%
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli	4	4	0	100%

3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas	14	14	0	100%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	1	0	100%
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat	1	0	0	100%
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	1	0	0	100%

b) Pelayanan Pencapaian Kebencanaan

Tabel 4. 49
Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pencapaian Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN						
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Jumlah Dokumen Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	-	100
2	Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Dikawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Diidentifikasi Dan Dilakukan Pemetaan Dikawasan Rawan Bencana	2267	2267	-	100
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana	2267	2267	-	100

4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Jumlah unit Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	5	5	-	100
II.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Jumlah unit Sarana prasarana penanggulangan bencana	4	4	-	100
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Jumlah personil yang telah mengikuti peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100	100	-	100
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Jumlah posko Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	-	100

2	Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Terdata	1099	1099	-	100
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Jumlah dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	1	1	-	100
4	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah terlaksana Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	1	-	1	0
5	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah terlaksana Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	59	59	-	100
Catatan: a. Pada tahun 2024 tidak ada terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mengharuskan terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan status darurat KLB						

c) Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 4.50
Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Penyelamatan
Dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang di peroleh (%)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
I.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	230	230	-	100
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap	46	46	0	100

	memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)				
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	1	0	100
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.	15	15	0	100
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	35	35	0	100
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	0	1	100
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	1	0	1	100

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Sub Urusan Bencana (BPBD)

a. Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Sub urusan Bencana di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan pada setiap tahapan pemenuhan SPM tersebut diantara sebagai berikut :

- Pengumpulan Data

Belum adanya petugas/ relawan yang aktif dalam melakukan pendataan dilapangan terkait data jumlah warga negara yang akan mendapatkan layanan SPM sub bencana daerah.

- Penghitungan Kebutuhan

Disebabkan karena belum adanya kegiatan pendataan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sehingga menyulitkan dalam menghitung kebutuhan jumlah barang/ jasa yang harus disediakan pemerintah daerah sesuai dengan mutu layanan yang harus diberikan kepada warga negara yang berada dikawasan rawan bencana dan jumlah korban bencana yang berhak mendapatkan pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Daerah.

- Perencanaan Penganggaran

Belum mempedomani Permendagri 101 Tahun 2018 dalam membuat rincian belanja untuk memenuhi komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SPM Sub urusan bencana sehingga rincian belanja di dalam DPA tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 101 tahun 2018.

- Pelaksanaan

Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM yang menangani kegiatan SPM sub urusan bencana.

- Belum memaksimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah.

b. Solusi :

- Pengumpulan Data

Membentuk kelompok relawan bencana di setiap pemerintahan nagari.

- Penghitungan Kebutuhan

Melakukan perhitungan terhadap kebutuhan dan ketersediaan barang/ jasa untuk mencapai pemenuhan layanan ke masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2021.

- Perencanaan dan Penganggaran

Membuat rincian belanja untuk memenuhi komponen komponen biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SPM sub urusan bencana dengan mempedoani Permendagri 101 Tahun 2018.

- Pelaksanaan

Memberikan bimbingan teknis/ pelatihan kepada aparatur yang melaksanakan kegiatan standar pelayanan minimal sub urusan bencana.

- Memaksialkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai pemenuhan SPM sub urusan bencana.

Sub Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)

a. Permasalahan :

- Pengumpulan Data

- Belum tergambaranya secara detail daerah rawan bencana di dalam dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sehingga menyulitkan dalam menentukan secara ilmiah jumlah warga negara dan aparatur yang berada di daerah kawasan rawan bencana.

- Perencanaan dan Penganggaran

Belum mempedomani Permendagri 101 Tahun 2018 dalam membuat rincian belanja untuk memenuhi komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SPM Sub urusan bencana sehingga

rincian belanja di dalam DPA tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 101 tahun 2018

- Pelaksanaan
 - Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas SDM yang menangani kegiatan SPM sub urusan bencana.
 - Belum memaksimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah.

b. Solusi :

- Pengumpulan Data
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus melakukan Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran serta penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB).
- Penghitungan Kebutuhan

Melakukan perhitungan terhadap kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa untuk mencapai pemenuhan layanan kemasyarakatan yang berada di kawasan rawan bencana sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2021
- Perencanaan dan Penganggaran

Membuat rincian belanja untuk memenuhi komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SPM sub urusan bencana dengan mempedomani Permendagri 101 Tahun 2018.
- Pelaksanaan
 - Memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada aparatur yang melaksanakan kegiatan standar pelayanan minimal sub urusan bencana.
 - Memaksimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai pemenuhan SPM sub urusan bencana.

4.6 Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Urusan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. Adapun target pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 51
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Target (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	8 Orang	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Pantai	3 Orang	100 %

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	11 Orang	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	3 Orang	100 %
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	500 Korban	100 %

4.6.3 Alokasi Anggaran

Komponen kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.52
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Sosial

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	SPM Bidang Sosial	419.492.273	415.811.198
	Program : Rehabilitasi sosial	419.492.273	415.811.198
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar , gelandangan dan pengemis di luar panti	341.943.823	338.863.398
1.	Sub kegiatan		
	1 Penyediaan Permakanan	13,105,000.00	12,793,450.00
	2 Penyediaan Sandang	7,746,873.00	7,746,873.00
	3 Penyediaan Alat Bantu	9,488,750.00	9,237,050.00
	4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7,400,000.00	7,400,000.00

	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan Sosial	93,450,000.00	93,165,000.00
	6	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	76,380,500.00	76,370,500.00
	7	Fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	3,039,750.00	2,942,850.00
	8	Pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	100,156,500.00	99,633,905.00
	9	Pemberian Layanan Data & Pengaduan	4,513,000.00	4,085,750.00
	10	Pemberian layanan kedaruratan	2,745,050.00	2,334,100.00
	11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	5,130,900.00	4,862,500.00
	12	Pemberian layanan rujukan	18,787,500.00	18,356,420.00
Program Penanganan Bencana				
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota			77.548.450	76.947.800
2.	Sub Kegiatan :			
	1	Penyediaan Makanan	49,935,000.00	49,935,000.00
	2	Penyediaan Sandang	8,804,950.00	8,669,950.00
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8,153,500.00	8,053,500.00
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6,337,500.00	6,234,200.00
	5	Pemberian Dukungan Psikososial	4,317,500.00	4,046,150.00

4.6.4 Dukungan Personil

Tabel 4.53
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah	
	Kualifikasi Pendidikan	
1	S2	- orang
2	S1/DIV	
	PNS	4 orang
	NON PNS	1 Orang
3	DIII (Non PNS)	- orang
4	SMA dan D1	- orang
5	PILAR-PILAR SOSIAL	
	TAGANA	
	S1	7
	SLTA	13
	PENDAMPING PKH :	
	S1 + Gelar Profesi	
	S1	27
	D3	1
	PENDAMPING REHSOS :	
	S1	1
	SMA	1
Jumlah		55 orang

Tabel 4.54
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jumlah	
	Pangkat dan Golongan	
1	IV	- orang
2	III	4 orang
3	II	1 orang
4	Non ASN/Tagana/Pendamping PKH/Pendamping Rehsos	50 orang
Jumlah		55 orang

4.6.5 Hasil Capaian

a. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.55
Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	8	8	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Pantai	3	3	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	11	11	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	3	3	100 %
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	500	500	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yaitu sebanyak 25 orang, dengan rumus indikator pencapaiannya yaitu:

$$\text{Persentase (\%)} \text{ penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$$

Dapat digambarkan capaiannya pada rumus dibawah ini:

$$\text{Persentase (\%)} \text{ penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti} = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar disini meliputi jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan dan yang tersedia serta capaian mutu yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti

Tabel 4.56
Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar
Diluar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/J asa yang belum ter sedia	Capaian Mutu yang diperoleh
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti				100 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Layanan Data Pengaduan Yang Dimiliki	8	8	0	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	8	8	0	100%
3	Penyediaan permakanan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	1	1	0	100%

4	Penyediaan sandang	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Menerima Paket Sandang	8	8	0	100 %
5	Penyediaan alat bantu	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memanfaatkan Alat Bantu	2	2	0	100 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	8	8	0	100 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	8	8	0	100 %
8	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	8	8	0	100 %

9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Fasilitasi dokumen kependudukan	3	3	0	100 %
10	Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh fasilitasi layanan pendidikan dan Kesehatan	8	8	0	100 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	8	8	0	100 %
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh reunifikasi Dengan Keluarga	8	8	0	100 %
13	Layanan Rujukan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh rujukan	1	1	0	100 %

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di luar Panti

Tabel 4. 57
Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi
Sosial Dasar Anak Terlantar
Di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
II.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Pantai				100%
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Layanan Data Pengaduan Yang Dimiliki	3	3	0	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	3	0	100%
3	Penyediaan permakanaan	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Paket Permakanaan Sesuai Standar Gizi	3	3	0	100%
4	Penyediaan sandang	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Paket Sandang	3	3	0	100%
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	0	100%

6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	0	100%
7	Pemberian bimbingan social kepada keluarga anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga	3	3	0	100%
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah Dan Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Fasilitas dokumen kependudukan	2	2	0	100%
9	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	0	100%
10	Pemberi Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga	1	1	0	100%
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	0	100%

12	Layanan Rujukan	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Layanan Rujukan	1	1	0	100%
----	-----------------	---	---	---	---	------

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti

Tabel 4. 58
Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi
Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar
Diluar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
III.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti				100 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Layanan Data Pengaduan Yang Dimiliki	11	11	0	100%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	0	100%
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	11	11	0	100%

4	Penyediaan Sandang	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Menerima Paket Sandang	11	11	0	100%
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memanfaatkan Alat Bantu	1	1	0	100%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh perbekalan kesehatan	11	11	0	100%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11	11	0	100%
8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	11	11	0	100%
9	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh fasilitasi dokumen kependudukan	3	3	0	100%

10	Akses kelayananke sehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh layanan kesehatan dasar	1	1	0	100%
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh layanan Penelusuran Keluarga	1	1	0	100%
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Reunifikasi Keluarga	1	1	0	100%
13	Layanan Rujukan	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Layanan Rujukan	1	1	0	100%

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Diluar Panti

Tabel 4. 59
Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan
Pengemis Diluar Panti

	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Di butuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang di peroleh
IV.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti				100%
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Layanan Data Pengaduan Yang Dimiliki	3	3	0	100%
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	0	100%
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	3	3	0	100%
4	Penyediaan Sandang	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Paket Sandang	3	3	0	100%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3k)	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh P3k	3	3	0	100%

6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	0	100%
7	Pemberian bimbingan social kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Pemberian bimbingan social kepada keluarga gelandangan dan pengemis	3	3	0	100%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh fasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	2	2	0	100%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1	1	0	100%
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Layanan Penelusuran Keluarga	1	1	0	100%
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh layanan reunifikasi Dengan Keluarga	1	1	0	100%
12	Layanan Rujukan	Jumlah Warga Negara / Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh layanan rujukan	1	1	0	100%

- e. Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.60
Mutu Pelayanan Dasar pada Perlindungan Jaminan
Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana
Bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar / Jenis Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu yang diperoleh
V.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				100%
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Makan	500	500	0	100%
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang	50	50	0	100%
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki	11	11	0	100%
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Paket Pemakanan Khusus Bagi Kelompok Rentan	35	35	0	100%
5	Pelayanan Dukong Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Psikososial	500	500	0	100%

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

- Tidak semua para pemangku kepentingan memahami program dan kegiatan tentang pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar ini, jadi memerlukan perjuangan dalam mengedukasi, mensosialisasi dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Pun hasilnya belum sesuai dengan harapan.
- Karena belum adanya mandatori yang jelas tentang persentase anggaran yang disediakan untuk pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara jadi anggaran yang tersedia belum memenuhi standar pemenuhan pelayanan dasar baik mutu maupun jenisnya.

Permasalahan :

- Pengumpulan Data
Tidak ada permasalahan
- Perhitungan Kebutuhan
Perlunya perhitungan kebutuhan terkait 5 indikator SPM
- Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran yang tersedia belum mampu untuk mengakomodir semua laporan dari Nagari
- Pelaksanaan
Tidak terdapat permasalahan
- Lain-lain
Adanya perbedaan persepsi para pengampu SPM tentang penggunaan istilah-istilah seperti “Bencana”

b. Solusi :

- Pengumpulan Data
- Perhitungan Kebutuhan
Perhitungan kebutuhan berdasarkan skala prioritas
- Perencanaan dan Penganggaran
Sub kegiatan yang prioritas yang dilaksanakan.
- Lain-lain
Sosialisasi dan edukasi tentang pemakaian istilah-istilah tersebut Sosialisasi dan edukasi tentang pemakaian istilah-istilah tersebut

4.7 Program Dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang mendukung Bidang Urusan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.61
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		7 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,
		8 Pembangunan Ruang Kelas Baru
		9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

		9.	Pembangunan Ruang Kelas Baru
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
		2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Bottom of Form
		4.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
		5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		6.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		7.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		8.	Pembangunan Ruang Kelas Baru
		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
		1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	
		1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang mendukung di Bidang Urusan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.62
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		12.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang mendukung di Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.63
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			2.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			3.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			4.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	
			1.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
			2.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sstem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			4.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			5.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Sitem Air Limbah Domestik (SPALD)
			6.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			7.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang mendukung di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.64
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4.7.5 Bidang Urusanketentraman,Ketertiban Umum Dan Pwerlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.65
Progam dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program		Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
				5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
				6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.
				2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
				3.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

				Penegakkan Perda Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				2. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			1.	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
			2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			1.	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
			2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			4.	Pengendalian operasi, penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
			5.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
			6.	Penyusunan rencana kontijensi
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

			3.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			5.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			1.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran	
			1.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang mendukung di Bidang Urusan Sosial, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.66
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar , Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti
			1. Layanan Data Dan Pengaduan
			2. Penyediaanlayananke daruratan / layananreaksicepat
			3. Penyediaan Permakanan
			4. Penyediaan Sandang
			5. Penyediaan Alat Bantu
			6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
			7. Pemberian bimbingan social kepada keluarga gelandangan dan pengemis
			8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KartuIdentitas Anak / Bukti dokumenkependudukan
			9. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
			10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			11. Pemberian Pelayanan Reunikasi Keluarga
			12. Layanan Rujukan

.	PerlindunganJmi nan Sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.	Penyediaan Makanan
			2.	Pelayanan Dukungan Psikososial
			3.	Penyediaan Permakanan
			4.	Penyediaan Sandang
			5.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 merupakan progress report dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 dan sumber dana lainnya (tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini kami sajikan bersamaan dengan capaian kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, baik pelaksana kebijakan umum maupun pelaksana urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah pusat yang selanjutnya akan kami jadikan bahan demi penyempurnaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Segala keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak dan lapisan masyarakat. Untuk itu keberhasilan ini merupakan milik kita bersama dan segala kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga terwujudnya Kabupaten Dharmasraya maju yang mandiri dan berbudaya.



Pulu Punjung, Maret 2025
BUPATI DHARMASRAYA,

[Signature]
ANISA SUCI RAMADHANI, S.H.,LL.M.

